Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

LAPORAN AKHIR

Strategi Literasi Inklusi Keuangan

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan laporan akhir strategi literasi inklusi keuangan.

Hasil kajian ini memberikan informasi tentang strategi literasi inklusi Keuangan sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar individu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. Harapannya, hasil kajian ini akan memberikan strategi terhadap upaya peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul, meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan lembaga jasa keuangan serta pihak-pihak terkait dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan dan Mengakselerasi pencapaian target indeks inklusi keuangan.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan hasil kajian ini. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan hasil kajian ke depan.

Yogyakarta, Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Cover i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 5
1.3. Sasaran 5
BAB II KAJIAN LITERATUR 6
2.1. Literasi Keuangan dan Kesejahteraan 6
2.2. Literasi Keuangan 8
2.3. Inklusi Keuangan dan Pembangunan 9
2.4. Kesejahteraan Finansial 10
2.5. Kerangka Pikir 11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 13
3.1. Pemahaman Umum Program SNLKI 13
3.1.1. Literasi Keuangan Indonesia 14
3.1.2. Inklusi Keuangan Indonesia 21
3.2. Gambaran Umum Wilayah 23
3.2.1. Potensi Wilayah 23
3.2.2. Demografi 24
3.2.3. Kondisi Perekonomian 26
3.3. Strategi Pengumpulan Data 37
3.3.1. Survei Instansional 38
3.3.2. Survei Primer 38

3.3.3. Studi Kepustakaan 39
3.4. Metode Analisis 39
3.4.1. Statistik Deskriptif 40
3.4.2. Metode Menghitung Literasi dan Finansial Keuangan 40
3.4.3. Propensity Score Matching 41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 45
4.1. Gambaran Rumah Tangga Kabupaten Bantul 45
4.2. Sebaran Layanan Keuangan Perbankan Kabupaten Bantul 50
4.3. Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) 52
4.4. Evaluasi Dampak PKH 54
4.5. Analisis Literasi, Inklusi, dan Literasi Digital Keuangan 57
BAB V PENUTUP 79
5.1. Kesimpulan 79
5.2. Saran 82
5.3. Rekomendasi 83
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Pikir Literasi dan Inklusi Keuangan Kabupaten Bantul 2023 12
Gambar 3. 1. Indeks Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2013, 2016, 2019, dan 2022 15
Gambar 3. 2. Literasi Keuangan Indonesia Berdasarkan Gender Tahun 2016 ,2019, dan 2022 16
Gambar 3. 3. Literasi Keuangan Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia pada Tahun 2016 dan 2019 17
Gambar 3. 4. Literasi Keuangan Berdasarkan Status Pekerjaan Indonesia Tahun 2016 dan 2019 18
Gambar 3. 5. Literasi Keuangan Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia 19
Gambar 3. 6. Tingkat Literasi Keuangan Indonesia Berdasarkan Status Sosial 20
Gambar 3. 7. Indeks Inklusi Keuangan Indonesia Tahun 2013, 2016, 2019, dan 2022 21
Gambar 3. 8. Inklusi Keuangan Indonesia Berdasarkan Akses Layanan Keuangan 22
Gambar 3. 9. Peta Wilayah Kabupaten Bantul..... 23
Gambar 3. 10. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Kab Bantul . 25
Gambar 3. 11. Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga Kab Bantul 25
Gambar 3. 12. Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Kab Bantul 25
Gambar 3. 13. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Kab Bantul 26

Gambar 3. 14. Manfaat Peminjaman Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta 27
Gambar 4. 1. Kepemilikan Rumah oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul 45
Gambar 4. 2. Kepemilikan Emas oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul 46
Gambar 4. 3. Kepemilikan Motor oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul 47
Gambar 4. 4. Kepemilikan Mobil oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul 47
Gambar 4. 5. Manfaat Internet untuk Rumah Tangga Kabupaten Bantul 47
Gambar 4. 6. Akses Kredit oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul 48
Gambar 4. 7. Sumber Pendanaan oleh Rumah Tangga 49
Gambar 4. 8. Status Ekonomi Rumah Tangga (Pengeluaran Rumah Tangga) 50
Gambar 4. 9. Status Ekonomi Rumah Tangga (Pendapatan Per Kapita) 50
Gambar 4. 10. Sebaran Akses Perbankan Kabupaten Bantul 51
Gambar 4. 11. Indeks Gini Kabupaten Bantul Tahun 2021 dan 2022 53
Gambar 4. 12. Jenis Kelamin Responden 58
Gambar 4. 13. Lokasi Tempat Tinggal Responden 58
Gambar 4. 14. Kelompok Usia Responden 58
Gambar 4. 15. Status Perkawinan Responden 58
Gambar 4. 16. Kelompok Usia Responden 59
Gambar 4. 17. Literasi dan Inklusi Keuangan di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bantul 60
Gambar 4. 18. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul 60

Gambar 4. 19. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin 61
Gambar 4. 20. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 62
Gambar 4. 21. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal.. 63
Gambar 4. 22. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Kelompok Usia 64
Gambar 4. 23. Indikator Pembentuk Indeks Literasi Keuangan ... 66
Gambar 4. 24. Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Karakteristik Responden 68
Gambar 4. 25. Produk Keuangan yang Pernah Didengar oleh Responden 70
Gambar 4. 26. Produk Keuangan yang Pernah Dimiliki oleh Responden 71
Gambar 4. 27. Produk Keuangan yang Telah Dimiliki Selama Dua Tahun oleh Responden 72
Gambar 4. 28. Cara Menabung yang Dilakukan oleh Responden.. 74
Gambar 4. 29. Strategi Responden untuk Memenuhi Kebutuhan Saat Pendapatan Tidak Cukup 75
Gambar 4. 30. Indikator Pembentuk Indeks Literasi Keuangan Digital 77
Gambar 4. 31. Indeks Literasi Keuangan Digital Berdasarkan Karakteristik Responden..... 78

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. PDRB ADHK Kabupaten Bantul 28
Tabel 3. 2. Realisasi APBD Kabupaten Bantul 2022 31
Tabel 4. 1. Estimasi PSM Evaluasi Dampak PKH 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2019, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 54,55% dan indeks inklusi keuangan sebesar 82,08%. Adanya kesenjangan antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi keuangan yang masih relatif tinggi, hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

Berdasarkan SNLIK tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Sejalan dengan *Financial Literacy Around The World Report* yang menginterpretasikan hasil The S&P Global FinLit Survey (2014) menunjukkan bahwa di negara-negara berpendapatan rendah cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah jika

dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dan tingkat literasi keuangan yang rendah pada kelompok perempuan, orang berpendapatan rendah dan orang berpendidikan rendah.

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan tidak terlepas dari literasi keuangan. Literasi keuangan diterjemahkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Akses inklusif terhadap jasa keuangan menjadi hal yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dampak Indeks Literasi Keuangan yang rendah adalah menghambat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memperlebar kesenjangan sosial, tidak mendukung penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusi dan ketahanan stabilitas sektor jasa keuangan menjadi kunci pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran penting dan kontribusi sektor jasa keuangan Indonesia melalui peran intermediasi keuangan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, kemudian ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengeluarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Melalui Visi SNLKI 2021–2025 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi (*Well Literate*) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan". Visi dimaksud dijabarkan dalam tiga misi, yaitu:

1. Memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan;
2. Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan; dan
3. Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif.

SNLKI 2021-2025 disusun agar implementasi program strategis lebih terarah dan fokus. SNLKI 2021-2025 ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat baik secara konvensional maupun syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan yang ditargetkan sebesar 90% sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada tanggal 28 Januari 2020.

Dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh sektor rumah tangga dan kaum perempuan tetapi juga pada sektor UMKM. Berdasarkan hasil survei *United Nation Development Program* (UNDP) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terkait dampak Covid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menjadi

salah satu sektor yang sangat terpengaruh pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan 77% responden mengalami penurunan pendapatan dimana hampir 35% responden UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi di kisaran 40%-60%.

Di sisi lain, krisis pandemi Covid-19 telah membawa dampak positif berupa percepatan transformasi digital di semua aspek kehidupan termasuk sektor jasa keuangan. Pembatasan yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia telah membuat masyarakat semakin mampu beradaptasi dengan berbagai teknologi digital termasuk dalam sistem pembayaran dan berbagai layanan keuangan yang tersedia secara online. Digitalisasi telah memberikan kemudahan kepada berbagai pihak khususnya pada sektor rumah tangga untuk dapat melakukan pembayaran atau akses layanan keuangan secara online. Namun, perkembangan teknologi digital tetap memiliki risiko antara lain terjadinya kejahatan siber dan penipuan keuangan secara online yang semakin meningkat di masa pandemi.

Faktor keamanan menjadi isu penting dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Untuk itu perlindungan data pribadi konsumen merupakan prioritas utama yang harus dijaga, baik oleh konsumen maupun lembaga jasa keuangan agar konsumen dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital secara efektif dan aman. Literasi keuangan digital akan membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat ke sektor jasa keuangan secara cepat dan mudah. Dalam jangka panjang diperkirakan semua transaksi keuangan akan beralih ke teknologi digital dan menuju transaksi non tunai. Oleh karena itu, hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni.

Sehubungan dengan pentingnya strategi literasi keuangan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan literasi keuangan di Kabupaten Bantul maka dipandang perlu untuk menyusun Kajian Strategi Literasi Inklusi Keuangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya Kajian Strategi Literasi Inklusi Keuangan adalah sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar individu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan maksud yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Kajian Strategi Literasi Inklusi Keuangan adalah:

1. Memberikan arah strategi bagi upaya peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul;
2. Meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan lembaga jasa keuangan serta pihak-pihak terkait dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan; dan Mengakselerasi pencapaian target indeks inklusi keuangan.

1.3. Sasaran

Sasaran dari hasil penyusunan Kajian Strategi Literasi Inklusi Keuangan adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah, lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak terkait dalam peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul.

BAB II
KAJIAN LITERATUR

2.1. Literasi Keuangan dan Kesejahteraan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang di bidang pengelolaan keuangan yang dapat memandu mereka dalam membuat keputusan keuangan secara efektif (Huston, 2010). (Remund, 2010) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengukuran terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep keuangan, dan memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang, serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK), literasi keuangan didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan kesadaran individu masyarakat tentang lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan yang ditawarkan pada lembaga tersebut. Otoritas Jasa keuangan berdasarkan hasil surveynya telah melakukan pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat literasi keuangannya menjadi *well literate*, *sufficient literate*, *less literate* dan *not literate*.

Golongan yang termasuk dalam kategori *well literate* merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produknya. Kelompok masyarakat ini terampil menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Golongan kedua adalah

sufficient literate. Golongan ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produknya, namun kelompok ini belum terampil menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut. Selanjutnya adalah kelompok *less literate*. Kelompok ini merupakan golongan masyarakat yang hanya sebatas memiliki pengetahuan tentang produk dan lembaga jasa keuangan. Adapun kelompok terakhir adalah not literate, kalangan ini merupakan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang produk dan lembaga keuangan yang tersedia (snki.go.id, 2018).

Bay et al., 2014 mengemukakan bahwa literasi keuangan tidak dilihat hanya pada sebatas aspek kemampuan menulis, membaca dan memahami bahasa keuangan dan akuntansi. Akan tetapi, literasi keuangan merupakan keterampilan bidang keuangan yang harus dipelajari dan diimplementasikan dalam tataran praktis pada pengelolaan keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan yang tersedia.

Carpena & Zia, (2020) menyatakan ada 3 (tiga) dimensi dari literasi keuangan yaitu (1) keterampilan menghitung, (2) pemahaman tentang keuangan dasar, dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan. Sedangkan Willis, (2008) menyatakan bahwa pengetahuan dalam konteks literasi keuangan meliputi pengetahuan, edukasi, dan informasi mengenai keuangan dan sumbernya, perbankan, deposito, kredit, asuransi, dan pajak. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, di mana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Matewos et al., 2016). Keterampilan

keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (Oliver-Márquez et al., 2022).

2.2. Literasi Keuangan

Para peneliti belum menetapkan definisi dan pengukuran literasi keuangan yang konsisten, seperti yang terlihat dari berbagai pendekatan yang diambil untuk topik tersebut. Remund, (2010)memberikan definisi komprehensif tentang literasi keuangan sebagai kemampuan untuk mengelola uang pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang sesuai dan perencanaan keuangan jangka panjang yang baik mengingat peristiwa kehidupan dan pergeseran situasi ekonomi. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (2013) mendefinisikan literasi keuangan sebagai "pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan, serta keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan, untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan untuk memungkinkan partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Literasi keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh Huston (2010), adalah sejauh mana seorang individu mampu memperoleh, memproses, dan menggunakan pengetahuan tentang situasi keuangan sendiri. Lusardi & Mitchell, (2011) memberikan definisi terbatas literasi keuangan sebagai kapasitas untuk membuat penilaian yang baik mengenai akuisisi, penyimpanan, dan distribusi kekayaan. Literasi keuangan didefinisikan secara sempit oleh Kamakia et al., (2017) mengetahui konsep dan jargon keuangan dasar. Penelitian saat ini sesuai dengan definisi OECD tentang

(2013). Ini mengakui bahwa keadaan keuangan yang beragam membutuhkan berbagai tingkat dorongan dan keyakinan diri dari individu untuk secara efektif memanfaatkan pengetahuan keuangan dalam pengambilan keputusan. Peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat ditekankan sebanyak kesejahteraan finansial individu.

Menurut Remund (2010), kurangnya konsensus tentang bagaimana mendefinisikan literasi keuangan adalah hambatan utama untuk mengembangkan inisiatif pendidikan konsumen yang berguna dan efektif. Menurut Huston (2010), sulit untuk melakukan penilaian perbandingan atau mengevaluasi tingkat literasi keuangan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan finansial karena kurangnya konsepsi konstruk yang spesifik dan konsisten. Menurut koalisi Jumpstart National untuk literasi keuangan (2007), kapasitas untuk menggunakan informasi dan alat sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan finansial, dan bahwa literasi keuangan lebih dari sekadar pengetahuan atau informasi.

2.3. Inklusi Keuangan dan Pembangunan

Inklusi keuangan merupakan sebuah proses untuk mengukur seberapa dalam hubungan sebuah individu, rumah tangga, atau komunitas bisnis dalam mengakses layanan keuangan seperti kartu kredit, transaksi, pembayaran, tabungan dan asuransi (Cicchiello et al., 2021). Hal ini merupakan bentuk implementasi dari pemahaman finansial dalam mengelola keuangan serta memanfaatkan beberapa bentuk pelayanan keuangan untuk berpartisipasi menjadi roda penggerak perekonomian bahkan memberdayakan sebuah resistensi terhadap fenomena yang tidak dapat terukur (*chaos in order*).

Secara moneter problematika inklusi keuangan merupakan salah satu alat ukur yang sangat penting sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Shrestha & Nursamsu, 2021). Berdasarkan hal tersebut, salah satu faktor sebuah pembangunan merupakan dampak dari keterbukaan masyarakat serta aksesibilitas terhadap layanan keuangan. Hal ini diharapkan dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan keuangan dapat membuka lapangan pekerjaan, akses terhadap Pendidikan, akses terhadap kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cicchiello et al., (2021); Sambodo et al., (2017); Shrestha & Nursamsu, (2021) bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inklusi keuangan, bahwa dengan berkembangnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan dapat mendorong sebuah inklusi keuangan dan secara natural mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari hubungan korelasi antara inklusi keuangan dan indeks pembangunan manusia.

2.4. Kesejahteraan Finansial

Kesehatan finansial adalah gagasan abstrak yang digunakan untuk menjelaskan status keuangan individu atau keluarga, sebagaimana didefinisikan oleh (Mokhtar et al., 2015). Kesejahteraan finansial didefinisikan oleh PORTER & GARMAN, (1992) sebagai kombinasi dari sifat-sifat individu, fitur obyektif, kualitas yang dirasakan, dan aspek yang dinilai dari domain keuangan. Morris et al., (2022) memberikan definisi kesejahteraan finansial sebagai tingkat kepuasan individu terhadap situasi moneter pribadi mereka. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (2015) mendefinisikan kesehatan keuangan secara sempit sebagai kondisi untuk dapat memenuhi semua tanggung jawab keuangan seseorang saat ini dan

masa depan dengan cara yang menyisakan beberapa pendapatan untuk kesenangan hidup seseorang. Kesejahteraan finansial, seperti yang didefinisikan oleh Joo, (2008), adalah keadaan sehat, ceria, dan bebas dari stres tentang situasi keuangan seseorang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) di Amerika Serikat mendefinisikan sebuah kondisi kesejahteraan finansial adalah bagaimana seorang individu dalam merencanakan serta melakukan tindakan preventif terhadap segala kejadian atau fenomena yang terjadi di masa depan. Kesejahteraan finansial merupakan tingkat kepuasan sebuah individu terhadap keputusan keuangan yang dilakukan sehingga dapat memproyeksikan kondisi serta memperhitungkan tingkat pengeluaran bahkan dapat mengelola keuangan mereka menjadi suatu hal yang memiliki nilai tambah. Maka dari itu, program literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam meningkatkan stabilitas perekonomian individu atau rumah tangga.

2.5. Kerangka Pikir

Literasi keuangan merupakan tahapan awal dalam memperoleh inklusi keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan, *output* dari program literasi keuangan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan (*stakeholder*) yaitu bagaimana rumah tangga maupun individu memahami beberapa hal sebagai berikut: (1) Pengetahuan konsep keuangan, (2) Kemampuan dalam mengkomunikasikan konsep keuangan, (3) Kecakapan mengelola keuangan pribadi, (4) Keterampilan mengambil keputusan keuangan yang tepat, (5) Keyakinan dalam merencanakan dan memproyeksikan kebutuhan di masa yang akan datang.

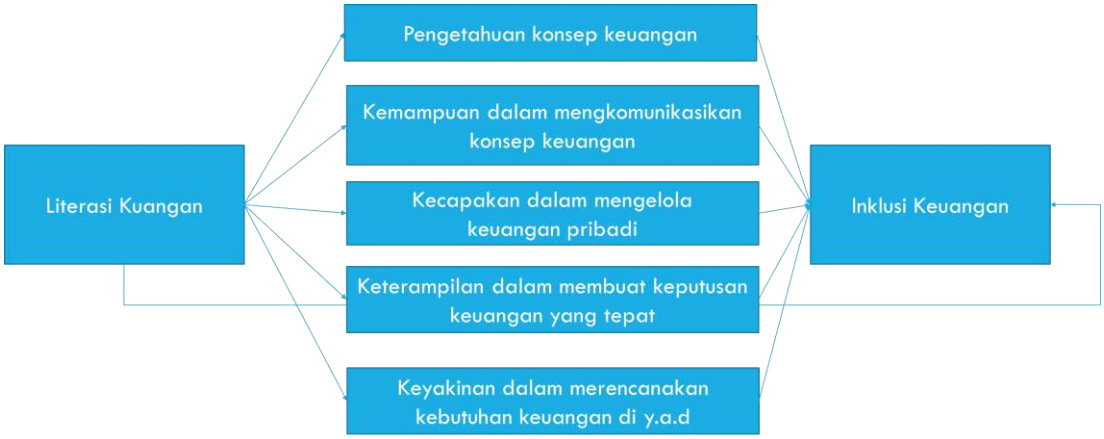

Gambar 2. 1. Kerangka Pikir Literasi dan Inklusi Keuangan Kabupaten Bantul 2023

Keberhasilan pengelolaan wawasan dan pengetahuan keuangan diharapkan dapat menjadi kunci utama perkembangan inklusi keuangan, dimana dengan memahami konsep dasar pengelolaan keuangan dapat mengembangkan serta memberikan *insight* atau inovasi yang dapat memperluas lapangan pekerjaan, menurunkan diskriminasi *gender*, memudahkan mengakses layanan pendidikan, kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pemahaman Umum Program SNLKI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam programnya melakukan penyesuaian regulasi yang mengatur mengenai percepatan atau upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan rancangan *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mendefinisikan literasi keuangan merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami konsep serta risiko keuangan dalam mengimplementasikan keputusan keuangan yang efektif dan efisien dengan tujuan kesejahteraan rumah tangga maupun individu.

Tren terkini di bidang sektor dan jasa keuangan semakin menegaskan pentingnya literasi keuangan karena kurangnya pengetahuan keuangan akan mengarahkan pada pilihan dan keputusan keuangan yang buruk yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konsekuensi keuangan dan kondisi perekonomian yang tidak diinginkan (Refera, et al, 2016). Miller et al (2009) menyebutkan bahwa literasi keuangan menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Konsumen dengan pengetahuan dan keterampilan keuangan tersebut akan memilih produk dan jasa keuangan sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan akan merangsang aktivitas ekonomi yang selanjutnya dapat membantu perkembangan ekonomi nasional.

Shankari, et al (2014) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat yang tinggi dapat mendorong persaingan antar Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk lebih berinovasi dan meningkatkan efisiensi produk dan layanan jasa keuangan. Hal tersebut menjadi suatu kontribusi pada pengembangan sistem keuangan dan keberlanjutan ekonomi. Shankari, et al juga menambahkan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengaturan sistem keuangan, karena literasi keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen yang pada akhirnya dapat mengurangi fraud dan kegagalan pasar keuangan. Masok (2011) menunjukkan bahwa literasi keuangan menjadikan konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan serta semakin aware terhadap ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

3.1.1. Literasi Keuangan Indonesia

Secara umum, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang *well literate* dari tahun ke tahun. *Well literate* merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

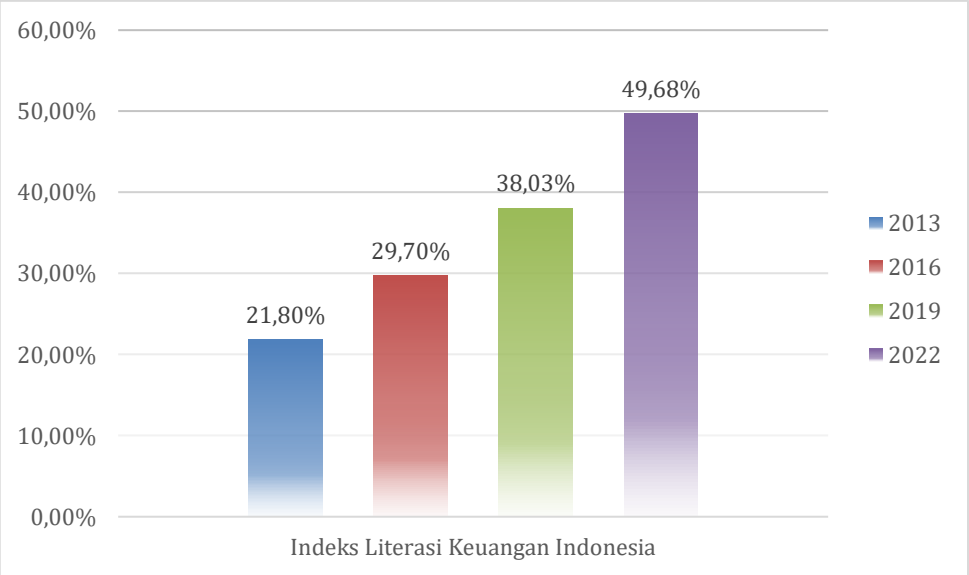

Gambar 3. 1. Indeks Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2013, 2016, 2019, dan 2022
(Sumber: SNLKI 2021 – 2025, OJK 2022)

Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari survei sebelumnya yakni 29,7% di tahun 2016 dan 21,8% di tahun 2013. Meskipun menunjukkan peningkatan, di sisi lain data ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang belum well literate. Bila merujuk pada data indeks literasi keuangan tahun 2019 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk, terdapat sekitar 62 orang yang belum memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal.

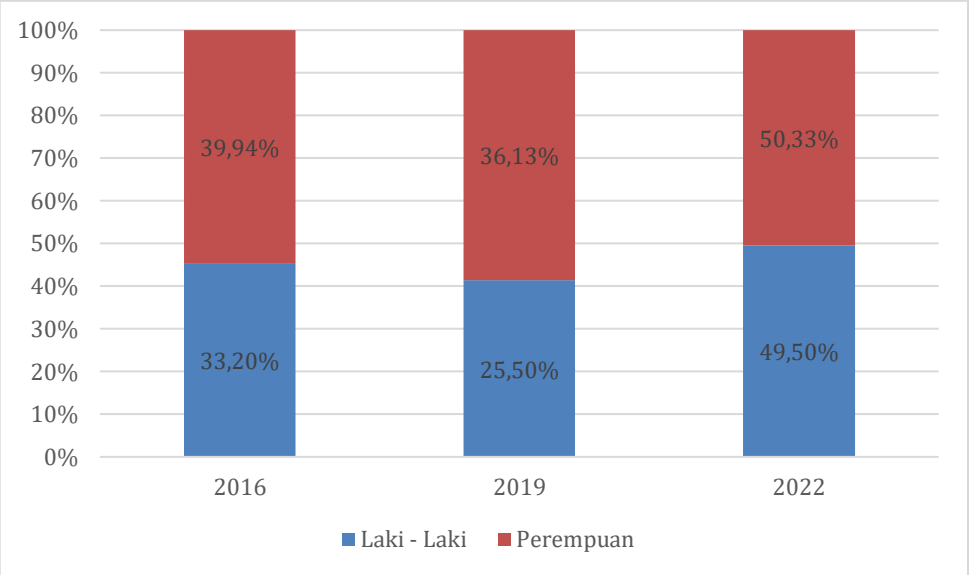

Gambar 3. 2. Literasi Keuangan Indonesia Berdasarkan Gender Tahun 2016 ,2019, dan 2022
(Sumber: SNLKI 2021 – 2025, OJK 2022.)

Apabila ditinjau dari klasifikasi profil responden, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, misalnya dari segi gender/jenis kelamin terdapat peningkatan indeks literasi keuangan laki-laki dari 33,2% (2016) menjadi 39,94% (2019), begitu pula perempuan dari 25,5% (2016) menjadi 36,13% (2019). Hasil ini juga menunjukkan bahwa di tahun 2019, gap tingkat literasi antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil dengan selisih sebesar 3,81% dibanding tahun 2016 sebesar 7,70%. Meskipun demikian, masih terdapat ruang peningkatan bagi indeks literasi keuangan perempuan mengingat berdasarkan Sensus Penduduk 2020, populasi perempuan di Indonesia sebesar 49,42% hampir mendekati populasi laki-laki yakni 50,58%.

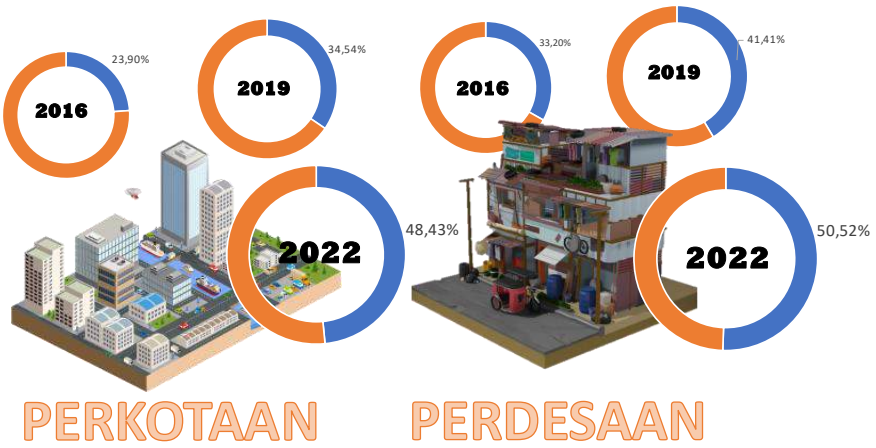

Gambar 3. 3. Literasi Keuangan Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia pada Tahun 2016 dan 2019 (Sumber: SNLKI 2021 – 2025/, OJK 2022)

Pada SNLIK tahun 2019, pengukuran indeks literasi keuangan dilakukan berdasarkan strata wilayah perdesaan dan perkotaan. Di setiap provinsi dipilih masing-masing 1 (satu) kota untuk merepresentasikan perkotaan dan 1 (satu) kabupaten untuk merepresentasikan wilayah perdesaan (kecuali provinsi DKI Jakarta). Hasilnya, indeks literasi keuangan berdasarkan strata wilayah perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2019, namun indeks literasi keuangan perdesaan tahun 2019 berada di bawah indeks literasi nasional (38,03%). Pada 2022 indeks literasi keuangan di kawasan perkotaan dan pedesaan semakin meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya, dapat diasumsikan pemangku kebijakan (*stakeholder*) bergerak cepat dalam upaya literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

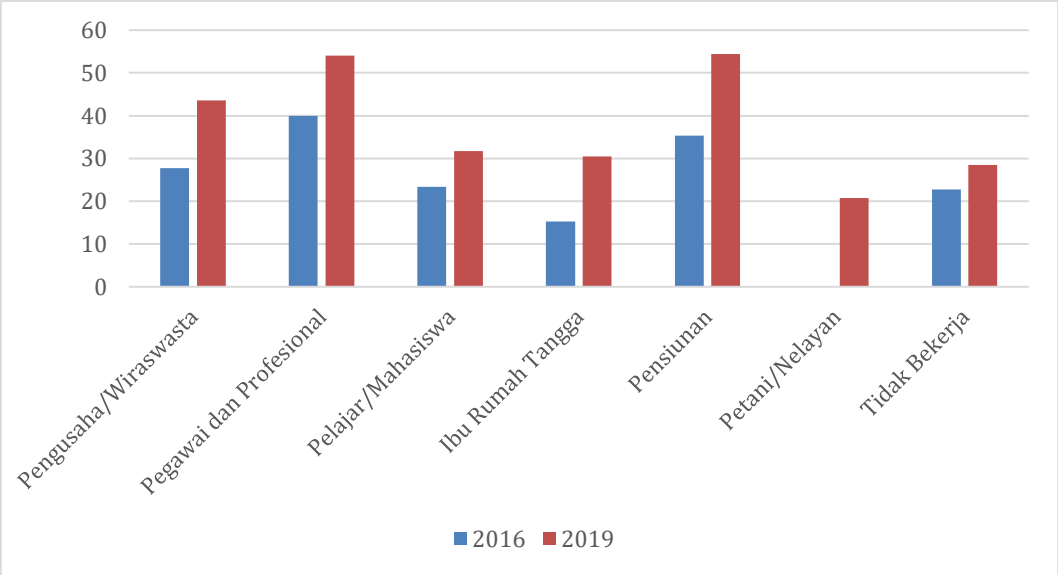

Gambar 3. 4. Literasi Keuangan Berdasarkan Status Pekerjaan Indonesia Tahun 2016 dan 2019
(Sumber: SNLKI 2021 – 2025, OJK 2019.)

Untuk memetakan tingkat literasi keuangan berdasarkan tingkat pekerjaan, dilakukan perhitungan persentase literasi keuangan yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah responden well literate dengan jumlah total responden untuk setiap jenis pekerjaan. Hasilnya menunjukkan peningkatan persentase literasi keuangan untuk seluruh klasifikasi jenis pekerjaan dari tahun 2016 ke 2019, dimana peningkatan tertinggi terdapat pada pensiunan (meningkat 19,16%) dan peningkatan terendah terjadi pada klasifikasi tidak bekerja (meningkat 5,68%). Adapun klasifikasi petani/nelayan belum dilakukan perhitungan pada SNLIK tahun 2016.

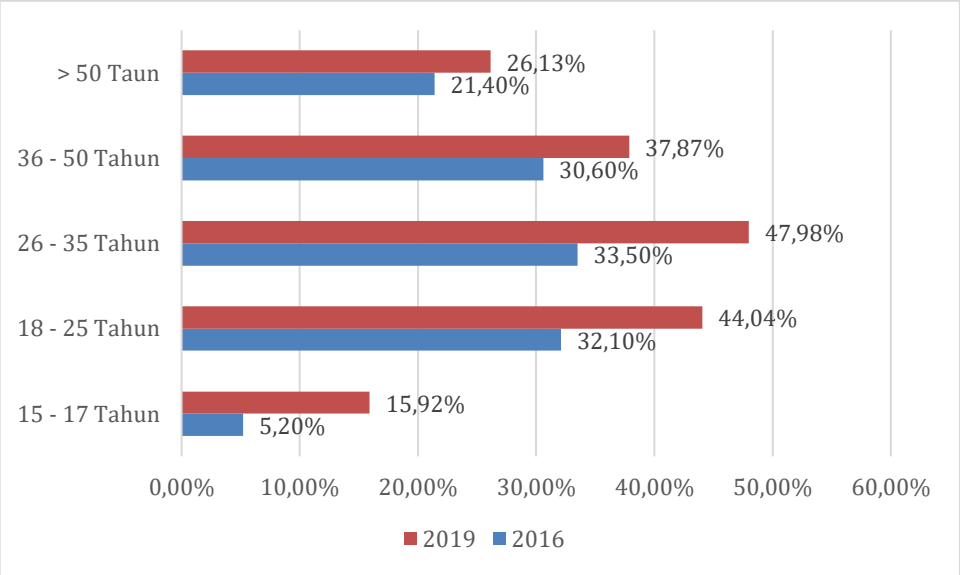

Gambar 3. 5. Literasi Keuangan Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia

(Sumber: SNLKI 2021 – 2025, OJK 2019.)

Persentase literasi keuangan berdasarkan klasifikasi usia pada SNLIK tahun 2019 menunjukkan pola yang sama dengan SNLIK tahun 2016, dimana kelompok usia 26 – 35 tahun memiliki persentase literasi keuangan tertinggi dari kelompok usia lainnya, diikuti dengan kelompok usia 18 – 25 tahun, 36 – 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Kelompok usia 15 – 17 tahun memiliki persentase literasi keuangan paling rendah pada SNLIK tahun 2016 dan SNLIK tahun 2019.

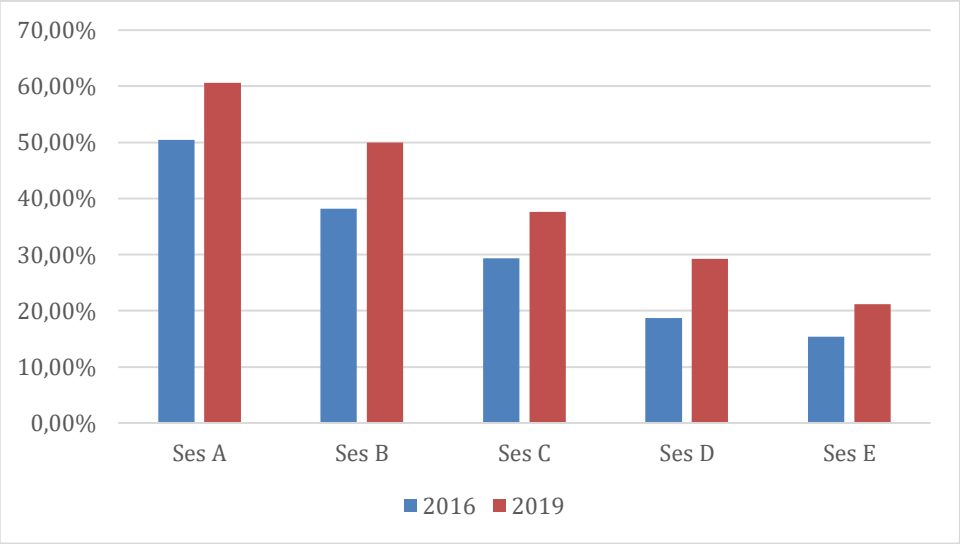

Gambar 3. 6. Tingkat Literasi Keuangan Indonesia Berdasarkan Status Sosial

Sumber: SNLKI 2021 – 2025 , OJK 2019

.

Berdasarkan *Socio-Economic* Status/Status Ekonomi Sosial (SES), responden diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelompok yakni SES A, B, C, D, dan E. Adapun deskripsi dari kelima kelompok ini sebagai berikut:

1. **SES A :** Pengeluaran per bulan di atas Rp3.500.000,-
2. **SES B :** Pengeluaran per bulan antara Rp2.500.000,- s.d. Rp3.500.000,-
3. **SES C :** Pengeluaran per bulan antara Rp1.500.000,- s.d. Rp2.499.999,-
4. **SES D :** Pengeluaran per bulan antara Rp500.000,- s.d. Rp1.499.999,-
5. **SES E :** Pengeluaran per bulan di bawah Rp500.000,-

Dari Grafik terlihat bahwa semakin tinggi SES maka semakin tinggi pula persentase literasi keuangannya.

3.1.2. Inklusi Keuangan Indonesia

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal.

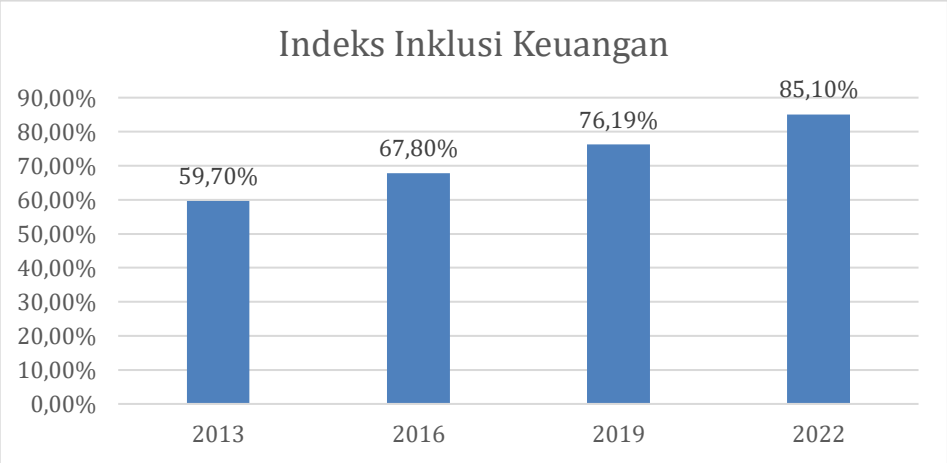

Gambar 3. 7. Indeks Inklusi Keuangan Indonesia Tahun 2013, 2016, 2019, dan 2022
(Sumber: SNLKI 2021 – 2025, OJK 2022.)

Selain mengukur kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia, OJK juga melakukan pengukuran pada kondisi inklusi keuangan melalui SNLIK sejak tahun 2013 hingga 2019. Parameter penentu indeks inklusi keuangan adalah penggunaan produk dalam 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan data, terjadi peningkatan indeks inklusi keuangan dari tahun ke tahun. Indeks inklusi keuangan tahun 2019 sebesar 76,19% artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 76 orang yang inklusif atau mempunyai akses terhadap layanan jasa keuangan. Pada tahun 2022 indeks inklusi semakin meningkat sebesar 85,10%.

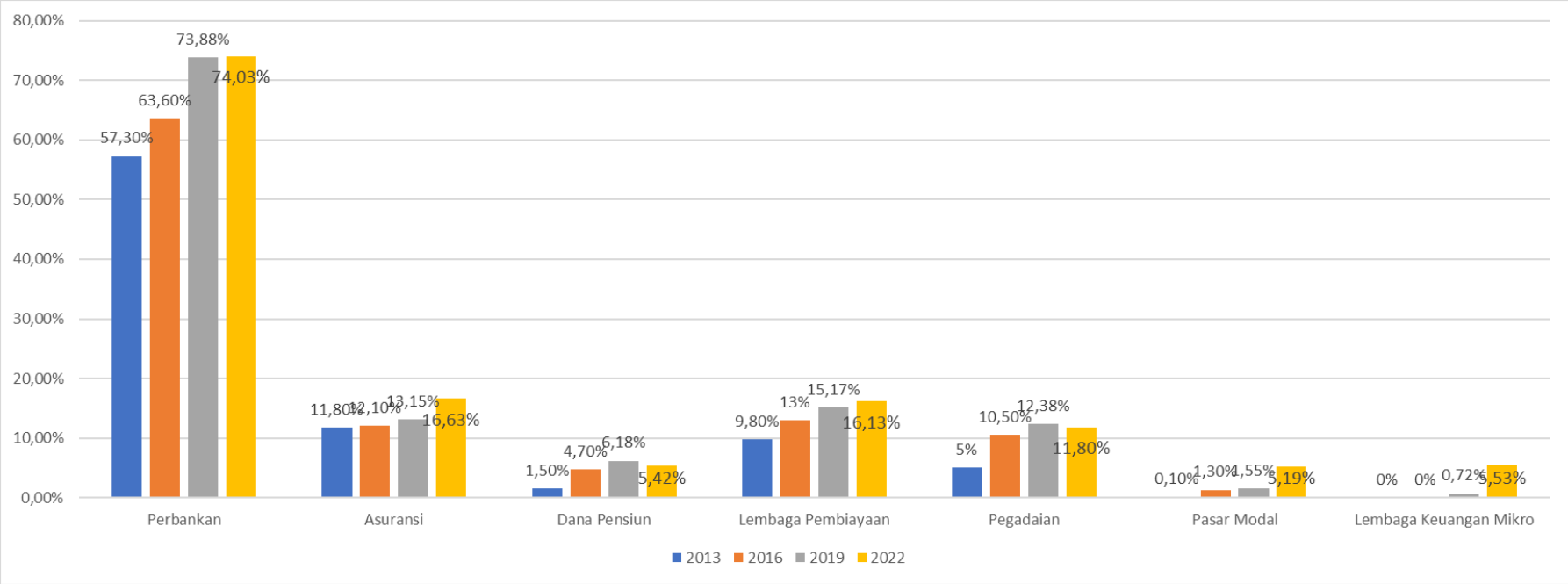

Gambar 3. 8. Inklusi Keuangan Indonesia Berdasarkan Akses Layanan Keuangan
(Sumber: SNLKI 2021 – 2025, OJK 2022.)

Hasil indeks inklusi keuangan tahun 2019 melampaui target pemerintah yang dicanangkan pada Perpres Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimana target indeks inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2022.

3.2. Gambaran Umum Wilayah

Suatu wilayah dapat dijadikan sebuah *benchmark* atau parameter dalam melaksanakan sebuah kajian, sebelum melakukan analisis lebih dalam akan lebih baik dengan memperhatikan gambaran suatu wilayah secara umum sehingga, dapat diobservasi antara karakteristik kewilayahannya dan karakteristik sistem pemerintahan, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian. Berikut gambaran kewilayahan administrasi Kabupaten Bantul.

Gambar 3. 9. Peta Wilayah Kabupaten Bantul

3.2.1. Potensi Wilayah

Pada sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum tidak lepas dari sektor pariwisata yang terus melejit di wilayah DIY. Kabupaten Bantul memiliki perpaduan antara dunia modern dan budaya tradisional sehingga banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri yang berkunjung di Kabupaten Bantul. Selama 2020, tercatat

1.726.875 orang wisatawan yang telah mengunjungi 7 objek wisata di Kabupaten Bantul. Sedangkan hotel yang ada di Kabupaten Bantul di tahun 2020 sebanyak 387. Kabupaten Bantul memiliki daya tarik yang dapat memikat para wisatawan dengan tempat wisatanya yang sangat beragam dan juga keramahan masyarakat Bantul. Wisata alam di Kabupaten Bantul yang sangat dikenal oleh para wisatawan yaitu Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo dengan keunikannya terdapat gumuk pasir, Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo. Pantai Depok juga memiliki landasan pacu untuk pesawat berukuran kecil dengan kondisi angin dan bentang alam yang ada sangat cocok untuk olahraga kedirgantaraan. *Jogja Air Show* merupakan acara tahunan yang diadakan di landasan pacu Pantai Depok. Faktor alam di Kecamatan Dlingo khususnya Desa Mangunan sering menjadi tempat berfoto yang terkenal, juga terdapat wisata budaya dan pendidikan di kawasan Kasongan, Tembi, Wukirsari, Jagalan dan lain-lain.

3.2.2. Demografi

Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.013.170 jiwa pada tahun 2022 yang tinggal di 373,893 rumah tangga (BPS Bantul, 2022). Kepala rumah tangga di Bantul mayoritas adalah laki-laki (85%) dan cukup sedikit yang dikepalai oleh perempuan (15%) (Gambar 4.10). 80% kepala rumah tangga berstatus menikah dan 20% lainnya tidak menikah, belum menikah atau sudah bercerai (Gambar 4.11).

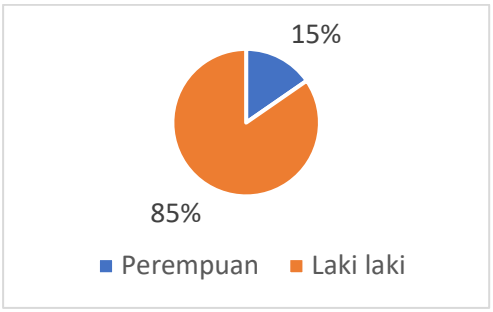

Gambar 3. 10. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Kab Bantul

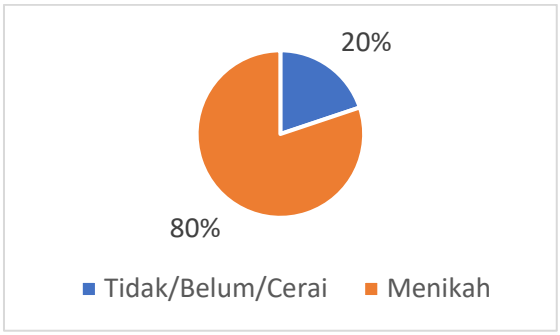

Gambar 3. 11. Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga Kab Bantul

(Sumber: Susenas, 2022.)

Sebagian besar kepala rumah tangga di Bantul menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dengan persentase mencapai 32,4%. Angka tersebut diikuti oleh kepala rumah tangga yang lulus hanya di Sekolah Dasar (19%), Sekolah Menengah Pertama (17%), dan Tidak sekolah (15%). Terdapat sekitar 15% kepala rumah tangga yang menempuh pendidikan di atas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (Gambar 4.12).

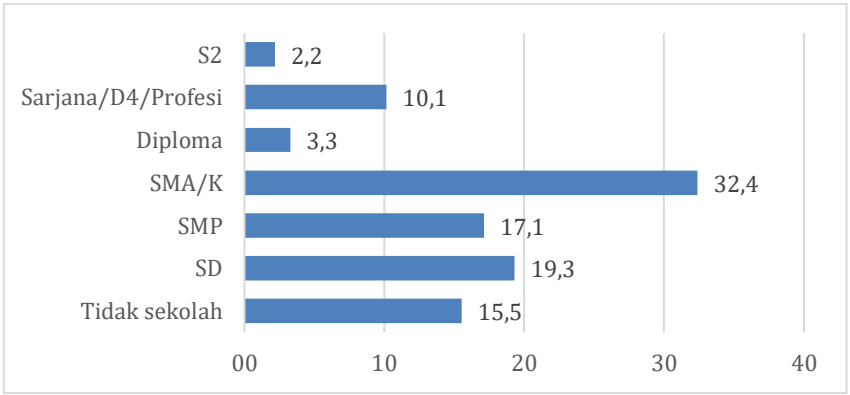

Gambar 3. 12. Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Kab Bantul

Sumber: SUSENAS, 2022

Berdasarkan status pekerjaan, hampir separuh kepala rumah tangga bekerja sebagai Karyawan/Pegawai dengan persentase sebesar

46,2%. Sementara itu, sebanyak 25,8% memiliki usaha sendiri, 12,8% kepala rumah tangga bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap dan hanya sedikit yang dibantu buruh tetap sebesar 4,3%. Lainnya, 1,9% kepala rumah tangga di Bantul merupakan pekerja keluarga.

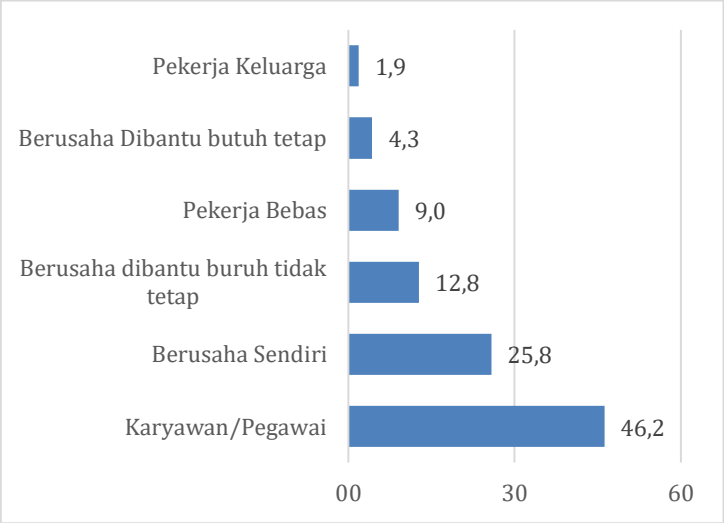

Gambar 3. 13. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Kab Bantul
Sumber: SUSENAS, 2022

3.2.3. Kondisi Perekonomian

Gambaran mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Bantul dapat digunakan sebagai pengukuran secara makro apakah laju pertumbuhan ekonomi dan sistem pengalokasian anggaran APBD dapat mengontrol atau menggambarkan *behavior* atau kondisi literasi dan inklusi keuangan. Hal ini berguna sebagai *benchmark* atau sebagai parameter kebijakan jika melihat dari *scope* luas.

Berdasarkan sumber penggunaan dananya secara spesifik di Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan pinjaman di beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cenderung melakukan konsumsi ketimbang sebagai modal kerja dan investasi. Seluruh, peminjaman

dana meningkat dari tahun ke tahun secara linier, sehingga dapat diasumsikan bahwa fungsi kredit semakin meningkat berdasarkan faktor secara *demand* atau ekspansi maupun sejalan dengan arah perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data peminjaman di Bank Umum/konvensional dapat diperhatikan aliran dananya lebih tinggi dalam mengakomodasi modal kerja dan bergerak secara linier untuk investasi, sementara untuk fungsi konsumsi menurun pada tahun 2023 yang mengindikasikan adanya ekspansi usaha.

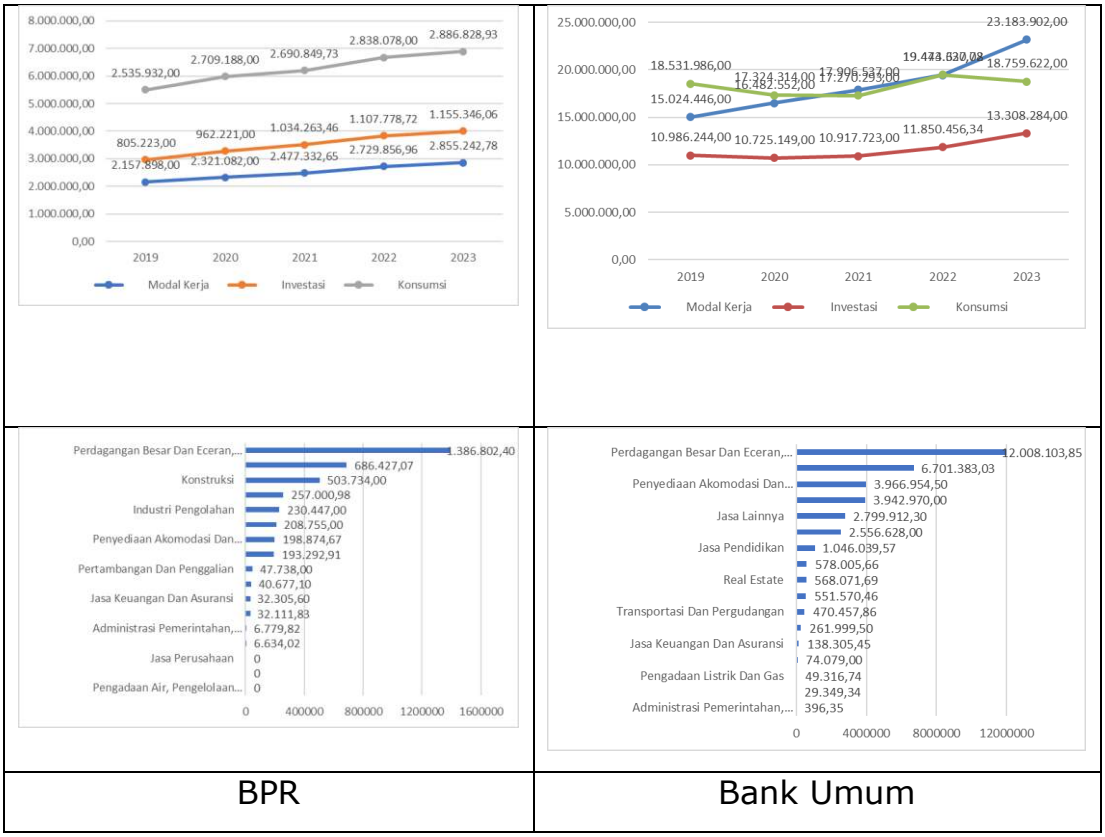

BPR	Bank Umum

Gambar 3. 14. Manfaat Peminjaman Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sumber: Bank Indonesia, 2022.)

Berdasarkan jenis usahanya dari keduanya dari jenis pinjaman di dominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya

pada pinjaman BPR lebih banyak sektor yang melakukan peminjaman pada sektor konstruksi, industri pengolahan, penyediaan makanan dan akomodasi, dan lain – lain, yang dapat disimpulkan bahwa rata – rata yang meminjam di BPR merupakan dalam bentuk usaha. Menurut bentuk pinjaman kredit umum, lebih banyak di sektor penyediaan akomodasi dan minum, jasa lainnya, jasa Pendidikan, dan lain – lain.

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Tabel 3. 1. PDRB ADHK Kabupaten Bantul

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.09	13.60	13.78
B. Pertambangan dan Penggalian	0.46	0.42	0.41
C. Industri Pengolahan	14.84	14.50	14.16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.14	0.13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.08	0.08
F. Konstruksi	8.50	9.00	8.82
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.47	8.18	8.29
H. Transportasi dan Pergudangan	4.46	4.44	4.89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.74	11.12	11.97
J. Informasi dan Komunikasi	8.73	9.66	9.27
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.88	2.88	3.01
L. Real Estate	6.91	6.57	6.30

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
M,N. Jasa Perusahaan	0.43	0.43	0.44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.73	7.41	7.13
P. Jasa Pendidikan	7.40	7.32	6.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.29	2.28	2.23
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.86	1.97	2.13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (juta rupiah) pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Sedangkan, pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan dampak dari adanya pandemi *COVID*-19 yang menyebabkan pendapatan masyarakat Kabupaten Bantul mengalami penurunan.

Jika dilihat secara sekilas salah satu peningkatan ekonomi yang sangat terlihat sudah mulai di Kabupaten Bantul, yakni dengan adanya fenomena literasi dan inklusi keuangan. Kawasan ini merupakan kawasan yang strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa

ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD;
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD;
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya mengamanatkan bahwa:
    a. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaanya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi;
    b. Pendidikan dan pelatihan untuk ASN sebesar 0,16% dari total belanja;
    c. Pemerintah Daerah Kabupaten dengan APBD lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan paling sedikit sebesar 0,050% (nol koma nol lima puluh persen) dari total belanja daerah.

Tabel 3. 2. Realisasi APBD Kabupaten Bantul 2022

Uraian	Reff	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	234.088.495.863,00	252.857.438.493,70	1 08,02	203.758.210.969,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	49.689.640.820,00	42.178.624.886,07	8 4,88	27.767.869.814,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	23.707.166.955,00	20.839.915.416,20	8 7,91	20.053.289.569,97
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	213.368.704.758,00	224.696.444.576,83	1 05,31	240.091.353.675,13
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		**520.854.008.396,00**	**540.572.423.372,80**	**1 03,79**	**491.670.724.028,10**
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	30.626.145.000,00	36.764.154.907,00	1 20,04	43.031.166.560,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.2.4	903.288.932.566,00	902.030.732.566,00	9 9,86	911.168.107.000,00
Dana Alokasi khusus - Fisik	5.1.1.2.2.5	99.798.175.000,00	77.408.558.243,00	7 7,57	73.224.278.336,00
Dana Alokasi khusus - Non Fisik	5.1.1.2.2.6	292.341.227.924,00	293.233.816.065,00	1 00,31	227.088.317.653,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		**1.326.054.480.490,00**	**1.309.437.261.781,00**	**9 8,75**	**1.254.511.869.549,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				

Uraian	Reff	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	58.566.684.000,00	58.566.684.000,00	-	30.323.619.000,00
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00		0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00		0,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	101.247.697.000,00	101.247.697.000,00	1 00,00	109.399.072.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**159.814.381.000,00**	**159.814.381.000,00**	**1 00,00**	**139.722.691.000,00**
Pendapatan Transfer - Antar Daerah	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	163.913.899.237,00	192.023.344.227,00	117,15	163.305.276.389,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	53.186.154.650,00	50.762.747.595,00	95,44	98.621.767.320,00
Jumlah Pendapatan Transfer - Antar Daerah		**217.100.053.887,00**	**242.786.091.822,00**	**1 11,83**	**261.927.043.709,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**1.702.968.915.377,00**	**1.712.037.734.603,00**	**310,58**	**1.656.161.604.258,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**5.1.1.3**				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	6.000.000.000,00	6 .725.000.000,00	112,08	6.167.255.751,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.1.1	-	-		
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1.2	-	1 .242.281.219,74		81.656.117.318,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		**6.000.000.000,00**	**7.967.281.219,74**	**1 32,79**	**87.823.373.069,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**2.229.822.923.773,00**	**2.260.577.439.195,54**	**1 01,38**	**2.235.655.701.355,10**

Uraian	Reff	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
BELANJA	**5.1.2**				
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	933.917.754.140,00	853.342.373.348,00	9 1,37	894.085.181.553,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	820.744.294.402,00	768.495.409.619,24	9 3,63	713.169.222.812,58
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00		0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4.	0,00	0,00		0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	70.258.891.858,00	91.629.103.963,08	1 30,42	60.212.342.500,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	8.334.541.855,00	8.110.400.000,00	9 7,31	2.990.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.7	0,00	0,00		0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**1.833.255.482.255,00**	**1.721.577.286.930,32**	**9 3,91**	**1.670.457.246.865,58**
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**				
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	18.905.634.040,00	8.247.988.540,00	4 3,63	38.174.497.613,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	71.125.955.338,00	70.206.003.149,45	9 8,71	70.145.840.914,94
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	56.709.358.999,00	37.780.797.101,00	6 6,62	43.667.937.716,16
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	113.504.484.127,00	98.155.322.270,36	8 6,48	110.699.132.699,26
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	12.989.725.525,00	7.308.308.697,00	5 6,26	11.464.691.597,00
Belanja Aset lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00		42.546.454,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**273.235.158.029,00**	**221.698.419.757,81**	**8 1,14**	**274.194.646.994,36**
BELANJA TAK TERDUGA	**5.1.2.3**				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	36.672.164.883,00	19.683.697.169,00	5 3,67	26.690.978.644,00

Uraian	Reff	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		**36.672.164.883,00**	**19.683.697.169,00**	**5 3,67**	**26.690.978.644,00**
TRANSFER	**5.1.3**				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.1				
Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	22.191.229.940,00	22.191.229.940,00	1 00,00	22.191.229.940,00
Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.1.2	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00	1 00,00	3.912.168.310,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		**26.103.398.250,00**	**26.103.398.250,00**	1 00,00	**26.103.398.250,00**
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.2				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	99.707.090,00	99.707.090,00	1 00,00	92.316.840,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	94.047.000.000,00	94.047.000.000,00	1 00,00	97.047.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	190.089.079.000,00	189.265.079.000,00	9 9,72	132.002.680.001,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		**284.235.786.090,00**	**283.411.786.090,00**	**9 9,71**	**229.141.996.841,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**2.453.501.989.507,00**	**2.272.474.588.197,13**	**9 2,62**	**2.226.588.267.594,94**
SURPLUS / (DEFISIT)		**-23.679.065.734,00**	**-11.897.149.001,59**	**5,32**	**9.067.433.760,16**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.4**				

Uraian	Reff	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Penggunaan SiLPA	**5.1.4.1**	240.503.861.658,00	240.503.861.658,33	1 00,00	238.201.393.766,17
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.1	0,00	0,00	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.4.1.2	14.675.204.076,00	18.362.654.076,00	1 25,13	3.746.925.000,00
Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.3	0,00	0,00		0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.1.4.1.4	0,00	0,00		0,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.1.4.1.5	0,00	0,00		
Penerimaan kembali Investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.1.6	11.000.000.000,00	162.499.000,00	1,48	2.629.109.132,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**266.179.065.734,00**	**259.029.014.734,33**	**9 7,31**	**244.577.427.898,17**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.2**				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00	-	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00	1 00,00	12.341.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.4.2.3	0,00	0,00	-	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	0,00	0,00	-	0,00
Pengeluaran Investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.2.5	11.000.000.000,00	0,00	-	800.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**42.500.000.000,00**	**31.500.000.000,00**	**7 4,12**	**13.141.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO		**223.679.065.734,00**	**227.529.014.734,33**	**1 01,72**	**231.436.427.898,17**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**-**	**215.631.865.732,74**		**240.503.861.658,33**

Sumber: APBD Kabupaten Bantul, 2023

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dana transfer terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah. Pendapatan daerah tahun 2022 yang bersumber dana DAK Fisik belum diperhitungkan, selain itu untuk dana Transfer Antar Daerah baru memasukkan sumber Dana Keistimewaan sesuai dengan Berita Acara yaitu sebesar Rp29.706.340.000,00. PAD pada tahun 2022 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak pandemi Covid-19. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk meningkatkan PAD melalui:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
    a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
    b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
    c. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
    d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;

3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

3.3. Strategi Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data sebagai pengukuran indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang telah disahkan oleh OECD/INFE, dimana pada survey ini sampel yang mewakili populasi harus berusia antara 18 hingga 79 tahun. Pengambilan data dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung (*face to face*) atau bahkan menggunakan pesawat telepon sebagai media interview. Jika wilayahnya cukup dalam wawasannya mengenai literasi dan inklusi keuangan berdasarkan indeks masing – masing wilayah dapat menggunakan *questionnaire*. Untuk hitungan survey negara, minimum sampel yang diambil minimal adalah 1.000 responden untuk mencapai *confidence error term* sebesar 95% namun dikarenakan wilayah yang diteliti cakupannya kecil lebih tepatnya Kabupaten Bantul, sebanyak 500 menggunakan *tools* Kobotoolbox dapat merepresentasikan *behavior* maupun perilaku individu mengenai kedalaman wawasan keuangan.

3.3.1. Survei Instansional

Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait.Data yang dikumpulkan menyangkut wilayah perencanaan dari berbagai aspek dalam lingkup internal maupun eksternal. Data dapat berupa peta grafik, data teks dan numerik, data teknis engineering, kebijaksanaan dan peraturan. Disamping pengumpulan data, pada kegiatan ini dilakukan pula wawancara atau diskusi dengan pihak instansi mengenai permasalahan-permasalahan di tiap bidang/aspek yang menjadi kewenangannya serta menyerap informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan program yang sedang dan akan dilakukan. Sumber data adalah berbagai instansi, baik departemental maupun pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan serta badan/instansi non pemerintah (LSM, Swasta/ pelaku pasar, Perguruan Tinggi).

3.3.2. Survei Primer

Survei ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/terkini langsung dari lapangan atau objek kajian. Terdapat 2 tipe survei yang akan dilakukan dalam penyusunan kajian strategi literasi inklusi keuangan, yaitu:

1. Observasi Lapangan

   Observasi lapangan dilakukan dengan cara mensurvei masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait mengenai kondisi literasi keuangan menggunakan seperangkat kuesioner yang telah disusun.
2. *Focus Group Discussion* (FGD)

   Bertujuan untuk menjaring berbagai pemikiran dan respon literasi keuangan dari berbagai pihak baik pemerintah

kabupaten, lembaga riset/perguruan tinggi, pelaku bisnis, dan stakeholder lainnya.

3.3.3. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan ini akan digali teori-teori yang berkembang dan terkait dengan pekerjaan Penyusunan kajian strategi literasi inklusi keuangan, hasil studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan dan materi pekerjaan, serta metode-metode dan teknik penelitian yang pernah digunakan. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan terhadap data yang telah ada. Melalui studi kepustakaan ini akan digali teori-teori yang telah berkembang yang berkaitan dengan pekerjaan penyusunan kajian strategi literasi inklusi keuangan, hasil studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan dan materi pekerjaan, serta metode-metode dan teknik penelitian yang pernah digunakan. Data serta informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui buku teks, laporan laporan studi, makalah, jurnal dan bulletin.

3.4. Metode Analisis

Perumusan sebuah kesimpulan dari data yang telah dihimpun dapat disajikan dalam beberapa penerapan model. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur data menjadi suatu informasi yang dapat direspon dan dipahami oleh pemangku kebijakan. Berdasarkan perilaku sebuah data terdapat beberapa pendekatan yang digunakan sesuai dengan keluaran yang sesuai dengan tujuan dan manfaat kajian. Hal ini sebagai alat bantu dalam mempermudah proses penyajian sebuah data sehingga dapat disusun menjadi sebuah alur kebijakan yang baik.

3.4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan Ghozali (2021), statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data secara komprehensif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah tersaji sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Gambaran umum kondisi perekonomian rumah tangga di Wilayah Kabupaten Bantul dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif juga dilakukan untuk menilai tingkat perekonomian rumah tangga di ketiga wilayah tersebut. Analisis statistik deskriptif dilakukan menggunakan data hasil survei yang telah dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder. Data tersebut dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif yang meliputi analisis frekuensi, rata – rata, hingga persentase.

Analisis statistik deskriptif juga dilakukan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga, kondisi perekonomian, serta variabel – variabel utama lainnya. Hasil analisis statistik deskriptif diharapkan dapat membantu memahami kondisi perekonomian rumah tangga berdasarkan visualisasi data yang dilakukan. Hasil analisis akan dipresentasikan ke dalam berbagai bentuk baik *pie chart*, *bar chart*, *histogram*, dan *likert scale*.

3.4.2. Metode Menghitung Literasi dan Finansial Keuangan

Pada kajian ini membahas lebih dalam mengenai literasi, inklusi, dan literasi digital keuangan sebagai *benchmark* masyarakat Kabupaten Bantul mengenai wawasan, pengetahuan, pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan rumah tangga maupun individu sesuai dengan *toolkit* dari *international Network on Financial Education* (OECD/INFE). Pengukuran literasi finansial perlu memperhatikan

skor hasil observasi pengetahuan finansial, perilaku finansial, dan sikap mengenai keuangan, lalu berdasarkan ketiga kriteria tersebut dapat diperoleh jumlah skor dengan rentang antara 0 – 20 atau dapat menormalisasi angkanya dengan angka pengali 100/20.

Pengukuran indikator inklusi keuangan Merujuk pada Global Financial Inclusion Index, indikator inklusi keuangan adalah jumlah kepemilikan rekening per populasi, jumlah penggunaan rekening untuk menabung, melakukan transaksi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kegiatan bertransaksi di sini mencakup menarik uang, transfer, dan pinjaman dana. Selain itu, untuk mengukur Saat ini kemampuan literasi keuangan digital bukan sekadar kebutuhan, melainkan juga telah menjadi *lifestyle* di era Revolusi Industri 4.0. Pembatasan pergerakan manusia di saat terjadinya pandemi Covid-19 ini menyebabkan transaksi digital makin diminati dan dibutuhkan. Hadirnya layanan jasa keuangan secara digital membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengakses layanan keuangan tanpa perlu datang secara fisik ke kantor lembaga jasa keuangan. Dalam mengukur literasi keuangan digital penyelia memberikan pertanyaan pada kuesioner dengan memasukan aspek pengetahuan, perilaku, dan sikap mengenai digital keuangan. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut dapat diperoleh jumlah skor dengan rentang antara 0 – 10 atau dapat menormalisasi angkanya dengan angka pengali 100/10.

3.4.3. Propensity Score Matching

Guna melakukan estimasi yang tepat, skema evaluasi dampak diaplikasikan dengan cara membagi observasi penelitian menjadi dua kelompok yaitu kelompok treatment dan kelompok kontrol. Kelompok *treatment* merupakan kelompok yang mendapatkan perlakuan khusus atau dalam penelitian ini adalah kelompok rumah

tangga yang mendapatkan program PKH. Sementara itu, kelompok *control* merupakan kelompok yang tidak mendapatkan program PKH. Kedua kelompok tersebut dibandingkan pada *outcome* kesejahteraan rumah tangga (konsumsi dan pendapatan rumah tangga). Diasumsikan variabel *outcome* adalah fungsi linier dari vektor variabel eksogen X_i dan partisipasi program PKH_i, maka persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \beta X_i + \delta JPS_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

Dimana Y_i adalah variabel *outcome* (konsumsi dan pendapatan rumah tangga); PKH_i merupakan status partisipasi rumah tangga pada program PKH; β dan δ adalah parameter estimasi, dan ε_i adalah error. Namun, partisipasi rumah tangga pada program PKH umumnya sudah ditentukan oleh pemerintah bukan bersifat acak sehingga estimasi *ordinary least square* (OLS) akan menghasilkan estimasi yang bias. Oleh karena itu, diperlukan model lainnya yang dapat mengakomodir masalah tersebut. Model *endogenous switching regression* (ESR) dan *propensity score matching* (PSM) digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan estimasi yang konsisten dan tidak bias. Model ESR mampu menyelesaikan masalah endogenitas pada partisipasi program dengan cara menghitung sumber bias dari sampel yang terobservasi dan yang tidak terobservasi. Sementara itu, PSM dapat mengontrol bias seleksi melalui pengendalian faktor yang mempengaruhi partisipasi program PKH. Kedua model tersebut akan diaplikasikan dalam analisis kajian ini untuk mendapatkan hasil estimasi yang lebih komprehensif.

Pada kerangka model ESR, dampak program PKH terhadap kesejahteraan rumah tangga diestimasi pada dua tahap. Tahap pertama fokus pada keputusan/faktor rumah tangga mendapatkan

program PKH (Persamaan 2). Tahap kedua adalah tahap estimasi *outcome* pada dua kelompok, yaitu satu untuk kelompok treatment dan yang kedua adalah untuk kelompok kontrol (Persamaan 3 dan 4).

$$Y_i^* = \alpha Z_i + \sigma_i, \quad Y_i = 1 \text{ jika } Y_i^* > 0, \tag{2}$$

$$\text{Kelompok 1: } Y_{1i} = \beta_1 X_i + \varepsilon_{1i} \text{ jika } M_i = 1 \text{ (}\textit{Treatment}\text{)} \tag{3}$$

$$\text{Kelompok 2: } Y_{2i} = \beta_2 X_i + \varepsilon_{1i} \text{ jika } M_i = 0 \text{ (Kontrol)} \tag{4}$$

Dimana Z_i adalah vektor karakteristik sosio-ekonomi dan demografi; Y_{1i} dan Y_{2i} merepresentasikan *outcome* pada masing-masing kelompok; X_i merupakan karakteristik rumah tangga *i.* β_1 dan β_2 adalah parameter estimasi; dan ε_{1i} dan ε_{2i} adalah error yang berkaitan dengan variabel *outcome.*

Dampak program PKH terhadap kesejahteraan rumah tangga dapat dihitung dengan nilai *average treatment effect on treat* (ATT) dan *average treatment effect on untreated* (ATU), seperti formula sebagai berikut:

$$ATT = E(Y_{1i}|M = 1) - E(Y_{2i}|M = 1) = (\beta_1 - \beta_2)X_i + \gamma_{1i}(\sigma_1 - \sigma_2) \tag{5}$$

$$ATU = E(Y_{1i}|M = 0) - E(Y_{2i}|M = 0) = (\beta_1 - \beta_2)X_i + \gamma_{1i}(\sigma_1 - \sigma_2) \tag{6}$$

Model estimasi kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi dampak dengan model PSM. Sama dengan ESR, PSM juga membandingkan *outcome* dari dua kelompok yaitu treatment dan kontrol dengan cara mencocokkan skor tiap rumah tangga kelompok treatment dan kontrol yang didapatkan dari persamaan karakteristik kedua rumah tangga. Tahap pertama pada PSM adalah dengan mengestimasi determinan rumah tangga penerima program PKH melalui regresi logit sederhana. Pada tahap tersebut juga didapatkan

nilai skor masing-masing rumah tangga yang kemudian dapat dibandingkan. Persamaan estimasi propensity score matching adalah sebagai berikut (Trujillo et al., 2017):

$$\Delta|_{m=1} = E(Y_{i1}|Mi = 1) - E(Y_{i0}|Mi = 1) \quad (7)$$

Dimana, $M = 1$ adalah treatment dan $M = 0$ adalah kontrol. Sedangkan Y_{i1} adalah variabel outcome untuk treatment dan Y_{i0} adalah nilai variabel outcome untuk kontrol. Sehingga, estimasi propensity score matching adalah untuk melihat perbedaan outcome pada dua kelompok rumah tangga atau yang juga dikenal dengan istilah *average treatment effects of the treated* (ATT).

Terdapat tiga langkah untuk melakukan estimasi *propensity score matching* (Khandker et al., 2009). Pertama, estimasi model partisipasi yang mengharuskan seluruh sampel baik *treatment* atau *control* digabung bersama (*pooled*) dan kemudian seluruh sampel harus diestimasi pada seluruh variabel kontrol atau kovariat yang mungkin dapat mempengaruhi partisipasi program. Untuk melakukan hal tersebut digunakan estimasi logit. Kedua, adalah menentukan *region common support* dan *balancing test*. Penentuan common support diperlukan untuk mendefinisikan bahwa propensity score untuk treatment dan kontrol tidak *overlap.* Sedangkan *balancing test* diperlukan untuk mengecek apakah di dalam setiap distribusi kuantil propensity score, nilai rata-rata *propensity score* dan rata-rata variabel kontrol adalah sama. Terakhir, *matching treatment* dan kontrol yang bertujuan untuk menemukan setiap treatment dan kontrol dengan karakteristik yang sama. Terdapat empat metode matching yaitu *Nearest-Neighbor Matching*, *caliper* atau *radius matching*, *stratification* atau *interval matching* dan *kernel* dan *local matching*.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Rumah Tangga Kabupaten Bantul

Gambaran Rumah tangga Kabupaten Bantul diperoleh dari analisis serta agregasi data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 dengan jumlah observasi sebanyak 846 responden rumah tangga yang dapat mewakili populasi wilayah. Analisis ini merupakan parameter atau deskripsi karakteristik sosial dan ekonomi rumah tangga sebagai acuan praktis antara perilaku dengan analisis tingkat literasi dan inklusi keuangan Kabupaten Bantul.Kepemilikan rumah milik sendiri yang dimiliki oleh rumah tangga Bantul ditemukan dalam persentase sebesar 82% sementara sisanya sebesar 18% merupakan aset kepemilikan tempat tinggal berbentuk sewa, kost, apartemen, rusun, dan sebagainya. Berdasarkan kepemilikan emas diatas 10 gram rumah tangga Bantul memiliki resistensi atau bentuk investasi aset emas sebanyak 25% dari seluruh populasi survei sementara 75 lainnya tidak memiliki.

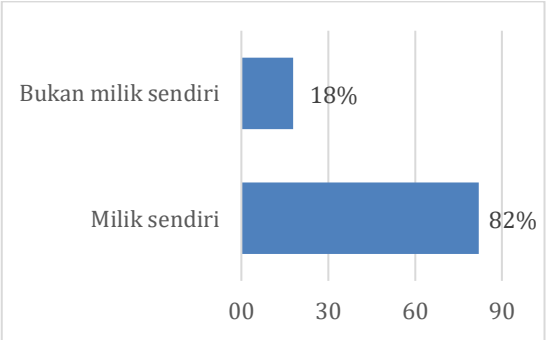

Gambar 4. 1. Kepemilikan Rumah oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul
(Sumber: Susenas, 2022)

Gambar 4. 2. Kepemilikan Emas oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul
(Sumber: Susenas, 2022)

Aset kendaraan bermotor seperti mobil dan motor yang dimiliki oleh rumah tangga di Bantul ditemukan dalam persentase yang sama yaitu sebesar 20% yang berarti bahwa sebanyak 20% rumah tangga memiliki Mobil atau Motor dan sisanya tidak memiliki (Gambar 4.3. dan Gambar 4.4.). Kendaraan bermotor saat ini termasuk menjadi kebutuhan sebagai alat transportasi karena kendaraan umum masih belum memadai di area Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hampir seluruh rumah tangga di Bantul memiliki rumah milik sendiri sebesar 82% dan sisanya sebesar 18% menempati rumah yang bukan milik sendiri (Gambar 4.1.). Sementara itu berdasarkan aset berupa emas dan perhiasan, sebanyak 25% rumah tangga di Bantul memiliki emas lebih dari 10 gram dan sebagian besar memiliki kurang dari 10 gram sebanyak 75% (Gambar 4.2.).

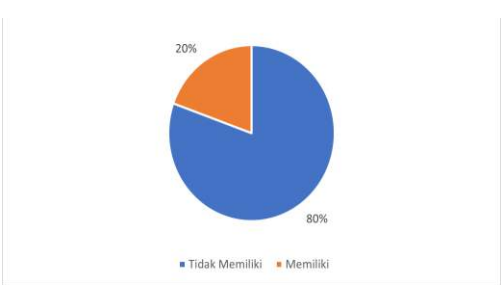

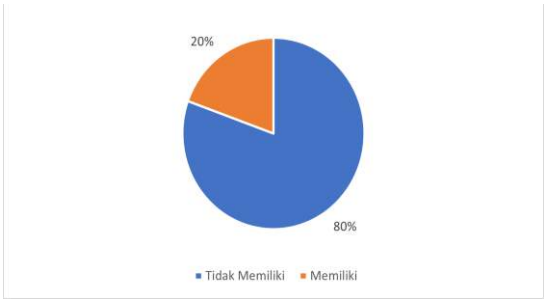

Gambar 4. 3. Kepemilikan Motor oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul

Gambar 4. 4. Kepemilikan Mobil oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul

(Sumber: Susenas, 2022)

Hampir seluruh rumah tangga di Bantul yang menggunakan internet memanfaatkannya untuk hal keuangan seperti e-banking dengan persentase mencapai 92,4%. Transaksi digital saat ini menjadi sebuah kebutuhan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut transaksi keuangan menjadi *cashless* dan lebih praktis. Hal ini ternyata sangat diadopsi oleh rumah tangga di Bantul.

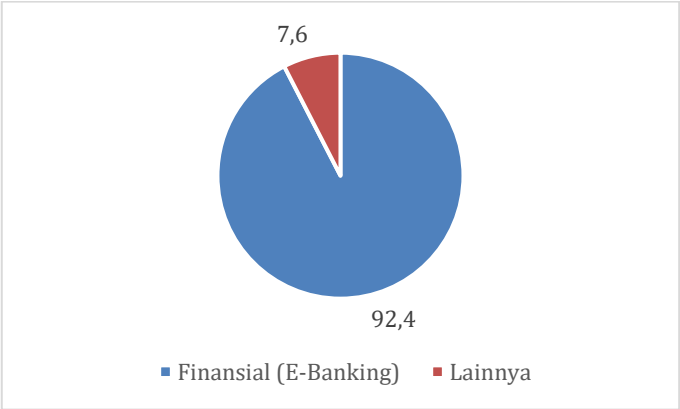

Gambar 4. 5. Manfaat Internet untuk Rumah Tangga Kabupaten Bantul

(Sumber: Susenas, 2022)

Terkait dengan akses kredit yang dimiliki oleh rumah tangga, berdasarkan data Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa separuh lebih rumah tangga tidak mengakses kredit dengan persentase mencapai 68,9%. Sementara itu, akses kredit terbesar ada pada akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 13%. KUR menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan kredit karena menawarkan bunga yang rendah dan persyaratan lebih ringan dibandingkan dengan

akses di Bank Umum. Sebanyak 6,6% dan 5,2% rumah tangga mengakses kredit dari Koperasi dan Bank Umum sedangkan 2,2% mengambilnya dari Pegadaian. Lainnya ditemukan dalam persentase yang kecil antara lain adalah Perusahaan Leasing sebesar 1,4%, BPR sebanyak 1,1%, dan Lintah darat atau kredit tidak sah sebesar 0,4%.

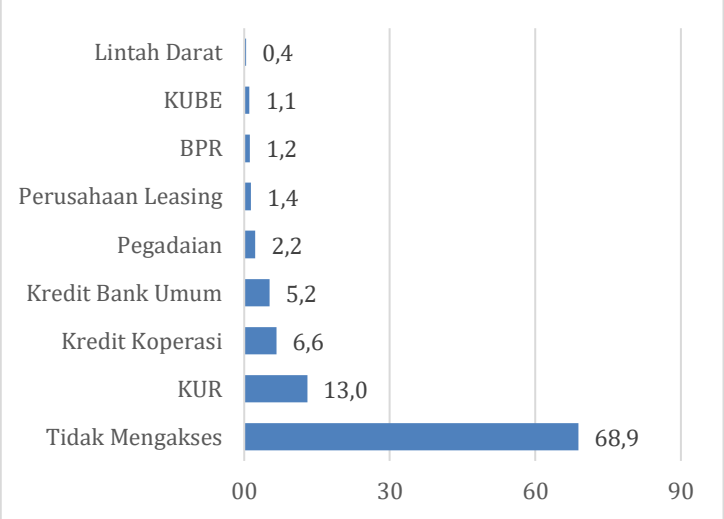

Gambar 4. 6. Akses Kredit oleh Rumah Tangga Kabupaten Bantul (Sumber: Susenas, 2022)

Pendanaan rumah tangga di Bantul sebagian berasal dari pendapatan Anggota rumah tangga yang bekerja yang mana persentasenya mencapai 88,4%. Hal ini berarti bahwa rumah tangga di Bantul sangat menggantungkan hidupnya pada pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan. Sementara itu hanya porsi kecil rumah tangga yang mendapatkan pendanaan dari sumber lain selain pendapatan yaitu dari Uang/Barang simpanan sebesar 7,3%, dari tabungan pensiunan sebesar 4,1%, dan dari hasil investasi sebesar 0,1%.

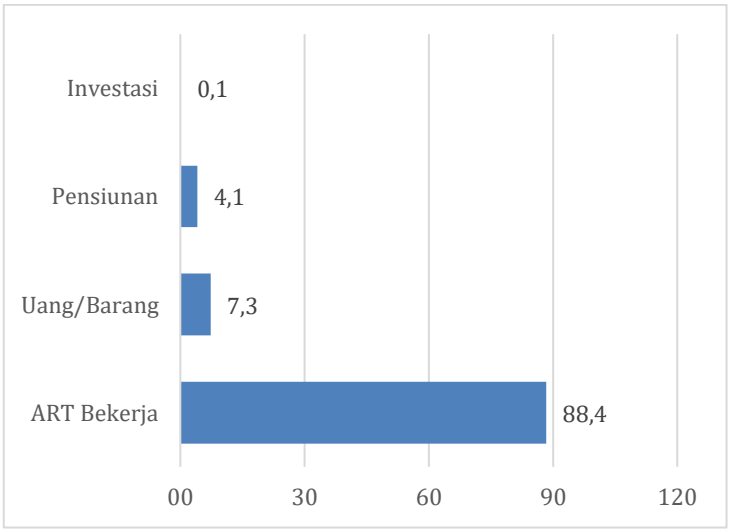

Gambar 4. 7. Sumber Pendanaan oleh Rumah Tangga
(Sumber: Susenas, 2022)

Berdasarkan status ekonomi rumah tangga yang diukur melalui pengeluaran rumah tangga, 30% rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau yang berada pada kuintil paling bawah. 22% rumah tangga masuk ke dalam kategori rumah tangga menengah ke bawah, 19% adalah rumah tangga kelompok menengah, 15% rumah tangga masuk ke dalam kelompok menengah ke atas, dan pada kuintil paling atas terdapat sebanyak 14% rumah tangga (Gambar 4.8.).

Sementara itu, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan pendapatan per kapita rumah tangga, status ekonomi rumah tangga ditemukan tidak jauh berbeda dengan perhitungan pengeluaran meskipun proporsinya lebih rata. Rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kuintil paling bawah atau miskin sebanyak 12%, pada kelompok menengah kebawah, menengah, dan menengah ke atas jumlahnya sama yaitu sebanyak 21%, dan untuk kuintil paling atas terdapat 25% rumah tangga (Gambar 4.9.).

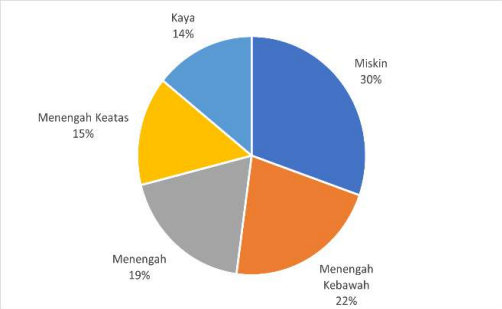

Gambar 4. 8. Status Ekonomi Rumah Tangga (Pengeluaran Rumah Tangga)

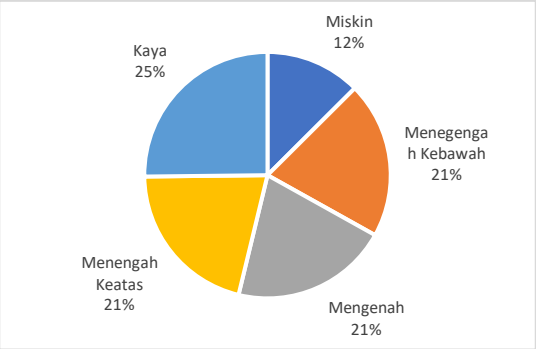

Gambar 4. 9. Status Ekonomi Rumah Tangga (Pendapatan Per Kapita)

(Sumber: Susenas, 2022)

4.2. Sebaran Layanan Keuangan Perbankan Kabupaten Bantul

Aksesibilitas layanan keuangan dapat dijadikan acuan dalam menggambarkan pola perumahan dan permukiman dalam upaya percepatan literasi dan inklusi keuangan. Perbankan merupakan salah satu pemangku kebijakan (*Stakeholder*) yang berperan sebagai kreditur atau pemberi pinjaman jangka panjang yang dapat mendukung perekonomian daerah. Salah satu bentuk penetrasi perbankan dalam kehidupan bermasyarakat adalah membantu pemilik usaha dalam melakukan ekspansi bidang usahanya, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan.

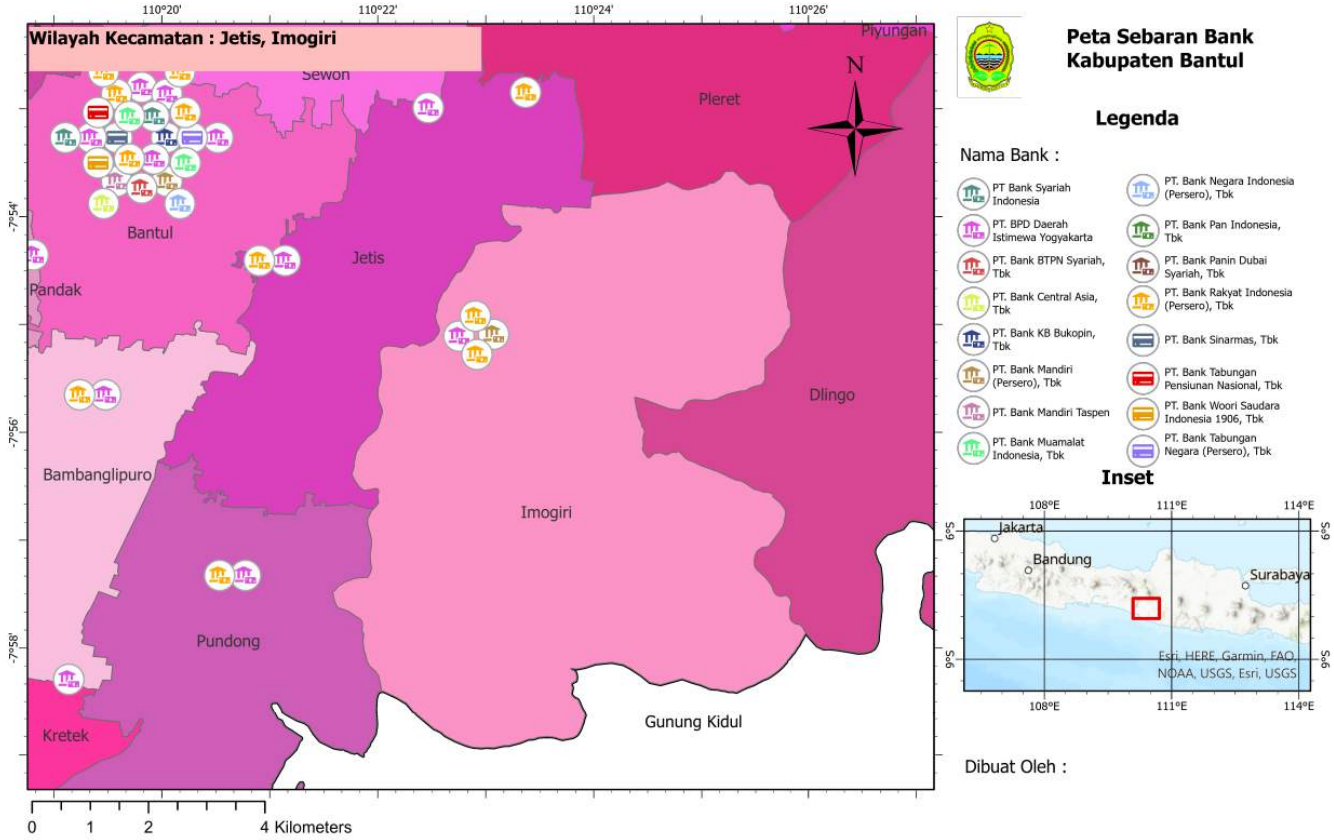

Gambar 4. 10. Sebaran Akses Perbankan Kabupaten Bantul

Sumber: Satu Data Bantul, 2023

Layanan keuangan yang disajikan oleh perbankan pada umumnya memberikan pandangan lebih luas kepada masyarakat dalam wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan. Semakin *well literate* individu tersebut terhadap literasi dan inklusi keuangan maka akan semakin rendah peluangnya kedalam jurang kemiskinan. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pola persebaran layanan perbankan lebih terpusat pada daerah perkotaan atau masih belum menjangkau daerah – daerah *hinterland*. Pada Kabupaten Bantul Kecamatan dengan kepadatan akses perbankan terdapat di Kecamatan Bantul sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, sementara kecamatan dengan akses perbankan yang sedikit berada di Kecamatan Pajangan dan Kretek.

Kekhawatiran yang dapat timbul dari sedikitnya akses terhadap layanan perbankan adalah alternatif mengakses pada *lintah darat*, *fintech* bodong, dan berbagai jenis kecurangan dan *scam* layanan keuangan. Dalam kajian ini pemetaan perbankan merupakan salah hal yang cukup penting, hal ini dikarenakan layanan perbankan merupakan instansi paling umum yang dapat diakses oleh masyarakat berbagai status sosial dari aksesibilitas program jejaring nasional bagi rumah tangga tidak mampu, maupun dalam melakukan ekspansi usaha.

4.3. Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)

Indeks gini merupakan salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan antar distribusi penduduk. Fundamental penentuan garis ketimpangan berdasarkan garis Lorentz mengukur angka berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin jauh dari garis diagonal maka ketimpangannya semakin tinggi. Sebaliknya semakin dekat

dari garis diagonal, maka ketimpangannya semakin rendah. Berdasarkan hasil proyeksi kurva Lorentz menjauh dari garis diagonal utama, berdasarkan proyeksi tersebut wilayah Kabupaten Bantul memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi.

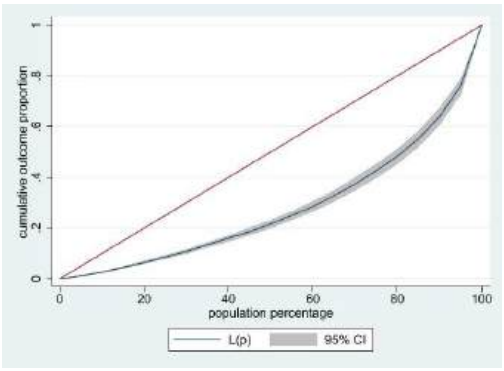

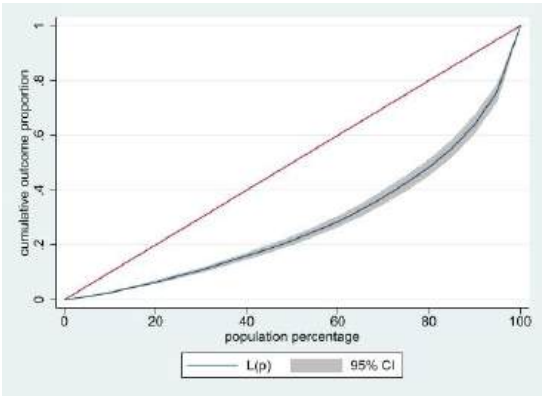

R102	GE(-1)	GE(0)	GE(1)	GE(2)	Gini
Bantul	0.41735	0.36757	0.44416	0.85718	0.47294

R102	GE(-1)	GE(0)	GE(1)	GE(2)	Gini
Bantul	0.40256	0.32439	0.35990	0.56781	0.43931

Gambar 4. 11. Indeks Gini Kabupaten Bantul Tahun 2021 dan 2022

Tingkat ketimpangan menjadi salah satu indikator untuk mengukur *gap* kemiskinan penduduk yang terdapat pada suatu kawasan. Persebaran ketimpangan penduduk dapat diproyeksikan berdasarkan kawasan tertentu maupun secara regional. Indeks gini dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat ketimpangan rendah (< 0,40), tingkat ketimpangan sedang (0,40 – 0,50), dan tingkat ketimpangan tinggi (>0,50) Berdasarkan hasil tabulasi persebaran indeks gini kawasan perkotaan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kawasan yaitu Kota Yogyakarta, beberapa kecamatan bagian Sleman, dan beberapa kecamatan bagian Bantul. Salah satu kawasan dengan ketimpangan tertinggi berada di Kabupaten Bantul dengan rasio gini pada tahun 2022 sebesar 0,439 lebih rendah ketimbang tingkat ketimpangan pada tahun 2021.

4.4. Evaluasi Dampak PKH

Kajian ini juga mengevaluasi dampak Program Keluarga Harapan pada aspek pendidikan, keuangan, dan kesehatan dengan menggunakan data Susenas tahun 2022 yang mana hasilnya dirangkum pada Tabel 4.2.1. Hasil dari kuasi eksperimen menunjukkan adanya evaluasi dampak kepemilikan PKH dengan beberapa variabel kontrol sosio-demografi pada penduduk miskin. Berikut adalah temuan dampak dari penelitian tersebut:

1. Dampak PKH pada probabilitas mengakses KUR meningkat sebesar 18%.

   Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan PKH memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan probabilitas individu untuk dapat mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat). Data yang diperoleh dari estimasi menunjukkan bahwa kepemilikan PKH berkontribusi pada peningkatan probabilitas tersebut sebesar 18%. Hal ini mengindikasikan bahwa program PKH berperan penting dalam memfasilitasi akses rumah tangga terhadap KUR. Dampak positif ini memberikan kesempatan lebih besar bagi rumah tangga yang memiliki kepemilikan PKH untuk mendapatkan akses ke sumber dana yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Peningkatan probabilitas sebesar 18% tersebut dapat berdampak positif pada kemampuan rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui akses yang lebih mudah ke pembiayaan yang dapat mendukung usaha dan bisnis mereka.

2. Dampak PKH pada pengeluaran kesehatan biaya sendiri sebesar Rp. 226.547,619 dalam setahun.

   Kepemilikan PKH memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengurangi pengeluaran pribadi individu untuk kebutuhan kesehatan. kepemilikan PKH telah memberikan penghematan sebesar Rp. 226.547,619 dalam setahun bagi rumah tangga yang terlibat dalam program tersebut. Penghematan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepemilikan PKH memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan dukungan keuangan yang relevan. Rumah tangga yang memenuhi syarat program PKH dapat mengurangi beban keuangan pribadi yang seharusnya dapat dikeluarkan untuk biaya kesehatan, termasuk biaya pemeriksaan medis, obat-obatan, perawatan, atau tindakan medis lainnya. Dengan adanya penghematan tersebut, kepemilikan PKH memberikan manfaat nyata dalam meringankan beban finansial individu terkait dengan kebutuhan kesehatan rumah tangga. Dampak positif ini juga berpotensi meningkatkan akses rumah tangga terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, memperkuat kesadaran dan perhatian terhadap kesehatan, serta memberikan perlindungan finansial yang lebih baik dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak terduga.

3. Dampak PKH terhadap pengeluaran asuransi sebesar Rp. 333.240,476 dalam setahun.

   Penelitian juga menemukan bahwa kepemilikan PKH berkontribusi pada peningkatan pengeluaran untuk asuransi, dengan kenaikan sebesar Rp. 333.240,476 dalam setahun. Peningkatan pengeluaran untuk asuransi sebesar Rp. 333.240,476 dalam setahun juga mencerminkan peningkatan

kesadaran rumah tangga akan pentingnya perlindungan finansial dan upaya untuk mengurangi risiko keuangan yang mungkin timbul dari peristiwa yang terjadi secara terdesak. Hal ini dapat memberikan kepastian dan ketenangan pikiran bagi rumah tangga, serta membantu melindungi kestabilan keuangan di masa depan.

4. Dampak PKH terhadap pengeluaran pendidikan sebesar Rp. 1.086.984 per tahun.

   Selain itu, kepemilikan PKH juga memiliki dampak positif pada pengeluaran untuk pendidikan, dengan peningkatan sebesar Rp. 1.086.984 per tahun. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa program PKH memberikan dukungan finansial yang memadai bagi penerima PKH dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dengan kepemilikan PKH, individu yang terlibat dalam program memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya tambahan guna memastikan akses yang lebih optimal terhadap pendidikan yang berkualitas. Pengeluaran tambahan ini meliputi biaya pendidikan formal, termasuk uang sekolah, buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

Dengan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan PKH memiliki dampak yang signifikan pada akses ke layanan keuangan, pengurangan pengeluaran kesehatan, peningkatan akses asuransi, dan peningkatan pengeluaran pendidikan bagi penduduk miskin yang memenuhi ketentuan sosio-demografi.

Tabel 4. 1. Estimasi PSM Evaluasi Dampak PKH

Variable	Sample	Treated	Controls	Difference	S.E.	T-stat
Kredit	Unmatched	.198412698	.155752212	.042660486	.036454644	1.17
	ATT	.198412698	.015873016	.182539683	.089165353	2.05
	ATU	.155752212	.472566372	.316814159	.	.
	ATE			.292329957	.	.
HealthOOP	Unmatched	264563.492	574796.637	-310233.145	387861.295	-0.80
	ATT	264563.492	38015.873	226547.619	97104.3547	2.33
	ATU	574796.637	99440.708	-475355.929	.	.
	ATE			-347367.728	.	.
InsuranceExp	Unmatched	777576.984	1515474.44	-737897.458	198030.099	-3.73
	ATT	777576.984	444336.508	333240.476	246272.838	1.35
	ATU	1515474.44	1368686.02	-146788.425	.	.
	ATE			-59257.8292	.	.
EducOOP	Unmatched	1523715.08	3467603.71	-1943888.63	1166101.45	-1.67
	ATT	1523715.08	436730.159	1086984.92	978689.318	1.11
	ATU	3467603.71	5187074.34	1719470.63	.	.
	ATE			1604140.38	.	.

Sumber: Analisis 2023.

4.5. Analisis Literasi, Inklusi, dan Literasi Digital Keuangan

Kajian ini melakukan survei yang bertujuan untuk mengidentifikasi indeks literasi, inklusi, dan literasi keuangan digital pada masyarakat di Kabupaten Bantul. Total responden yang berhasil diwawancarai dalam survei ini adalah sebanyak 446 responden yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bantul. Berikut ini adalah karakteristik responden pada kajian ini.

Berdasarkan jenis kelamin, proporsi antara responden laki-laki dan perempuan adalah sama yakni 50% (Gambar 4.11.). Dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, proporsi juga menunjukkan hasil yang tidak cukup berbeda dimana responden yang tinggal di pedesaan ada sebanyak 57% dan di perkotaan sebesar 43% (Gambar 4.12.).

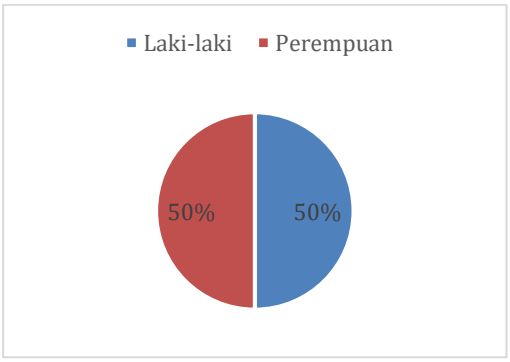

Gambar 4. 12. Jenis Kelamin Responden

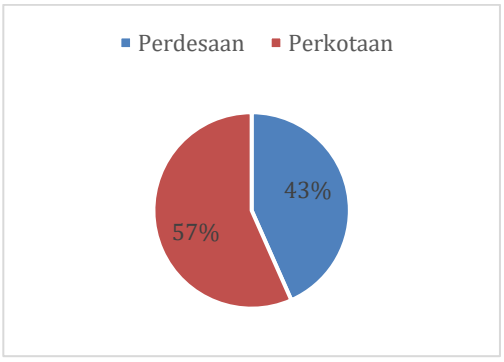

Gambar 4. 13. Lokasi Tempat Tinggal Responden

(Sumber: Analisis 2023.)

Sementara itu, berdasarkan kelompok usia responden, mayoritas responden berada pada kisaran usia 16-30 tahun sebesar 81% kemudian diikuti oleh kelompok usia 31-50 tahun sebesar 12,4%, dan 51 tahun ke atas dengan persentase sebesar 6,6% (Gambar 4.14). Dikarenakan banyaknya usia responden yang masih cukup muda juga membuat status perkawinan didominasi oleh status tidak kawin sebesar 78% dan 22% lainnya sudah kawin (Gambar 4.15.).

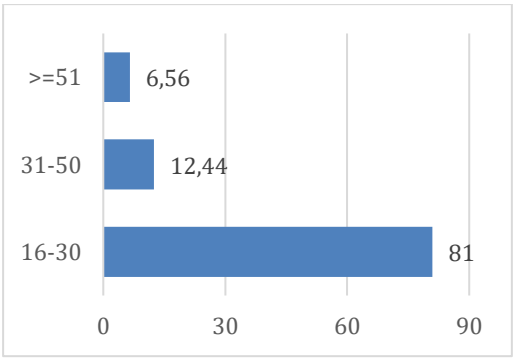

Gambar 4. 14. Kelompok Usia Responden

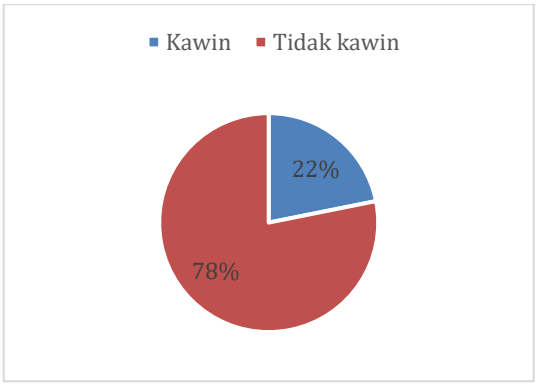

Gambar 4. 15. Status Perkawinan Responden

(Sumber: Analisis 2023.)

Lebih dari separuh responden menempuh pendidikan hingga pada tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dengan persentase mencapai 58,7% diikuti dengan responden yang telah lulus dari program Sarjana/D-IV sebanyak 35,9%. Sedangkan responden yang tidak sekolah dan hanya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar tercatat cukup rendah yakni sebesar 0,45% dan 0,68%, secara berturut-turut (Gambar 4.16.).

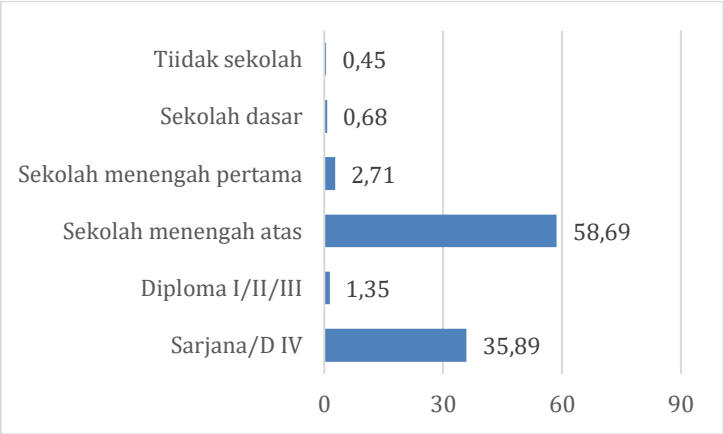

Gambar 4. 16. Kelompok Usia Responden
(Sumber: Analisis 2023.)

Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang mendapatkan hasil bahwa pada tingkat nasional literasi keuangan berada pada indeks sebesar 49,68% dan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 54,55%. Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan, secara nasional adalah sebesar 85,1% dan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 82,08%. Namun, SNLIK tidak menghitung indeks pada tingkat Kabupaten. Pada kajian ini, ditemukan bahwa indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan ditemukan sedikit lebih rendah dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi dengan indeks literasi keuangan sebesar 41,74% dan inklusi keuangan sebesar 65,29% (Gambar 4.17.).

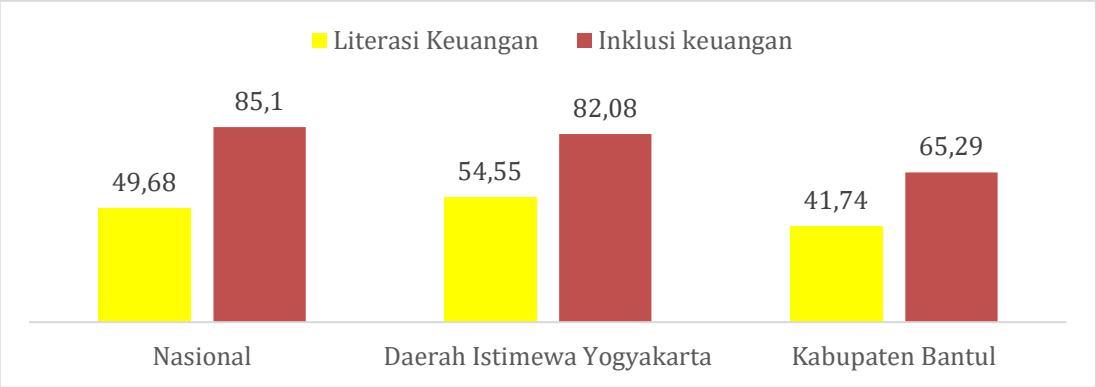

Gambar 4. 17. Literasi dan Inklusi Keuangan di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bantul
(Sumber: Analisis 2023.)

Kajian ini juga memperdalam analisis dengan menghitung indeks literasi keuangan digital di Kabupaten Bantul. Perlu diketahui bahwa hingga tahun 2023, belum ada perhitungan indeks literasi keuangan digital baik pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi sehingga kajian ini menjadi pionir dalam perhitungannya. Hasil perhitungan indeks literasi keuangan digital masyarakat di Kabupaten Bantul adalah sebesar 28,21%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital masih cukup kurang jika dibandingkan dengan indikator lainnya (Gambar 4.18.).

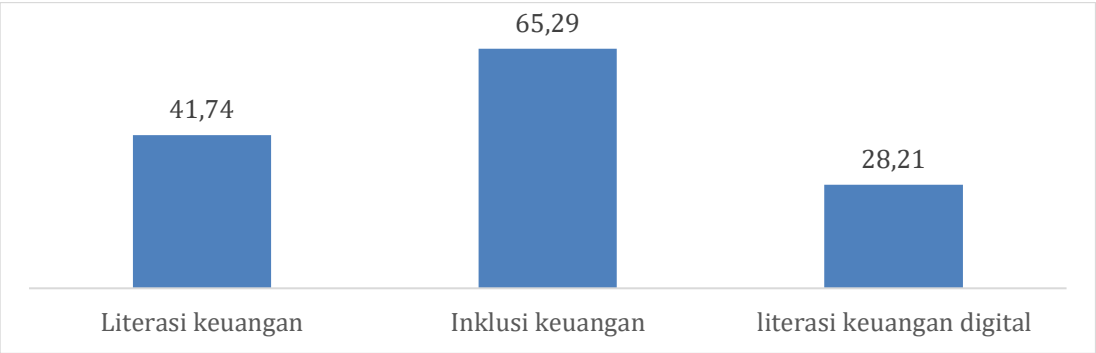

Gambar 4. 18. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul
Sumber: Analisis 2023.

Ketika di disagregat berdasarkan jenis kelamin, pada indeks literasi keuangan dan literasi keuangan digital ditemukan perempuan memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki meskipun perbedaannya cukup kecil. Indeks literasi keuangan perempuan adalah sebesar 44,89% sedangkan laki-laki sebesar 38.84%. Sedangkan untuk indeks literasi keuangan digital, indeks pada perempuan adalah sebesar 29,95% dan laki-laki sebesar 26,68%. Sementara itu, pada indeks inklusi keuangan, laki-laki ditemukan lebih terinklusi dibandingkan perempuan dengan indeks sebesar 66,81% dan untuk perempuan sebesar 64,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan memiliki literasi mengenai keuangan yang lebih baik tetapi laki-laki lebih terinklusi dibandingkan perempuan (Gambar 4.19.).

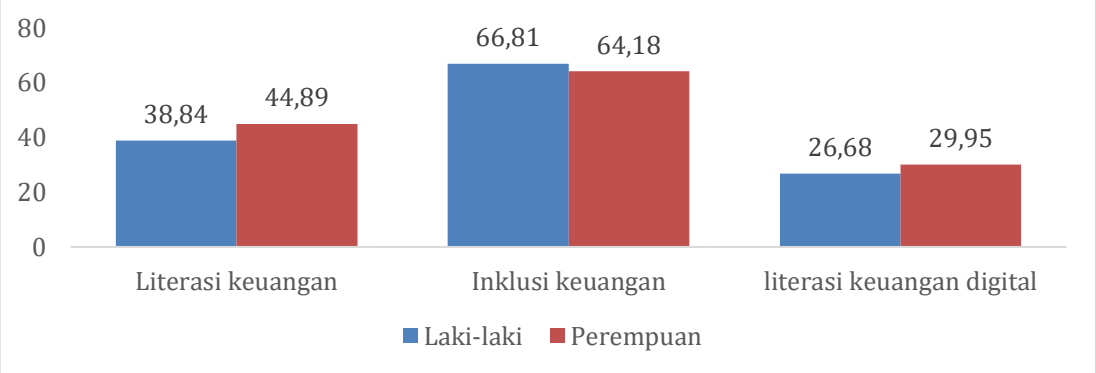

Gambar 4. 19. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Analisis 2023.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, hasil temuan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan dan literasi keuangan digital lebih tinggi pada masyarakat yang menempuh pendidikan SMA ke atas. Perbedaan pada literasi keuangan untuk SMA ke atas adalah sebesar 38,89% dan untuk SD-SMP adalah sebesar 35,66%. Pada indeks literasi keuangan digital, masyarakat yang lulus di

tingkat SMA ke atas lebih tinggi dengan indeks sebesar 31,94% dan bagi masyarakat dengan pendidikan SD-SMP adalah sebesar 24,54%. Sementara itu, pada indeks inklusi keuangan, masyarakat dengan pendidikan SD-SMP justru memiliki indeks yang lebih tinggi yaitu sebesar 65,47% sedangkan untuk pendidikan SMA ke atas indeksnya adalah sebesar 48,01%. Temuan ini menandakan bahwa masyarakat dengan pendidikan yang rendah ternyata lebih terinklusi tetapi pada literasi keuangan ternyata masih perlu ditingkatkan (4.20.).

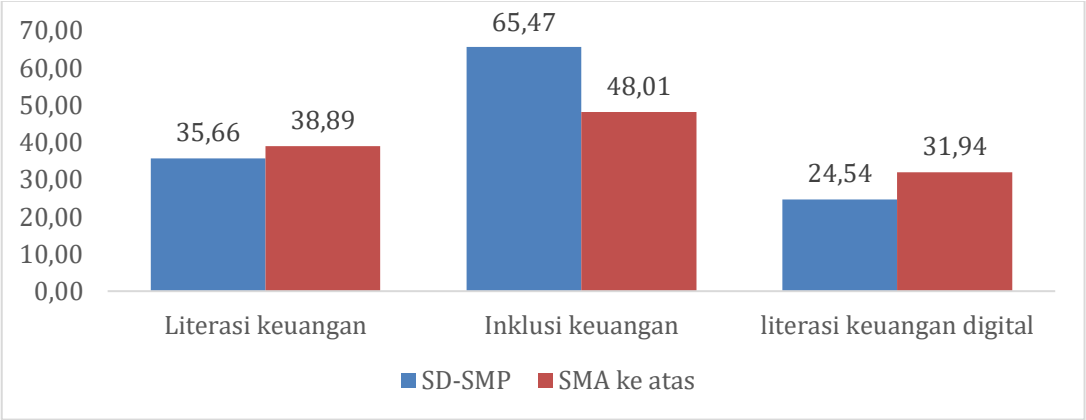

Gambar 4. 20. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Sumber: Analisis 2023.)

Pola yang sama juga ditemukan pada indeks literasi keuangan, literasi keuangan digital, dan inklusi keuangan berdasarkan lokasi tempat tinggal masyarakat di Bantul. Hasil kajian menemukan bahwa literasi keuangan dan literasi keuangan digital di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan dengan persentase sebesar 46,92% dan 32,39%, secara berturut-turut. Namun, pada inklusi keuangan ternyata masyarakat di pedesaan memiliki indeks yang lebih tinggi sedikit dibandingkan di perkotaan yakni sebesar

68,83% sedangkan di pedesaan adalah sebesar 62,84% (Gambar 4.20.).

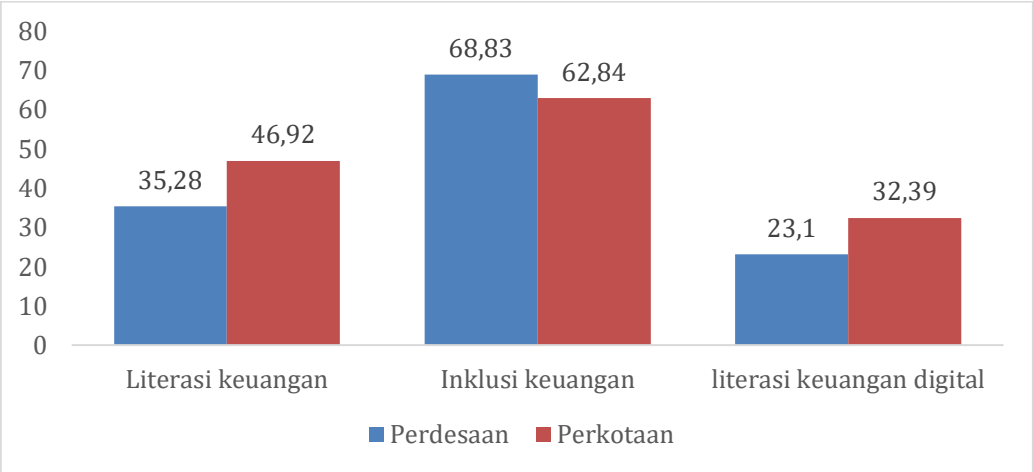

Gambar 4. 21. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal
(Sumber: Analisis 2023.)

Berdasarkan kelompok usia responden, kelompok usia 31-50 tahun memiliki indeks yang lebih tinggi pada ketiga indikator yakni sebesar 43,53% untuk literasi keuangan, 67,27% pada inklusi keuangan, dan 29,09% pada literasi keuangan digital. Sementara itu pada usia lebih dari 50 tahun memiliki indeks inklusi keuangan yang paling rendah sebesar 55,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat pada kelompok yang lebih tua tidak cukup terinklusi pada produk-produk keuangan dan masih didominasi oleh produk-produk yang relatif konvensional saja (Gambar 4.22.).

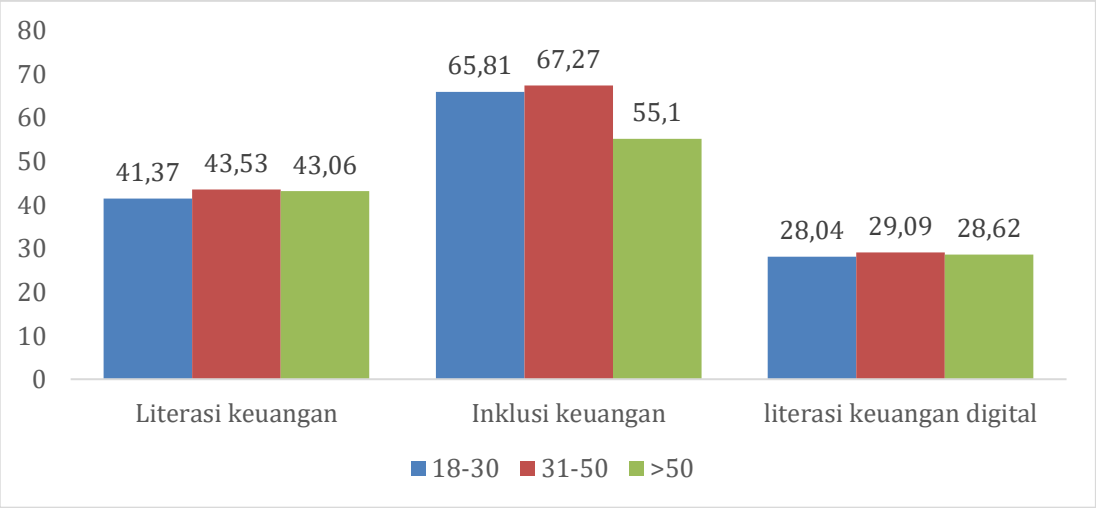

Gambar 4. 22. Literasi, Inklusi, dan Literasi Keuangan Digital di Kabupaten Bantul Berdasarkan Kelompok Usia
(Sumber: Analisis 2023.)

Literasi keuangan merupakan konsep yang mengacu pada pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan individu dalam mengelola aspek keuangan secara efektif dan cerdas. Dalam konteks akademis, literasi keuangan merujuk pada kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan mencapai kesejahteraan keuangan individu. Literasi keuangan melibatkan pemahaman tentang konsep dasar keuangan, seperti pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, hutang, asuransi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Tujuan dari literasi keuangan adalah untuk memberdayakan individu agar dapat membuat keputusan keuangan yang informasional, terinformasi, dan menguntungkan, serta mengembangkan keahlian dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil temuan, ditemukan bahwa Kabupaten Bantul memiliki indeks literasi keuangan sebesar 41.74% (Gambar 4.23.).

Pengetahuan keuangan diidentifikasi sebagai indikator dengan tingkat yang paling rendah dalam komponen literasi keuangan, mencapai angka sebesar (29.85%). Pengetahuan keuangan ini mencakup pemahaman dasar mengenai isu-isu keuangan serta kemampuan individu dalam menerapkan keterampilan yang relevan dalam berbagai situasi keuangan. Temuan dari survei menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait suku bunga masih belum memadai jika dibandingkan dengan pengetahuan mereka tentang inflasi dan risiko diversifikasi. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan terkait suku bunga agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan terinformasi. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, penting untuk mengembangkan strategi dan program edukasi yang menyasar peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai berbagai aspek keuangan, termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang suku bunga dan implikasinya dalam konteks keuangan sehari-hari.

Berdasarkan data yang ada, perilaku keuangan mencapai persentase sebesar 55.44%. Dalam konteks literasi keuangan, perilaku yang baik menjadi faktor penentu yang mendorong tingkat literasi keuangan yang optimal. Perilaku yang diharapkan meliputi perencanaan biaya yang bijaksana, pembangunan jaring pengaman keuangan, investasi yang terinformasikan dan cerdas, pemahaman risiko yang komprehensif, serta aspek-aspek lain yang relevan. Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan, penting untuk memfokuskan perhatian pada pengembangan perilaku keuangan yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, dan intervensi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan mampu mengadopsi perilaku yang mendukung pengelolaan keuangan yang

sehat dan berkelanjutan, serta dapat mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik.

Sikap keuangan mencapai persentase sebesar 47.75%. Sikap keuangan ini mencerminkan persepsi dan sikap individu terhadap pendapatan mereka, yang dapat diamati dari cara mereka mengelola pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan saat ini serta upaya mereka dalam melakukan tabungan untuk keperluan masa depan. Sikap keuangan individu mencakup aspek psikologis, persepsi nilai uang, orientasi waktu, dan kecenderungan pengeluaran serta tabungan. Sikap keuangan yang baik ditandai dengan sikap yang positif terhadap pengelolaan keuangan pribadi, kecenderungan untuk mengutamakan kebutuhan jangka panjang, dan kesiapan untuk mengadopsi perilaku yang mendukung keseimbangan keuangan. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, penting untuk memahami dan memperbaiki sikap keuangan individu melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, dan intervensi yang relevan.

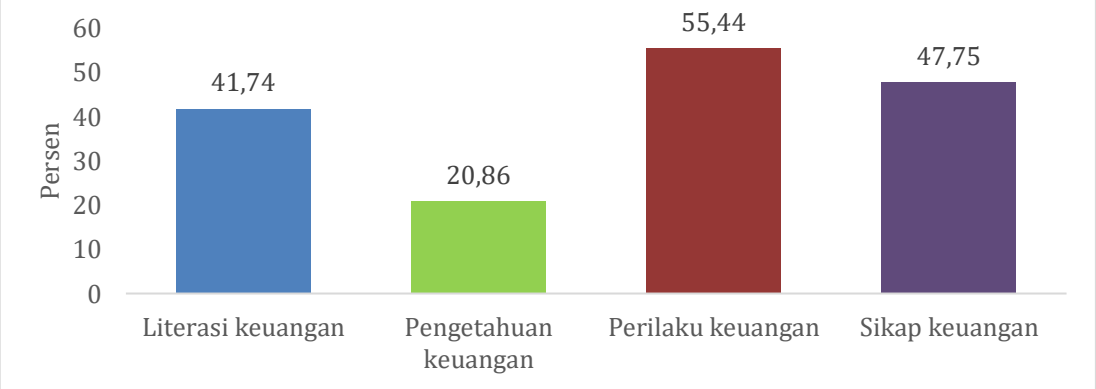

Gambar 4. 23. Indikator Pembentuk Indeks Literasi Keuangan
(Sumber: Analisis 2023.)

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa perempuan memiliki indeks literasi keuangan yang lebih tinggi sebesar 44.89%. Hal ini

menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aspek keuangan dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, masyarakat yang tinggal di perkotaan juga memiliki indeks literasi keuangan yang lebih tinggi sebesar 46.92%. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lingkungan perkotaan dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat, di mana akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesadaran keuangan mungkin lebih mudah diakses dalam konteks perkotaan.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa indeks literasi keuangan lebih tinggi pada individu dengan rentang usia 31-35 tahun (43.53%). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam hal aspek keuangan, mungkin karena pengalaman hidup dan penerapan konsep keuangan yang lebih matang pada usia tersebut. Terkait dengan tingkat pendidikan, terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan literasi keuangan yang lebih tinggi (38.89%). Pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan dasar pengetahuan yang lebih kuat dalam hal aspek keuangan, termasuk pemahaman konsep dasar, strategi pengelolaan keuangan, dan keterampilan yang diperlukan dalam mengambil keputusan keuangan yang bijaksana.

Dengan demikian, hasil kajian ini menyoroti perbedaan dalam indeks literasi keuangan berdasarkan gender, lokasi geografis, kelompok usia, dan tingkat pendidikan. Informasi ini penting dalam merancang program-program literasi keuangan yang lebih tepat sasaran dan efektif, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus dari setiap kelompok tersebut (Gambar 4.24.).

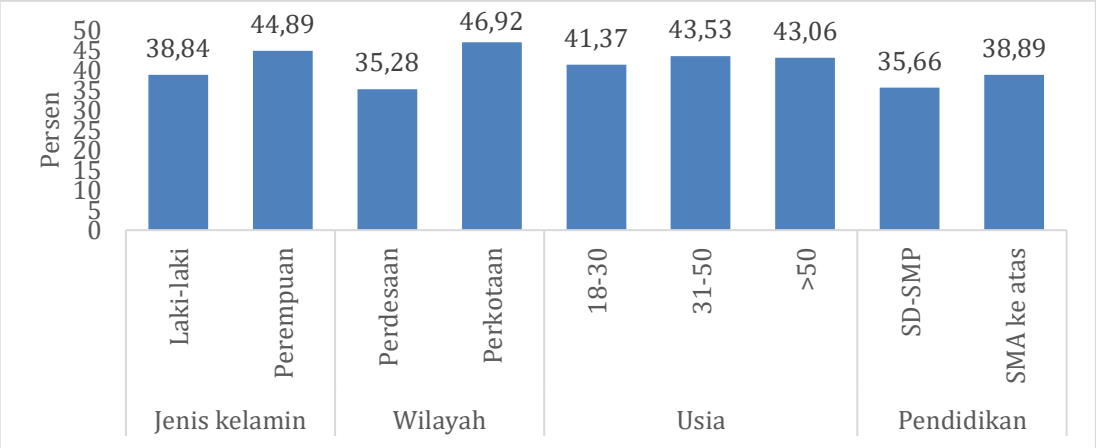

Gambar 4. 24. Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Karakteristik Responden

(Sumber: Analisis 2023.)

Selanjutnya, kajian ini menginvestigasi tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Bantul. Inklusi keuangan merujuk pada inisiatif untuk memfasilitasi akses dan keterjangkauan produk serta layanan keuangan bagi seluruh individu dan entitas bisnis, tanpa memandang tingkat kekayaan personal atau skala perusahaan yang dimiliki. Inklusi keuangan melibatkan pengukuran berbagai dimensi yang berkaitan dengan akses, penggunaan, dan partisipasi individu dan bisnis dalam sistem keuangan. Beberapa indikator yang umum diukur dalam konteks inklusi keuangan antara lain:

1. Akses ke produk dan layanan keuangan: Indikator ini mencerminkan ketersediaan dan keterjangkauan produk dan layanan keuangan seperti rekening bank, kredit, asuransi, dan investasi. Pengukuran dapat mencakup persentase populasi yang memiliki akses ke rekening bank, jumlah outlet perbankan di suatu daerah, dan tingkat penetrasi produk keuangan tertentu.
2. Penggunaan produk dan layanan keuangan: Dimensi ini mengukur sejauh mana individu dan bisnis secara aktif

menggunakan produk dan layanan keuangan yang tersedia. Contoh indikator pengukuran adalah frekuensi penggunaan rekening bank, jumlah transaksi keuangan yang dilakukan, dan tingkat penetrasi penggunaan teknologi keuangan seperti layanan perbankan digital atau e-wallet.

3. Kualitas dan kepuasan pengguna: Selain aspek akses dan penggunaan, inklusi keuangan juga melibatkan pengukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Hal ini dapat mencakup indikator seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan, dan kemudahan akses informasi terkait produk dan layanan keuangan.

Berdasarkan data survei, terdapat tiga produk keuangan yang mendapatkan peringkat teratas dalam hal tingkat kesadaran di kalangan responden. Rekening tabungan, asuransi, dan akun investasi adalah tiga produk yang paling sering didengar oleh responden, dengan persentase mencapai 11,59%, 10,52%, dan 10,28%. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut telah meraih popularitas yang signifikan di kalangan responden dan dipersepsikan sebagai instrumen keuangan yang penting.

Sementara itu, jaminan hari tua, kartu debit, dan kartu kredit memiliki persentase kesadaran yang hampir seimbang, yaitu sebesar 9,88%, 9,86%, dan 9,83%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga produk tersebut juga memiliki tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan responden, meskipun sedikit berbeda dalam persentasenya (Gambar 4.25.).

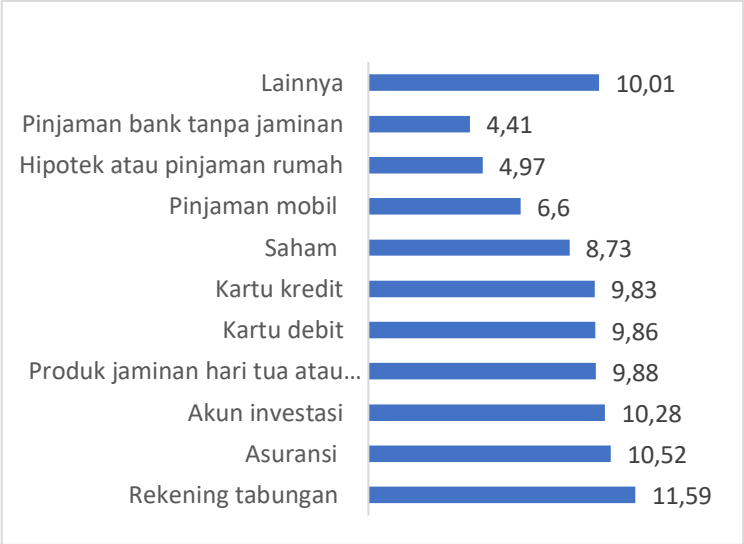

Gambar 4. 25. Produk Keuangan yang Pernah Didengar oleh Responden
(Sumber: Analisis 2023)

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam hal kepemilikan produk keuangan, mayoritas responden melaporkan memiliki rekening tabungan sebesar 29,47%, diikuti oleh kartu debit sebesar 27,52%, dan asuransi dengan persentase kepemilikan sebanyak 10,69% (Gambar 4.26).

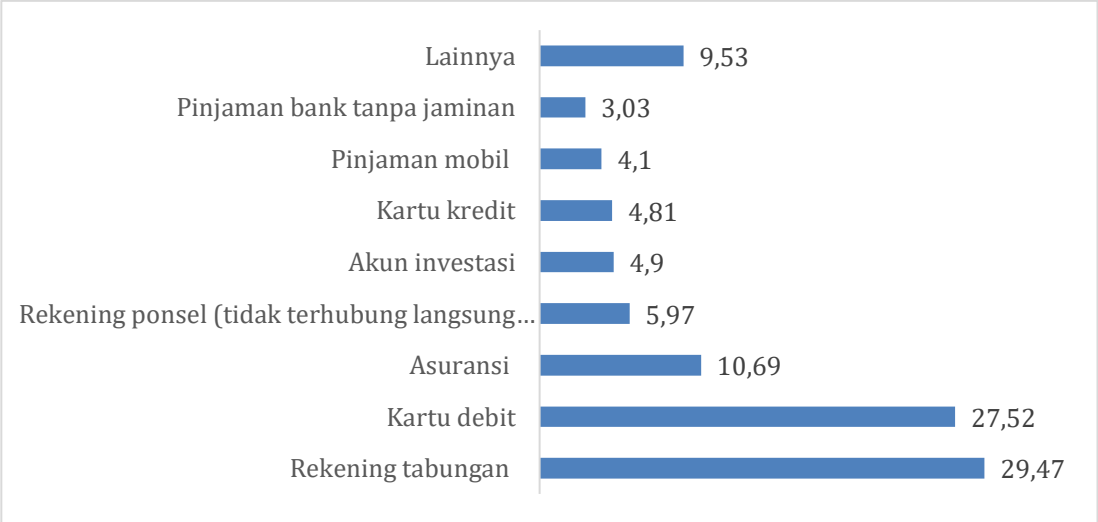

Gambar 4. 26. Produk Keuangan yang Pernah Dimiliki oleh Responden
(Sumber: Analisis 2023)

Analisis data mengenai kepemilikan produk keuangan selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas responden melaporkan memiliki rekening tabungan, kartu debit, dan asuransi. Persentase kepemilikan untuk rekening tabungan sebesar 29,5%, diikuti oleh kartu debit dengan persentase sebesar 27,11%, dan asuransi dengan persentase kepemilikan sebesar 10,66% (Gambar 4.27.).

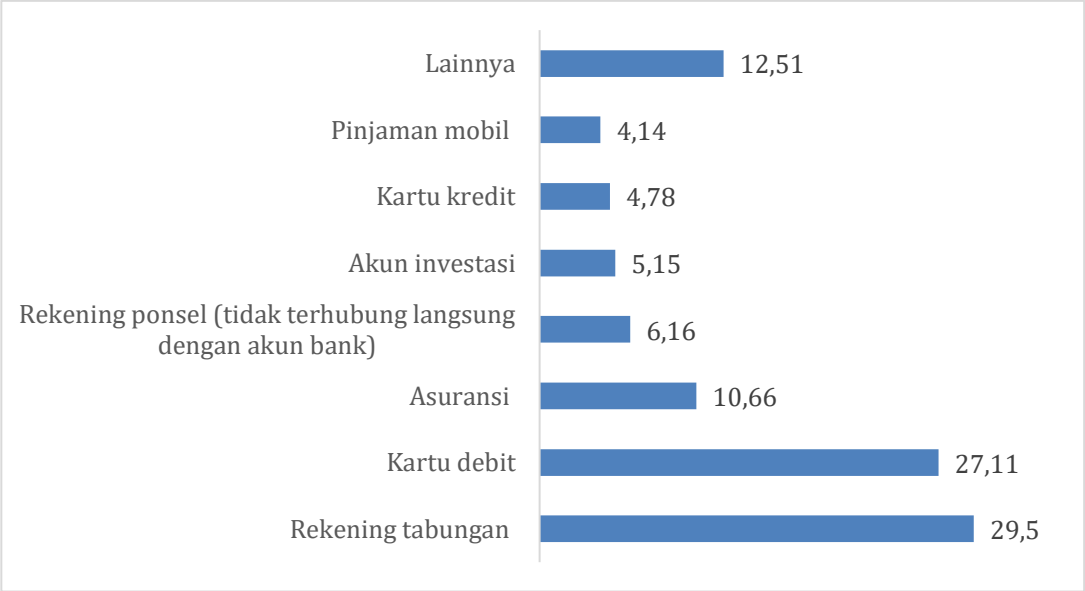

Gambar 4. 27. Produk Keuangan yang Telah Dimiliki Selama Dua Tahun oleh Responden
Sumber: Analisis 2023.

Dari tiga informasi di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai produk keuangan yang populer dan banyak dimiliki baik saat ini maupun dalam dua tahun terakhir secara mayoritas meliputi rekening tabungan, kartu debit, produk asuransi, akun investasi, dan kartu kredit. Produk-produk ini merupakan instrumen keuangan yang umum digunakan oleh individu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan finansial mereka. Rekening tabungan digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan dana, sementara kartu debit memberikan akses untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan langsung. Produk asuransi memberikan perlindungan finansial untuk menghadapi risiko yang tidak terduga, sedangkan akun investasi digunakan untuk pertumbuhan kekayaan dan mencapai tujuan investasi jangka panjang. Terakhir, kartu kredit memberikan fleksibilitas pembayaran dan kemampuan untuk memperoleh kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Penggunaan produk-produk keuangan ini

mencerminkan kebutuhan individu untuk mengatur keuangan mereka secara efektif, memperoleh perlindungan finansial, dan memanfaatkan peluang investasi yang ada.

Terkait dengan cara menabung, pada umumnya, masyarakat mayoritas menerapkan beberapa cara dalam melakukan kegiatan menabung, antara lain dengan menyimpan uang tunai di rumah atau di dompet pribadi (27,92%), menyimpan dana dalam rekening tabungan di lembaga keuangan (8,75%), dan memberikan sebagian dari pendapatan kepada anggota keluarga atau keluarga terdekat sebagai bentuk tabungan (7,71%). Praktik-praktik ini merupakan metode yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengakumulasi dan mempertahankan dana untuk keperluan masa depan. Adanya kecenderungan untuk menyimpan uang tunai di rumah atau di dompet mencerminkan preferensi untuk memegang aset likuid yang mudah diakses secara fisik. Selanjutnya, penggunaan rekening tabungan sebagai sarana penabungan menunjukkan upaya masyarakat dalam memanfaatkan lembaga keuangan untuk menyimpan dan mengelola dana dengan lebih aman dan efisien. Selain itu, memberikan sebagian pendapatan kepada keluarga atau anggota keluarga sebagai bentuk tabungan mencerminkan budaya saling membantu dan pola pengelolaan keuangan dalam lingkungan keluarga (Gambar 4.28.).

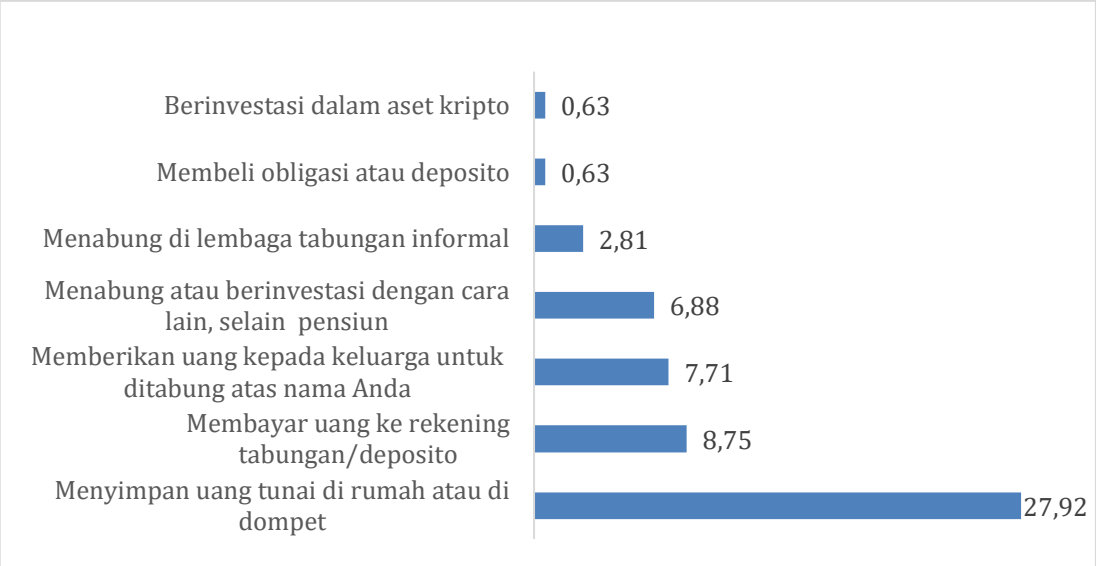

Gambar 4. 28. Cara Menabung yang Dilakukan oleh Responden
Sumber: Analisis 2023.

Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat umumnya mengadopsi berbagai strategi dalam mengatasi situasi tersebut. Strategi-strategi tersebut meliputi peminjaman dana dari keluarga atau teman, meminta bantuan finansial dari keluarga atau teman, mengurangi pengeluaran, menunda pembayaran tagihan, memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan resmi, dan memanfaatkan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diakui secara formal.

Di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat sebesar 31% dan 8,64% yang memilih untuk meminjam dana melalui jalur pinjaman tidak resmi dan pinjaman online. Praktik meminjam dari jalur pinjaman tidak resmi mencerminkan ketergantungan pada sumber-sumber dana informal seperti rentenir atau pemberi pinjaman tanpa regulasi formal. Sementara itu, pinjaman online mengacu pada pinjaman yang diperoleh melalui platform online dan seringkali melibatkan proses yang lebih cepat dan mudah, namun dapat memiliki risiko

tinggi seperti suku bunga yang tinggi atau skema yang tidak terlalu transparan (Gambar 4.29.).

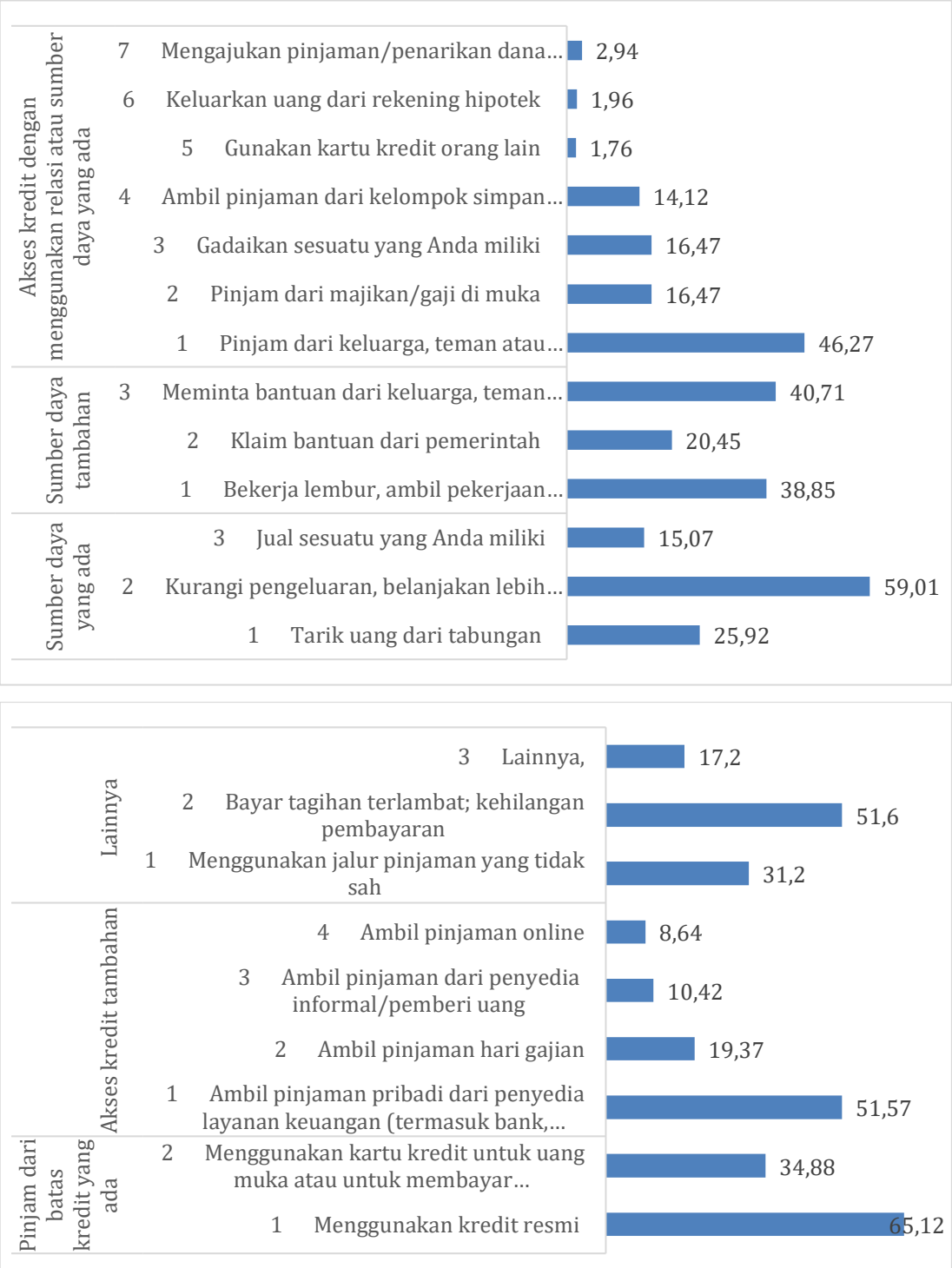

Gambar 4. 29. Strategi Responden untuk Memenuhi Kebutuhan Saat Pendapatan Tidak Cukup

Sumber: Analisis 2023.

Terkait dengan literasi keuangan digital di Kabupaten Bantul, berdasarkan hasil kajian, di Kabupaten Bantul, tercatat bahwa indeks literasi keuangan digital mencapai 28.21%. Angka ini mencerminkan tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara efektif. Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tingkat rendah dalam pengetahuan keuangan digital sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami aspek-aspek penting dalam keuangan digital, seperti kontrak keuangan digital, legalitas aset digital, dan risiko kebocoran data pribadi di ruang publik.

Sementara itu, indikator perilaku keuangan digital mencapai angka 44.25%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah cukup berhati-hati dalam melaksanakan transaksi keuangan digital dengan memeriksa keamanan, secara berkala mengganti password, dan tidak membagikan informasi pribadi secara online. Indikator sikap keuangan digital mencapai angka 27.8%. Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat dalam menghadapi perilaku belanja online dengan menggunakan jaringan Wifi umum, melakukan pemeriksaan website saat berbelanja, serta selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang terkait dengan transaksi digital (Gambar 4.29.).

Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat literasi keuangan digital di Kabupaten Bantul, serta indikator-indikator yang meliputi pengetahuan, perilaku, dan sikap masyarakat terkait dengan penggunaan layanan keuangan digital. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program-program literasi keuangan digital yang lebih tepat sasaran, dengan fokus pada peningkatan pemahaman, kesadaran akan risiko

dan perlindungan data, serta pembentukan perilaku yang aman dan bertanggung jawab dalam bertransaksi secara digital.

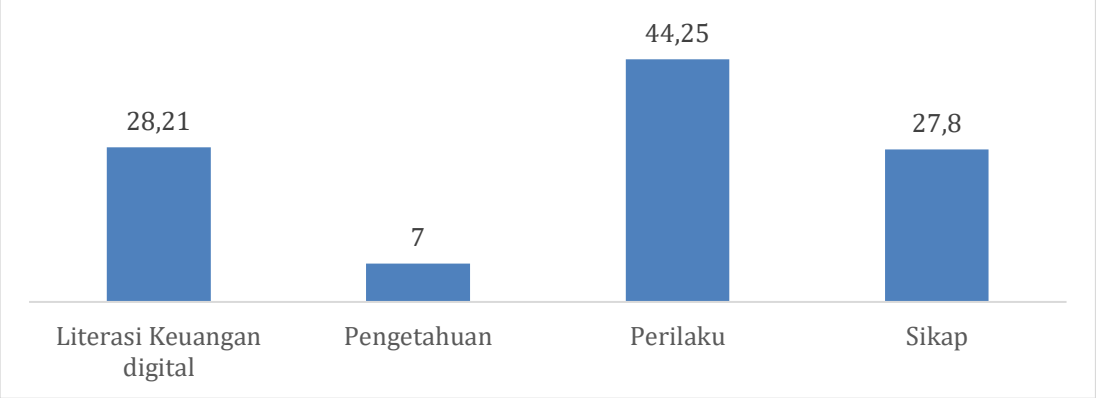

Gambar 4. 30. Indikator Pembentuk Indeks Literasi Keuangan Digital

Sumber: Analisis 2023.

Berdasarkan analisis karakteristik responden, ditemukan bahwa indeks literasi keuangan digital cenderung lebih tinggi pada beberapa kelompok tertentu. Secara khusus, responden perempuan (29,95%), mereka yang tinggal di perkotaan (32,29%), usia antara 31 hingga 50 tahun (29,09%), serta responden dengan tingkat pendidikan SMA ke atas (31,94%), memiliki indeks literasi keuangan digital yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan layanan keuangan digital antara kelompok-kelompok tersebut. Responden perempuan mungkin memiliki tingkat literasi keuangan digital yang lebih tinggi karena faktor-faktor seperti kesadaran akan pentingnya keuangan digital dan keterampilan teknologi yang lebih baik. Tinggal di perkotaan juga dapat memberikan akses dan eksposur yang lebih besar terhadap teknologi dan layanan keuangan digital. Usia responden antara 31 hingga 50 tahun dapat menunjukkan pengamalan dan pemahaman

yang lebih matang dalam hal keuangan digital. Sedangkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA ke atas, dapat memberikan dasar pengetahuan yang lebih kuat dalam hal keuangan dan teknologi.

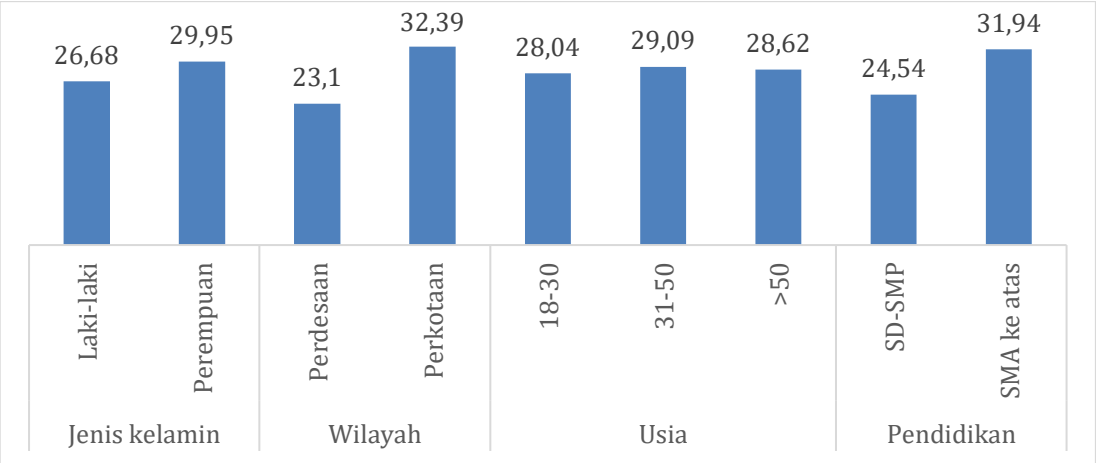

Gambar 4. 31. Indeks Literasi Keuangan Digital Berdasarkan Karakteristik Responden

Sumber: Analisis 2023.

Informasi ini penting dalam merancang program-program literasi keuangan digital yang lebih spesifik, dengan mempertimbangkan karakteristik kelompok-kelompok yang memiliki indeks literasi keuangan digital yang lebih rendah. Upaya dapat difokuskan pada peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran akan keuangan digital, terutama untuk kelompok-kelompok yang memiliki tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kajian ini menyoroti pentingnya literasi, inklusi, dan literasi keuangan digital dalam masyarakat Kabupaten Bantul. Dari hasil survei yang melibatkan 446 responden dari berbagai kecamatan, ditemukan beberapa temuan penting.

Berdasarkan karakteristik responden, terdapat perbedaan dalam indeks literasi keuangan digital. Responden perempuan, tinggal di perkotaan, berusia antara 31 hingga 50 tahun, dan memiliki pendidikan SMA ke atas, cenderung memiliki indeks literasi keuangan digital yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor seperti kesadaran, keterampilan teknologi, dan tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Secara umum, Kabupaten Bantul memiliki indeks literasi keuangan sebesar 41,74% dan inklusi keuangan sebesar 65,29%. Meskipun angka ini lebih rendah daripada tingkat nasional dan provinsi, literasi keuangan dan inklusi keuangan masih memiliki tingkat yang signifikan. Namun, indeks literasi keuangan digital di Kabupaten Bantul hanya mencapai 28,21%, menunjukkan bahwa literasi keuangan digital masih perlu ditingkatkan.

Dalam konteks literasi keuangan, pengetahuan keuangan menjadi indikator dengan tingkat yang paling rendah, terutama dalam hal pengetahuan tentang suku bunga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait aspek-aspek penting dalam keuangan, termasuk pengetahuan tentang suku bunga dan implikasinya.

Perilaku keuangan masyarakat di Kabupaten Bantul mencapai persentase sebesar 55,44%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengadopsi perilaku yang baik dalam mengelola keuangan mereka, seperti perencanaan biaya yang bijaksana, pengembangan jaring pengaman keuangan, dan pemahaman risiko yang komprehensif.

Sikap keuangan masyarakat di Kabupaten Bantul mencapai persentase sebesar 47,75%. Sikap ini mencerminkan persepsi dan sikap individu terhadap pendapatan mereka, termasuk pengelolaan pendapatan untuk kebutuhan saat ini dan tabungan untuk masa depan.

Pada inklusi keuangan, hasil survei menunjukkan bahwa rekening tabungan, asuransi, dan akun investasi merupakan tiga produk keuangan dengan tingkat kesadaran tertinggi di kalangan responden. Mayoritas responden juga melaporkan memiliki rekening tabungan, kartu debit, dan asuransi. Produk-produk keuangan ini digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan finansial mereka. Selain itu, dalam praktik menabung, masyarakat umumnya menggunakan berbagai cara seperti menyimpan uang tunai di rumah, menyimpan dalam rekening tabungan, dan memberikan sebagian pendapatan kepada keluarga atau anggota keluarga sebagai bentuk tabungan.

Ketika pendapatan tidak mencukupi, masyarakat umumnya mengadopsi berbagai strategi seperti peminjaman dana dari keluarga atau teman, meminta bantuan finansial, mengurangi pengeluaran, menunda pembayaran tagihan, memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan resmi, atau memanfaatkan jalur pinjaman tidak resmi dan pinjaman online. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan jalur pinjaman tidak resmi dan pinjaman online memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantul masih perlu meningkatkan inklusi keuangan dalam berbagai aspek.

Pada aspek literasi keuangan digital, kajian ini menemukan bahwa indeksnya masih cukup rendah. Komponen paling rendah ada pada indikator pengetahuan yang menandakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek penting dalam keuangan digital. Di sisi lain, indikator perilaku keuangan digital menunjukkan bahwa masyarakat telah berhati-hati dalam melaksanakan transaksi keuangan digital dengan memperhatikan keamanan dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Semenatra itu, indikator sikap keuangan digital mencerminkan persepsi masyarakat yang cukup rendah terhadap perilaku belanja online dengan memperhatikan jaringan Wi-Fi, pemeriksaan situs web, dan syarat dan ketentuan transaksi digital.

Dalam kesimpulannya, hasil kajian ini memberikan wawasan yang penting tentang tingkat literasi, inklusi, dan literasi keuangan digital di Kabupaten Bantul. Informasi ini dapat menjadi landasan untuk merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di tingkat lokal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil:

1. Mengembangkan program literasi keuangan yang tepat sasaran dan efektif: Berdasarkan karakteristik responden, penting untuk merancang program-program literasi keuangan yang mempertimbangkan faktor seperti kesadaran, keterampilan teknologi, dan tingkat pendidikan. Program-program ini harus mengedepankan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran akan keuangan digital serta perilaku keuangan yang bertanggung jawab.
2. Memperkuat pengetahuan masyarakat tentang aspek-aspek keuangan penting: Dalam konteks literasi keuangan, pengetahuan keuangan menjadi indikator dengan tingkat yang paling rendah, terutama dalam hal pengetahuan tentang suku bunga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait aspek-aspek penting dalam keuangan, termasuk pengetahuan tentang suku bunga dan implikasinya.
3. Mempromosikan penggunaan produk keuangan yang tepat dan strategi menabung yang efektif: Mengingat mayoritas responden memiliki rekening tabungan, kartu debit, dan asuransi, penting untuk mempromosikan penggunaan produk-produk keuangan tersebut sebagai instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan keuangan. Selain itu, diperlukan promosi strategi menabung yang efektif untuk membantu masyarakat mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik. Selain itu, perlu juga dikenalkan dengan instrumen atau produk keuangan lainnya supaya masyarakat lebih terinklusi pada sektor keuangan.

4. Melibatkan lembaga keuangan resmi dalam upaya meningkatkan literasi keuangan: Dalam strategi yang umum digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi ketidakcukupan pendapatan, terdapat upaya memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara organisasi pemerintah daerah dan lembaga keuangan resmi dalam menyediakan akses yang lebih mudah dan pengetahuan yang lebih baik tentang layanan keuangan yang tersedia.
5. Merancang kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di tingkat lokal: Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul. Kebijakan dan program tersebut harus didasarkan pada data dan temuan yang diperoleh dalam kajian ini untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul, saran-saran ini dapat membantu organisasi pemerintah daerah merancang strategi yang lebih efektif dan mendukung pengembangan masyarakat yang lebih berdaya dalam hal keuangan.

5.3. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang dapat dituliskan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Program Literasi Keuangan yang Tepat Sasaran: Pemerintah kabupaten dan organisasi perangkat daerah perlu mengembangkan program-program literasi

keuangan yang tepat sasaran, dengan fokus pada meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek penting dalam keuangan. Program ini dapat mencakup edukasi tentang suku bunga, manajemen keuangan pribadi, investasi, dan pengelolaan risiko keuangan.

2. Peningkatan Literasi Keuangan Digital: Dalam menghadapi era digital, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan digital di Kabupaten Bantul. Pemerintah kabupaten dan organisasi perangkat daerah dapat meluncurkan program-program pelatihan dan edukasi yang memfokuskan pada pengetahuan tentang layanan keuangan digital, keamanan transaksi online, dan manfaat penggunaan teknologi keuangan.
3. Peningkatan Inklusi Keuangan: Promosi Penggunaan Produk Keuangan yang Tepat dan Strategi Menabung yang Efektif: Pemerintah kabupaten dan organisasi perangkat daerah perlu melakukan promosi aktif terkait penggunaan produk keuangan yang tepat, seperti rekening tabungan, asuransi, dan akun investasi. Selain itu, penting juga untuk memperkenalkan strategi menabung yang efektif kepada masyarakat, termasuk pentingnya mengelola pendapatan dan mengembangkan kebiasaan menabung secara konsisten.
4. Peningkatan Akses dan Pengetahuan terhadap Layanan Keuangan Resmi: Pemerintah kabupaten dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan resmi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Kolaborasi ini dapat meliputi penyediaan informasi yang jelas tentang produk dan layanan keuangan, penyelenggaraan program pelatihan keuangan, dan penyediaan akses yang mudah ke lembaga keuangan resmi.

5. Pengawasan terhadap Jalur Pinjaman Tidak Resmi dan Pinjaman Online: Penting bagi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalur pinjaman tidak resmi dan pinjaman online. Upaya ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik pinjaman ilegal dan penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi yang terkait dengan penggunaan jalur pinjaman tersebut.
6. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Pemerintah kabupaten dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan program-program literasi keuangan dan inklusi keuangan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat meliputi penyediaan sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan literasi keuangan.

Melalui implementasi kebijakan-kebijakan ini, diharapkan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara efektif, mengelola keuangan dengan baik, dan mencapai tujuan keuangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bay, C., Catasús, B., & Johed, G. (2014). Situating financial literacy. *Critical Perspectives on Accounting*, *25*(1), 36–45. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.011

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari http://www.bps.go.id/, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pada jam 20.20 WIB.

Badan Pusat Statistik, 2022.Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022.Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul.

Carpena, F., & Zia, B. (2020). The causal mechanism of financial education: Evidence from mediation analysis. *Journal of Economic Behavior and Organization*, *177*, 143–184. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.05.001

Cicchiello, A. F., Kazemikhasragh, A., Monferrá, S., & Girón, A. (2021). Financial inclusion and development in the least developed countries in Asia and Africa. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, *10*(1). https://doi.org/10.1186/s13731-021-00190-4

Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. *Journal of Consumer Affairs*, *44*(2), 296–316. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x

Joo, S. (2008). Personal Financial Wellness. In the Handbook *of Consumer Finance Research* (pp. 21–33). https://doi.org/10.1007/978-0-387-75734-6_2

Kamakia, M. G., Mwangi, C. I., & Mwangi, M. (2017). Financial Literacy and Financial Wellbeing of Public Sector Employees: A

Critical Literature Review. *European Scientific Journal, ESJ*, *13*(16), 233. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n16p233

Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2009). *Handbook on Impact Evaluation Quantitative Methods and Practices*. The World Bank.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: An overview. *Journal of Pension Economics and Finance*, *10*(4), 497–508. https://doi.org/10.1017/S1474747211000448

Matewos, K. R., Navkiranjit, K. D., & Jasmindeep, K. (2016). Financial literacy for developing countries in Africa: A review of concept, significance and research opportunities. *Journal of African Studies and Development*, *8*(1), 1–12. https://doi.org/10.5897/jasd2015.0331

Mokhtar, N., Husniyah, A. R., Sabri, M. F., & Abu Talib, M. (2015). Financial well-being among public employees in Malaysia: A preliminary study. *Asian Social Science*, *11*(18), 49–54. https://doi.org/10.5539/ass.v11n18p49

Morris, T., Maillet, S., & Koffi, V. (2022). Financial knowledge, financial confidence and learning capacity on financial behavior: a Canadian study. *Cogent Social Sciences*, *8*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1996919

OJK. (2019b). STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN INDONESIA (Revisit 2017). https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-KeuanganIndonesia-(Revisit-2022)-/SNLKI (Revisit 2019)-new.pdf

OJK. (2022b). STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN INDONESIA (Revisit 2017). https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-KeuanganIndonesia-(Revisit-2022)-/SNLKI (Revisit 2022)-new.pdf

Oliver-Márquez, F. J., Guarnido-Rueda, A., Amate-Fortes, I., & Martínez-Navarro, D. (2022). Is Income Inequality Influenced by

Financial Knowledge? A Macroeconomic and Longitudinal Analysis. *Journal of the Knowledge Economy*, *13*(4), 3050–3075. https://doi.org/10.1007/s13132-021-00838-2

PORTER, N. M., & GARMAN, E. T. (1992). Money as Part of a Measure of Financial Well-Being. In *American Behavioral Scientist* (Vol. 35, Issue 6, pp. 820–826). https://doi.org/10.1177/0002764292035006016

Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of Consumer Affairs*, *44*(2), 276–295. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x

Sambodo, N. P., Sekaringsih, R. B., Azzani, M., Asyahid, E., & Assyahid, E. (2017). *Indonesian Muslim Household Financial Inclusion Profile: Evidence from IFLS4 and IFLS5 Panel Data Universitas Gadjah Mada Working Papers on Islamic Economics and Finance Indonesian Muslim Household Financial Inclusion Profile: Evidence from IFLS4 and IFLS*. *August*, 1–25.

Shrestha, R., & Nursamsu, S. (2021). Financial inclusion and savings in Indonesia. *Financial Inclusion in Asia and Beyond: Measurement, Development Gaps, and Economic Consequences*, *September*, 227–250. https://doi.org/10.4324/9781003035916-8

Trujillo, A. J., Portillo, J. E., Vernon, J. A., International, S., Care, H., Sep, N., & Vernon, J. A. (2017). Experience Using Propensity Score Matching The Impact of Subsidized Health Insurance for the Poor : Evaluating the Colombian Experience Using Propensity Score Matching. *International Journal of Health Care Finance and Economics, 5*(3), 211–239.

Willis, L. E. (2008). *Against Financial Literacy Education Lauren*. *08*.

LAMPIRAN

KUESIONER SURVEI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN KABUPATEN BANTUL

DEMOGRAFI		
Kode	**Pertanyaan**	**Intruksi *data coding***
QD1	Jenis kelamin	1 Laki-laki 0 Perempuan
QD2	Daerah tempat tinggal	1 Perkotaan 0 Perdesaan
QD2_a	**Bisakah Anda memberi tahu saya yang mana yang paling menggambarkan komunitas tempat Anda tinggal saat ini?** Pewawancara mencatat ukuran komunitas tempat responden tinggal pada hari wawancara.	**Baca tiap pilihan jawaban** 1. Sebuah desa, dusun atau daerah pedesaan (kurang dari 3.000 orang) 2. Kota kecil (3.000 – 15.000 orang) 3. Kota (15.000 – 100.000 orang) 4. kota (100.00 – 1.000.000 orang) 5. kota besar (lebih dari 1.000.000 orang)
QD3	Usia [minimal 18 tahun]	☐☐ Tahun
QD4	Pendidikan	1. Tidak sekolah 2. Sekolah dasar 3. Sekolah menengah pertama 4. Sekolah menengah atas 5. Diploma I/II/III 6. Sarjana/D IV 7. S2 dan S3
QD5	Status pernikahan	1 Kawin 2 Tidak Kawin/Lajang 3 Cerai hidup 4 Cerai mati

QD6	Dengan siapa Anda tinggal di rumah tangga?	1 Sendiri 2 Pasangan 3 Anak usia dibawah 18 tahun → QD6_a 4 Anak usia 18 tahun ke atas → QD6_b 5 Saudara yang sudah dewasa 6 Teman, kolega, atau pelajar 7 Orang dewasa lainnya, bukan keluarga **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**
QD6_a	Berapa jumlah anak usia di bawah 18 tahun di dalam rumah tangga?	☐☐ Orang
QD6_b	Berapa jumlah anak usia 18 tahun ke atas di dalam rumah tangga?	☐☐ Orang
QD7	Apakah Anda memiliki akses internet?	1 Ya 0 Tidak
QD8	Apa lapangan pekerjaan utama saat ini?	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin E. Konstruksi F. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor G. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah H. Transportasi dan Pergudangan I. Informasi dan Komunikasi J. Jasa keuangan dan Asuransi K. Real Estate L. Jasa pendidikan dan kesehatan M. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial N. Jasa Lainnya

PENGANGGARAN		
Kode	**Pertanyaan**	**Intruksi *data coding***
QF1_a	Apakah Anda membuat keputusan sehari-hari tentang uang Anda sendiri?	1 Ya 0 Tidak
QF1	Siapa yang bertanggungjawab membuat keputusan sehari-hari tentang uang di dalam rumah tangga?	1 Anda membuat keputusan sendiri 2 Anda membuat keputusan dengan orang lain 3 Orang lain yang membuat keputusan
QF2	Apakah Anda melakukan hal-hal berikut untuk diri sendiri atau rumah tangga Anda?	1. Membuat rencana untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran 2. Mencatat pengeluaran Anda 3. Menyimpan uang untuk tagihan terpisah dari uang belanja sehari-hari 4. Mencatat tagihan yang akan datang untuk memastikan Anda tidak melewatkannya 5. Menggunakan aplikasi perbankan atau alat pengelolaan uang untuk melacak pengeluaran Anda 6. Mengatur pembayaran otomatis untuk pengeluaran rutin **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**
TABUNGAN AKTIF DAN GUNCANGAN KEUANGAN		
QF3	Dalam 12 bulan terakhir apakah Anda [secara pribadi] menabung dengan salah satu cara berikut? **Note: selain dana pensiun** (PEWAWANCARA: dapat diberikan contoh, mungkin termasuk mengirimkan uang untuk diinvestasikan, atau membeli ternak, emas, real estate atau properti lainnya)	1. Menyimpan uang tunai di rumah atau di dompet Anda 2. Membayar uang ke rekening tabungan/deposito 3. Memberikan uang kepada keluarga untuk ditabung atas nama Anda 4. Menabung di lembaga tabungan informal 5. Membeli obligasi atau deposito 6. Berinvestasi dalam aset kripto 7. Berinvestasi dalam saham

		8. Menabung atau berinvestasi dengan cara lain, selain pensiun **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**
QF4	Jika Anda, secara pribadi, menghadapi pengeluaran besar hari ini – setara dengan pendapatan bulanan Anda sendiri – apakah Anda dapat membayarnya tanpa meminjam uang atau meminta bantuan keluarga atau teman? [Tambahkan jika perlu, jika saat ini Anda tidak memiliki penghasilan, harap pikirkan pengeluaran tak terduga yang setara dengan jumlah uang yang biasa Anda keluarkan dalam sebulan.]	1 Ya 0 Tidak
PEMENUHAN KEBUTUHAN		
QF11	Terkadang orang merasakan bahwa penghasilan mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup mereka. Dalam 12 bulan terakhir, apakah hal ini terjadi pada Anda secara pribadi?	1 Ya → **QF12** 0 Tidak
QF12	Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan terakhir kali ini terjadi?	↓
QF12_a	Sumber daya yang ada	1. Tarik uang dari tabungan 2. Kurangi pengeluaran, belanjakan lebih sedikit, lakukan tanpa, tunda pengeluaran yang direncanakan 3. Jual sesuatu yang Anda miliki **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**
QF12_b	Sumber daya tambahan	1. Bekerja lembur, ambil pekerjaan tambahan, dapatkan uang tambahan 2. Klaim bantuan dari pemerintah 3. Meminta bantuan dari keluarga, teman atau masyarakat **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE**

		RESPONSES)
QF12_c	Akses kredit dengan menggunakan relasi atau sumber daya yang ada	1. Pinjam dari keluarga, teman atau komunitas 2. Pinjam dari majikan/gaji di muka 3. Gadaikan sesuatu yang Anda miliki 4. Ambil pinjaman dari kelompok simpan pinjam Anda atau kelompok tabungan informal lainnya 5. Gunakan kartu kredit orang lain 6. Keluarkan uang dari rekening hipotek 7. Mengajukan pinjaman/penarikan dana pensiun **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**
QF12_d	Pinjam dari batas kredit yang ada	1. Menggunakan kredit resmi 2. Menggunakan kartu kredit untuk uang muka atau untuk membayar tagihan/membeli makanan **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**
QF12_e	Akses kredit tambahan	1. Ambil pinjaman pribadi dari penyedia layanan keuangan (termasuk bank, lembaga kredit atau keuangan mikro) 2. Ambil pinjaman hari gajian 3. Ambil pinjaman dari penyedia informal/pemberi uang 4. Ambil pinjaman online **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**
QF12_f	Lainnya	1. Menggunakan jalur pinjaman yang tidak sah 2. Bayar tagihan terlambat; kehilangan pembayaran 3. Lainnya, sebutkan_____ **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**

MEMILIH DAN MENGGUNAKAN PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN				
Jenis produk keuangan		**QP1.** Apakah Anda pernah mendengar tentang jenis produk keuangan berikut ini?	**QP2. D**apatkah Anda memberi tahu saya apakah Anda [secara pribadi atau bersama-sama] saat ini memegang salah satu dari jenis produk ini? **[Hanya ditanyakan jika QP1=Ya]**	**QP3. D**alam dua tahun terakhir, mana dari jenis produk keuangan berikut ini yang telah Anda pilih [secara pribadi atau bersama-sama] apakah Anda masih memilikinya atau tidak ? **[Tidak termasuk produk yang diperpanjang secara otomatis]** **[Hanya ditanyakan jika QP1=Ya]**
1	Produk jaminan hari tua atau pensiun	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
2	Akun investasi	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
3	Hipotek atau pinjaman rumah	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
4	Pinjaman properti	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
5	Pinjaman bank tanpa jaminan	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
6	Pinjaman mobil	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
7	Kartu kredit	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
8	Rekening saat ini/giro/pembayaran	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
9	Rekening tabungan	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
10	Pinjaman kredit mikro	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak

11	Asuransi	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
12	Saham	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
13	Obligasi	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
14	Rekening ponsel (tidak terhubung langsung dengan akun bank)	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
15	Kartu debit	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
16	Aset kripto	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
17	Produk keuangan berlabel berkelanjutan, atau “ESG”, atau “hijau” **[Catatan untuk agensi: Ini mungkin termasuk investasi, pensiun, hipotek, obligasi, dll. dan tidak menggantikan item lain dalam daftar yang menanyakan tentang produk ini secara lebih umum]**	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
18	Lainnya sebutkan	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak
19	Tidak ada	1 Ya → **QP2** 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak	1 Ya 0 Tidak

Kode	**Pertanyaan**	**Intruksi *data coding***
QP4	Dari mana Anda mengetahui produk keuangan tersebut? **[Hanya ditanyakan jika QP1=Ya]**	1. Keluarga 2. Teman/kerabat 3. Media sosial 4. Pamflet/brosur/baliho 5. Iklan di TV/Radio 6. Lainnya, sebutkan_____

		JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)
QP5	Manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan bagaimana Anda membuat pilihan terakhir Anda?	1. Saya mempertimbangkan beberapa opsi dari berbagai perusahaan sebelum mengambil keputusan 2. Saya mempertimbangkan berbagai opsi dari satu perusahaan 3. Saya tidak mempertimbangkan opsi lain sama sekali 4. Saya melihat sekeliling tetapi tidak ada pilihan lain untuk dipertimbangkan
QP7	Sumber informasi manakah yang menurut Anda sangat memengaruhi keputusan Anda {tentang yang mana yang akan diambil}?	1. Perbandingan produk dari panduan pembelian terbaik (seperti majalah spesialis) 2. Situs perbandingan harga 3. Rekomendasi dari penasihat keuangan independen [berbasis biaya, dan tidak boleh termasuk yang berbasis komisi] 4. Informasi dari iklan atau brosur tentang produk khusus ini 5. Rekomendasi dari teman, keluarga atau kenalan 6. Rekomendasi dari orang yang tidak Anda kenal (seperti media sosial atau “influencer”) 7. Informasi yang diberikan oleh staf penyedia produk keuangan (secara langsung, online atau melalui telepon) 8. Lainnya, sebutkan_____ **JAWABAN BOLEH LEBIH DARI SATU (MULTIPLE RESPONSES)**

SIKAP DAN PERILAKU		
QS1	Saya ingin tahu seberapa besar Anda setuju atau tidak setuju dengan masing-masing pernyataan ini (yang berhubungan dengan Anda)	↓
QS1_a	Saya merasa lebih puas membelanjakan uang daripada menyimpannya untuk jangka panjang	1 Sangat setuju 2 Setuju 3 Cukup setuju 4 Tidak setuju 5 Sangat tidak setuju
QS1_b	Saya siap mempertaruhkan sebagian uang saya sendiri saat menabung atau melakukan investasi	1 Sangat setuju 2 Setuju 3 Cukup setuju 4 Tidak setuju 5 Sangat tidak setuju
QS1_c	Uang ada untuk dibelanjakan	1 Sangat setuju 2 Setuju 3 Cukup setuju 4 Tidak setuju 5 Sangat tidak setuju
QS1_d	Saya puas dengan situasi keuangan saya saat ini	1 Sangat setuju 2 Setuju 3 Cukup setuju 4 Tidak setuju 5 Sangat tidak setuju
QS1_e	Saya terus mengawasi secara pribadi urusan keuangan saya	1 Sangat setuju 2 Setuju 3 Cukup setuju 4 Tidak setuju 5 Sangat tidak setuju
QS1_f	Situasi keuangan saya membatasi kemampuan saya untuk melakukan hal-hal yang penting bagi saya	1 Sangat setuju 2 Setuju 3 Cukup setuju

		4 5	Tidak setuju Sangat tidak setuju
QS1_g	Saya menetapkan tujuan keuangan jangka panjang dan berusaha untuk mencapainya	1 2 3 4 5	Sangat setuju Setuju Cukup setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
QS1_h	Saya percaya bahwa uang di bank akan aman bahkan jika bank kolaps	1 2 3 4 5	Sangat setuju Setuju Cukup setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
QS1_i	Saya memiliki terlalu banyak hutang sekarang	1 2 3 4 5	Sangat setuju Setuju Cukup setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
QS1_j	Jika saya meminjam uang, saya memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya	1 2 3 4 5	Sangat setuju Setuju Cukup setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
QS1_k	Saya percaya bahwa bank harus memeriksa etika perusahaan sebelum menyediakan layanan perbankan	1 2 3 4 5	Sangat setuju Setuju Cukup setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
QS2	Seberapa sering Anda mengatakan pernyataan ini berlaku untuk Anda?	↓	
QS2_a	Saya cenderung khawatir tentang membayar biaya hidup sehari-hari	1	Selalu

		2 3 4 5	Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_b	Keuangan saya mengendalikan hidup saya	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_c	Sebelum saya membeli sesuatu, saya mempertimbangkan dengan cermat apakah saya mampu membelinya	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_d	Saya punya sisa uang di akhir bulan	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_e	Saya membayar tagihan tepat waktu	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_f	Saya membagikan kata sandi dan PIN rekening bank saya dengan teman dekat saya	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_g	Sebelum membeli produk keuangan secara online, saya memeriksa apakah penyedianya terdaftar resmi oleh pemerintah	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_h	Saya berbagi informasi tentang keuangan pribadi saya secara online (misalnya di media sosial)	1 2	Selalu Sering

		3 4 5	Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_i	Sebelum saya membeli sesuatu, saya mempertimbangkan apakah perusahaan berusaha untuk meningkatkan dampak sosial atau lingkungannya	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS2_j	Saya membeli barang dan jasa yang tidak saya butuhkan	1 2 3 4 5	Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah
QS3	Seberapa baik pernyataan ini menggambarkan Anda atau situasi Anda.	↓	
QS3_a	Saya cenderung mengabaikan uang kecil kecuali terjadi kesalahan	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_b	Karena keadaan uang saya, saya merasa tidak akan pernah memiliki hal-hal yang saya inginkan dalam hidup	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_c	Saya jujur meskipun itu menempatkan saya pada kerugian finansial	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_d	Saya senang mendiskusikan situasi keuangan saya dengan orang yang saya kenal baik	1 2 3	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan

		4 5	Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_e	Saya percaya penyedia layanan keuangan memperlakukan saya dengan adil	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_f	Jika penjaga toko memberi saya terlalu banyak kembalian, saya mungkin akan menyimpannya	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_g	Saya khawatir uang saya tidak akan bertahan lama	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_h	Saya baru saja merasa cukup secara finansial	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_i	Saya cenderung hidup untuk hari ini dan membiarkan hari esok berjalan sendiri	1 2 3 4 5	Sangat menggambarkan Menggambarkan Cukup menggambarkan Kurang menggambarkan Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_j	Saya terkadang membeli tiket lotre/undian ketika saya merasa tidak punya cukup uang	1 2	Sangat menggambarkan Menggambarkan

		3 Cukup menggambarkan 4 Kurang menggambarkan 5 Tidak menggambarkan sama sekali
QS3_k	Saya secara teratur mengubah kata sandi di situs web yang saya gunakan untuk belanja online dan keuangan pribadi	1 Sangat menggambarkan 2 Menggambarkan 3 Cukup menggambarkan 4 Kurang menggambarkan 5 Tidak menggambarkan sama sekali
QS4	Saya ingin tahu seberapa besar Anda setuju atau tidak setuju dengan masing-masing pernyataan ini (yang berhubungan dengan Anda)	↓
QS4_a	Menurut saya aman untuk berbelanja online menggunakan jaringan Wi-Fi publik (mis., di kafe, bandara, pusat perbelanjaan)	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah
QS4_b	Penting untuk memperhatikan keamanan sebuah situs web sebelum melakukan transaksi online (mis. situs https, logo keamanan atau sertifikat)	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah
QS4_c	Menurut saya tidak penting membaca syarat dan ketentuan saat membeli sesuatu secara online	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah
QS4_d	Alat digital memfasilitasi pengelolaan keuangan pribadi saya	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah
QS4_e	Saya memercayai layanan keuangan yang disediakan oleh bank online dan FinTech (seperti Bank Jago, OVO, Gopay, dll.)	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang

		5 Tidak pernah
QS4_f	Saya percaya bahwa penyedia layanan keuangan harus menggunakan berbagai data pribadi non-keuangan, termasuk dari sosial media, dalam keputusan tentang pemberian kredit	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah
QS4_g	Saya lebih cenderung membeli secara impulsif saat membeli secara online daripada secara langsung di toko	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah
QS4_h	Kemungkinan besar saya akan membaca persayaratan jika itu di atas kertas daripada online	1 Selalu 2 Sering 3 Kadang-kadang 4 Jarang 5 Tidak pernah
PENGETAHUAN KEUANGAN		
QK3	Sekarang bayangkan bahwa Anda harus menunggu selama satu tahun untuk mendapatkan bagian Anda dari Rp 1.000.000 dengan asumsi inflasi tetap pada 5 persen. Dalam waktu satu tahun apakah Anda dapat membeli:	1 Lebih banyak dengan bagian uang Anda daripada yang Anda dapat hari ini 2 Jumlah yang sama 3 Kurang dari yang dapat Anda beli hari ini 4 [Spontan] Tergantung jenis barang yang ingin dibeli 97 Tidak tahu 99 Menolak 999 Jawaban yang tidak relevan
QK4	Anda meminjamkan Rp 25.000 kepada teman pada suatu malam dan dia mengembalikan Rp 25.000 keesokan harinya. Berapa banyak bunga yang dia bayarkan untuk pinjaman ini?	Sebutkan Rp_____ 97 Tidak tahu 99 Menolak 999 Jawaban yang tidak relevan
QK5	Bayangkan seseorang memasukkan Rp 100.000 ke dalam rekening tabungan [tanpa biaya, bebas pajak] dengan suku bunga terjamin 2% per tahun. Mereka tidak melakukan pembayaran lebih lanjut ke akun rekening ini dan tidak menarik uang apa pun. Berapa banyak yang ada di rekening pada akhir tahun pertama,	Sebutkan Rp_____(minimal 0) 97 Tidak tahu 99 Menolak

	setelah pembayaran bunga dilakukan?	999 Jawaban yang tidak relevan
QK6	Berapa banyak yang akan ada di rekening pada akhir lima tahun [tambahkan jika perlu: mengingat tidak ada biaya atau potongan pajak]?	1 Lebih dari Rp 100.000,00 2 Rp 100.000,00 3 Kurang dari Rp 100.000,00 4 Tidak dapat dihitung dengan informasi yang diberikan 97 Tidak tahu 99 Menolak 999 Jawaban yang tidak relevan
QK7	Apakah menurut Anda pernyataan berikut ini benar atau salah	↓
Qk7_1a	Investasi dengan pengembalian tinggi cenderung berisiko tinggi	1 Benar 0 Salah 97 Tidak tahu 99 Menolak
Qk7_1b	Jika seseorang menawarkan Anda kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, kemungkinan besar Anda juga akan melakukannya kehilangan banyak uang	1 Benar 0 Salah 97 Tidak tahu 99 Menolak
Qk7_2a	Inflasi tinggi berarti biaya hidup meningkat pesat	1 Benar 0 Salah 97 Tidak tahu 99 Menolak
Qk7_2b	Biasanya dimungkinkan untuk mengurangi risiko berinvestasi di pasar saham dengan membeli berbagai macam saham atau reksadana	1 Benar 0 Salah 97 Tidak tahu 99 Menolak
Qk7_3	Kecil kemungkinan Anda akan kehilangan semua uang Anda jika Anda menyimpannya di lebih dari satu tempat	1 Benar 0 Salah 97 Tidak tahu 99 Menolak
Qk7_4	Kontrak keuangan digital memerlukan tanda tangan kontrak kertas agar dianggap sah	1 Benar 0 Salah 97 Tidak tahu 99 Menolak
Qk7_5	Data pribadi yang saya bagikan secara publik online dapat digunakan untuk menargetkan saya dengan penawaran komersial atau keuangan yang	1 Benar 0 Salah

	dipersonalisasi	97 Tidak tahu 99 Menolak
Qk7_6	Crypto-currency memiliki tender legal yang sama dengan uang kertas dan koin	1 Benar 0 Salah 97 Tidak tahu 99 Menolak

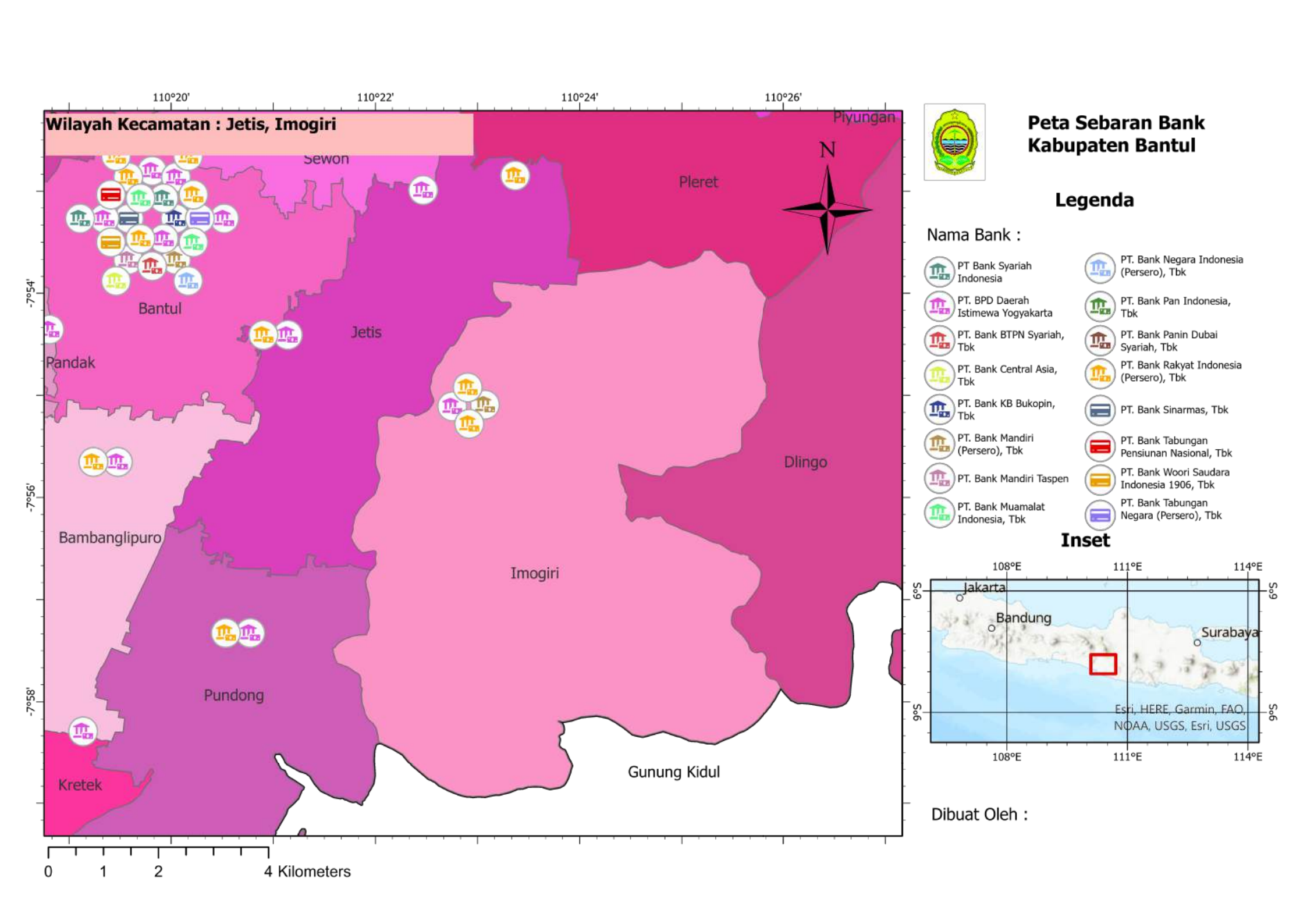
Wilayah Kecamatan : Jetis, Imogiri
110°20'
110°22'
110°24'
110°26'
-7°54'
-7°56'
-7°58'
Piyungan
Sewon
Pleret
Bantul
Jetis
Pandak
Dlingo
Bambanglipuro
Imogiri
Pundong
Gunung Kidul
Kretek
N
0
1
2
4 Kilometers
Peta Sebaran Bank
Kabupaten Bantul
Legenda
Nama Bank :
PT Bank Syariah Indonesia
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank BTPN Syariah, Tbk
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank KB Bukopin, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri Taspen
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Inset
108°E
111°E
114°E
6°S
Jakarta
Bandung
Surabaya
Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
Dibuat Oleh :

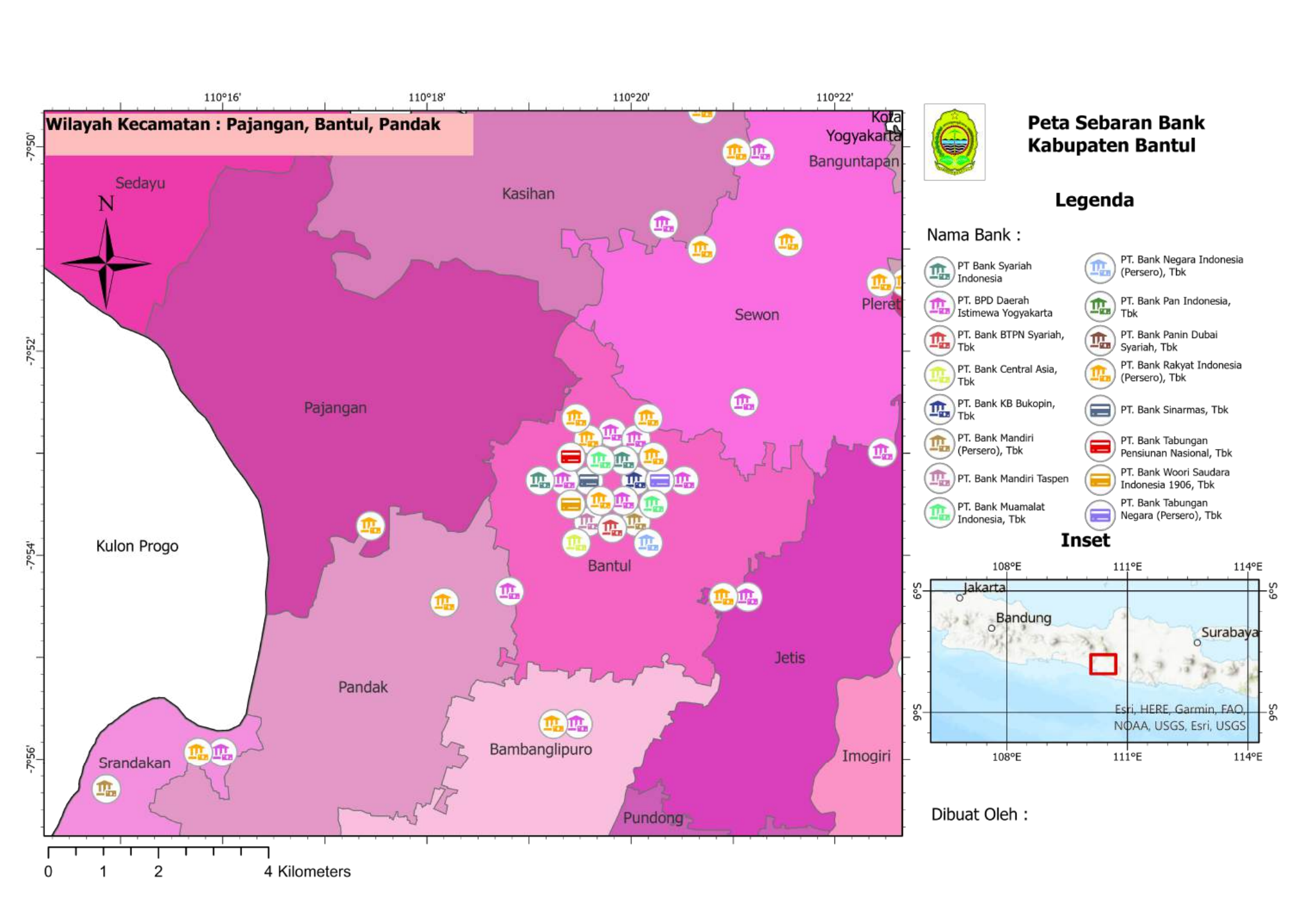
Wilayah Kecamatan : Pajangan, Bantul, Pandak
110°16'
110°18'
110°20'
110°22'
-7°50'
-7°52'
-7°54'
-7°56'
N
Sedayu
Kasihan
Kota Yogyakarta
Banguntapan
Pleret
Sewon
Pajangan
Kulon Progo
Bantul
Jetis
Pandak
Bambanglipuro
Imogiri
Srandakan
Pundong
0
1
2
4 Kilometers
Peta Sebaran Bank
Kabupaten Bantul
Legenda
Nama Bank :
PT Bank Syariah Indonesia
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank BTPN Syariah, Tbk
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank KB Bukopin, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri Taspen
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Inset
108°E
111°E
114°E
6°S
Jakarta
Bandung
Surabaya
Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
Dibuat Oleh :

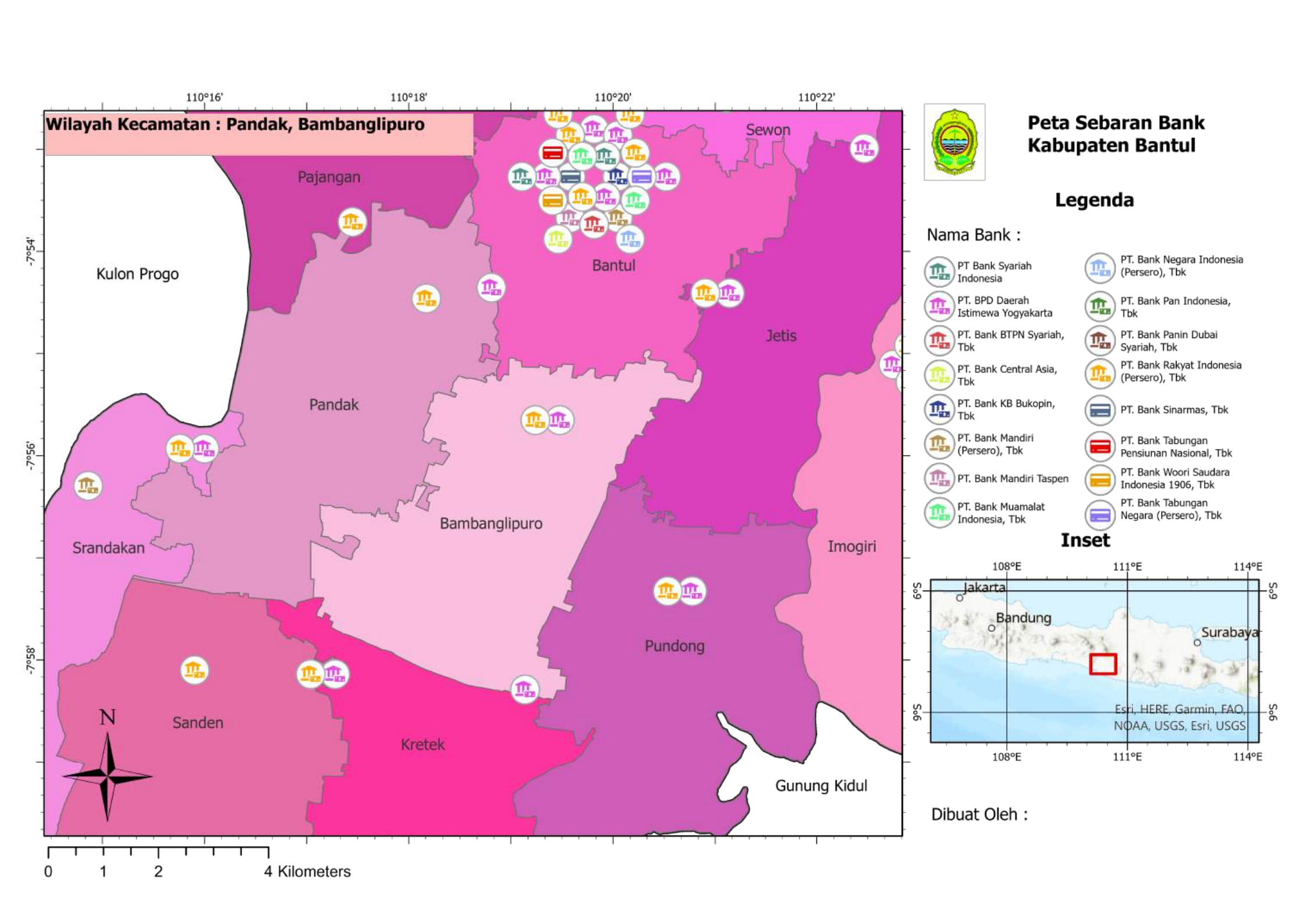
Wilayah Kecamatan : Pandak, Bambanglipuro
110°16'
110°18'
110°20'
110°22'
-7°54'
-7°56'
-7°58'
Sewon
Pajangan
Bantul
Kulon Progo
Jetis
Pandak
Bambanglipuro
Srandakan
Imogiri
Pundong
Sanden
Kretek
Gunung Kidul
N
0
1
2
4 Kilometers
Peta Sebaran Bank
Kabupaten Bantul
Legenda
Nama Bank :
PT Bank Syariah Indonesia
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank BTPN Syariah, Tbk
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank KB Bukopin, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri Taspen
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Inset
108°E
111°E
114°E
6°S
Jakarta
Bandung
Surabaya
Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
Dibuat Oleh :

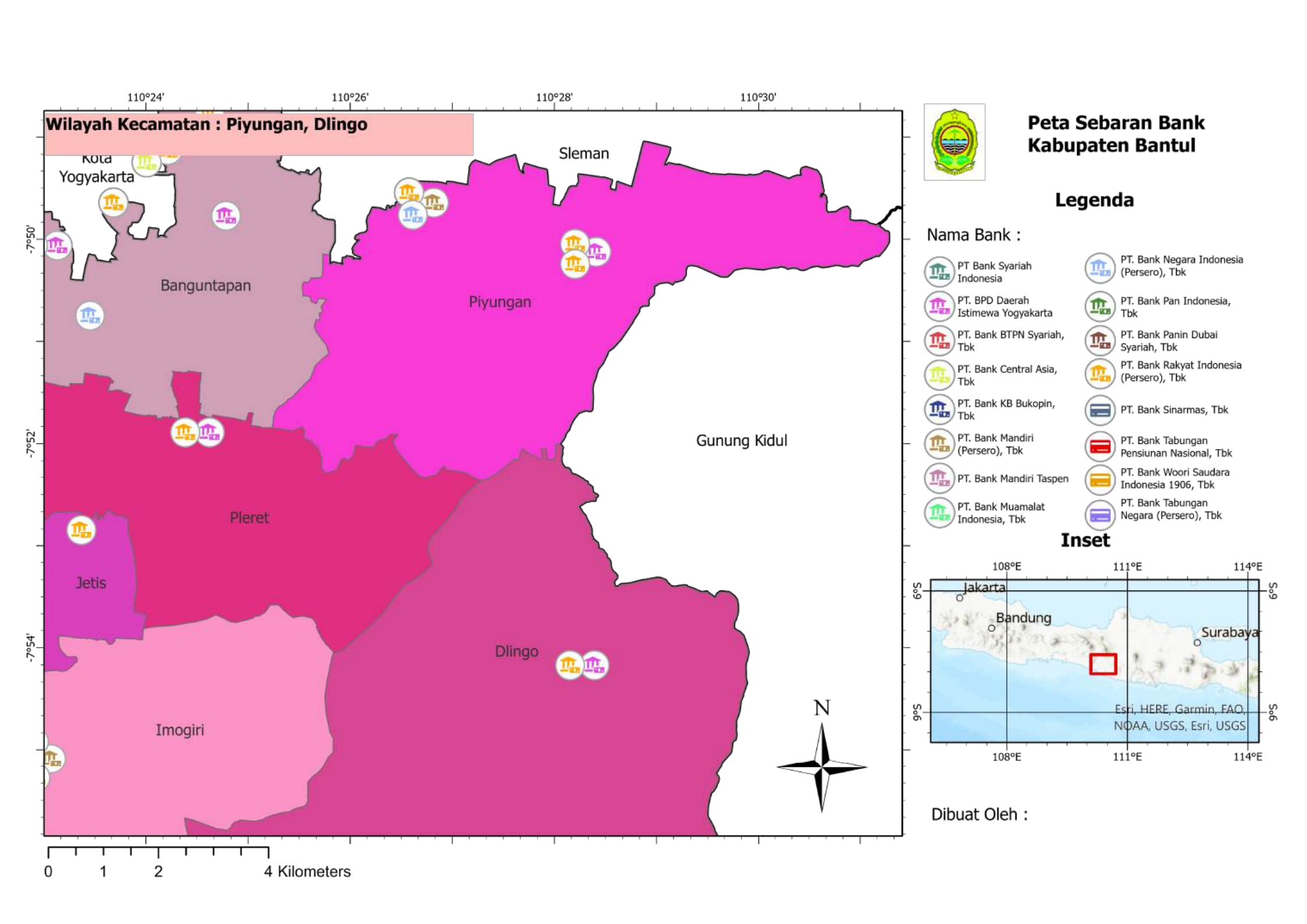
Wilayah Kecamatan : Piyungan, Dlingo
110°24'
110°26'
110°28'
110°30'
-7°50'
-7°52'
-7°54'
Kota Yogyakarta
Sleman
Banguntapan
Piyungan
Gunung Kidul
Pleret
Jetis
Dlingo
Imogiri
N
0
1
2
4 Kilometers
Peta Sebaran Bank Kabupaten Bantul
Legenda
Nama Bank :
PT Bank Syariah Indonesia
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank BTPN Syariah, Tbk
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank KB Bukopin, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri Taspen
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Inset
108°E
111°E
114°E
6°S
Jakarta
Bandung
Surabaya
Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
Dibuat Oleh :

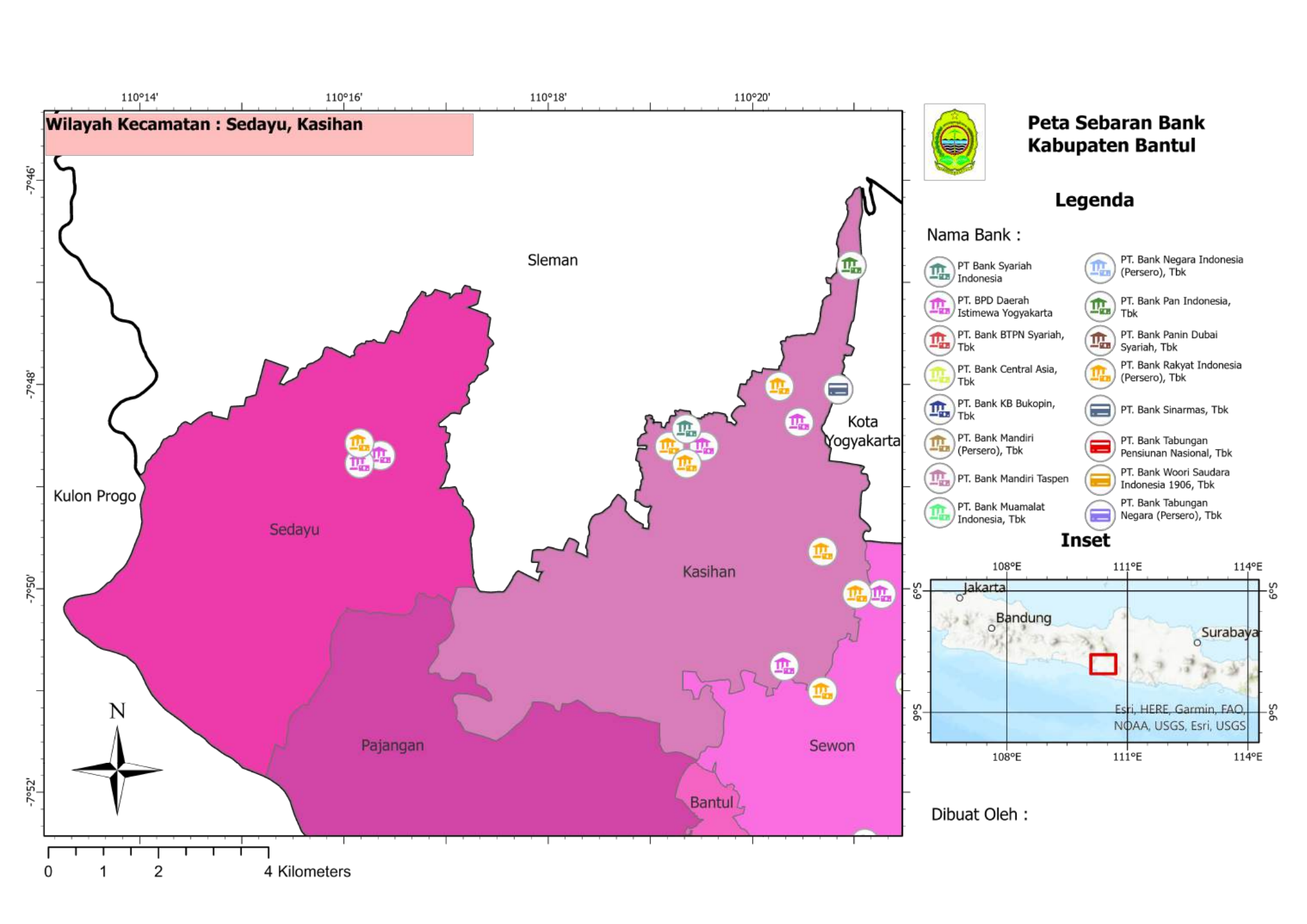
Wilayah Kecamatan : Sedayu, Kasihan
110°14'
110°16'
110°18'
110°20'
-7°46'
-7°48'
-7°50'
-7°52'
Sleman
Kota Yogyakarta
Kulon Progo
Sedayu
Kasihan
Pajangan
Sewon
Bantul
N
0
1
2
4 Kilometers
Peta Sebaran Bank
Kabupaten Bantul
Legenda
Nama Bank :
PT Bank Syariah Indonesia
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank BTPN Syariah, Tbk
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank KB Bukopin, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri Taspen
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Inset
108°E
111°E
114°E
6°S
Jakarta
Bandung
Surabaya
Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
Dibuat Oleh :

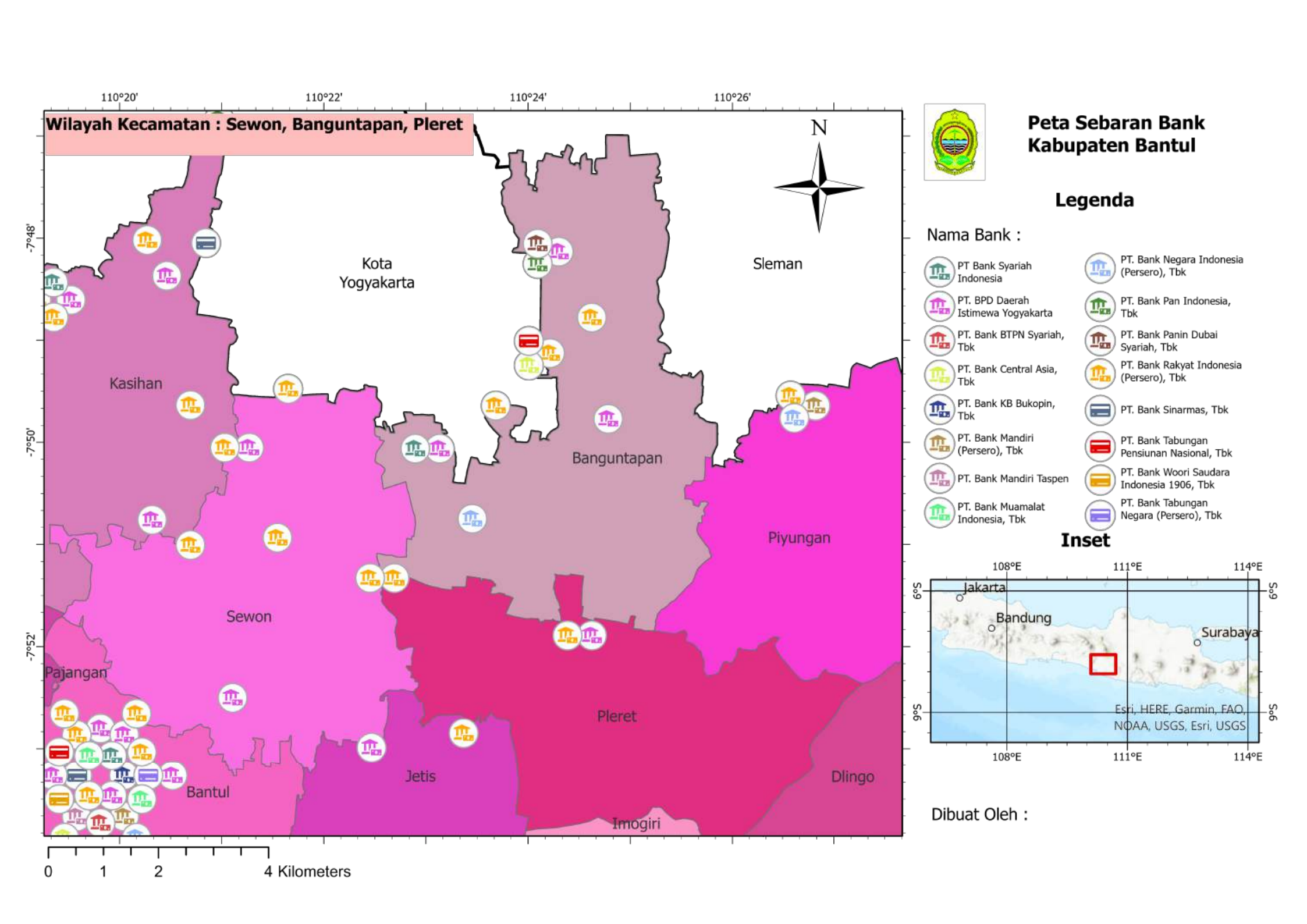
Wilayah Kecamatan : Sewon, Banguntapan, Pleret
110°20'
110°22'
110°24'
110°26'
-7°48'
-7°50'
-7°52'
N
Kota Yogyakarta
Sleman
Kasihan
Banguntapan
Piyungan
Sewon
Pajangan
Pleret
Jetis
Dlingo
Bantul
Imogiri
0
1
2
4 Kilometers
Peta Sebaran Bank Kabupaten Bantul
Legenda
Nama Bank :
PT Bank Syariah Indonesia
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank BTPN Syariah, Tbk
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank KB Bukopin, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri Taspen
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Inset
108°E
111°E
114°E
6°S
Jakarta
Bandung
Surabaya
Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
Dibuat Oleh :

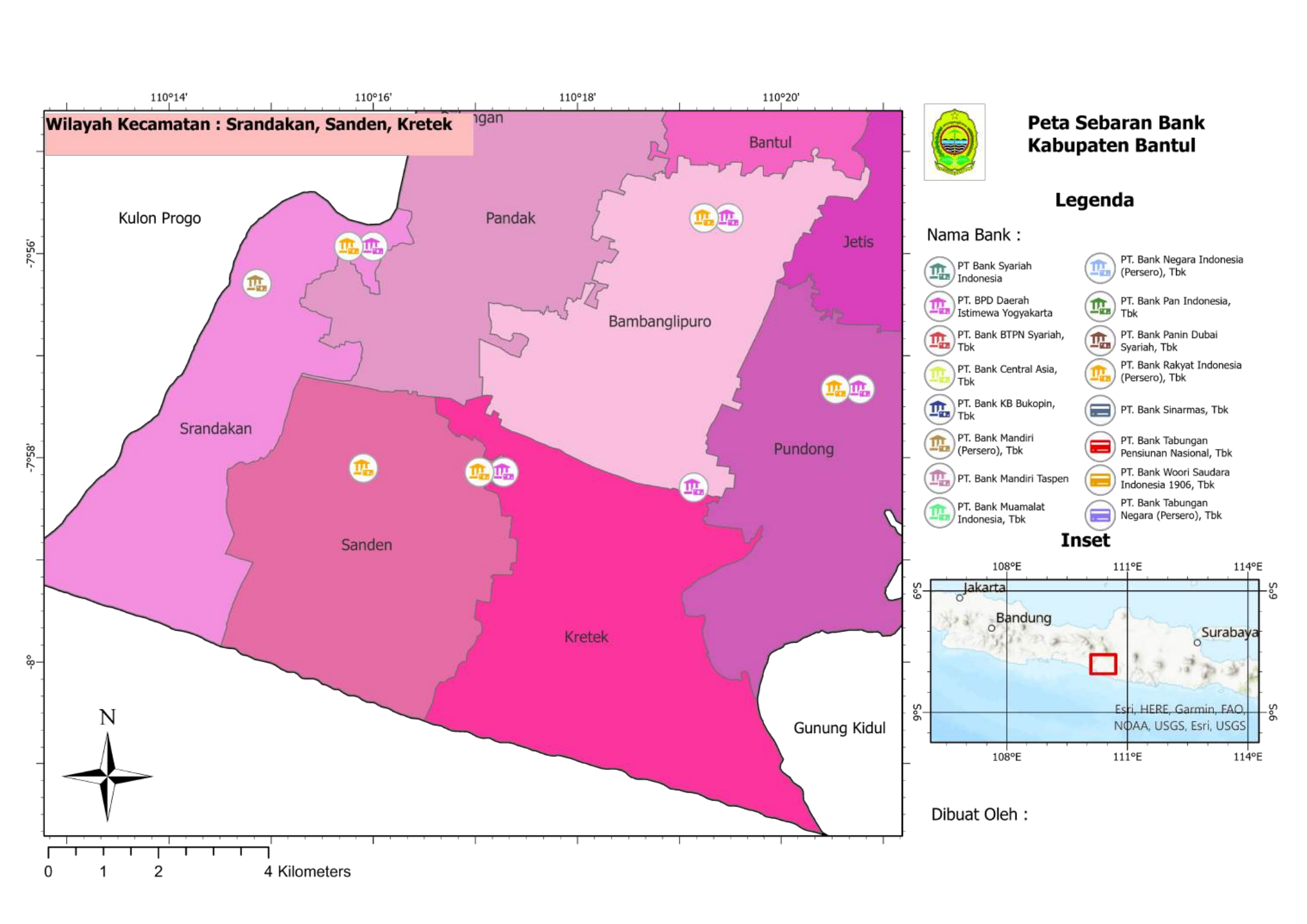
Wilayah Kecamatan : Srandakan, Sanden, Kretek
110°14'
110°16'
110°18'
110°20'
-7°56'
-7°58'
-8°
Kulon Progo
Pandak
Bantul
Jetis
Bambanglipuro
Pundong
Srandakan
Sanden
Kretek
Gunung Kidul
N
0
1
2
4 Kilometers
Peta Sebaran Bank
Kabupaten Bantul
Legenda
Nama Bank :
PT Bank Syariah Indonesia
PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank BTPN Syariah, Tbk
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank KB Bukopin, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Mandiri Taspen
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank Sinarmas, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Inset
108°E
111°E
114°E
6°S
Jakarta
Bandung
Surabaya
Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Esri, USGS
Dibuat Oleh :